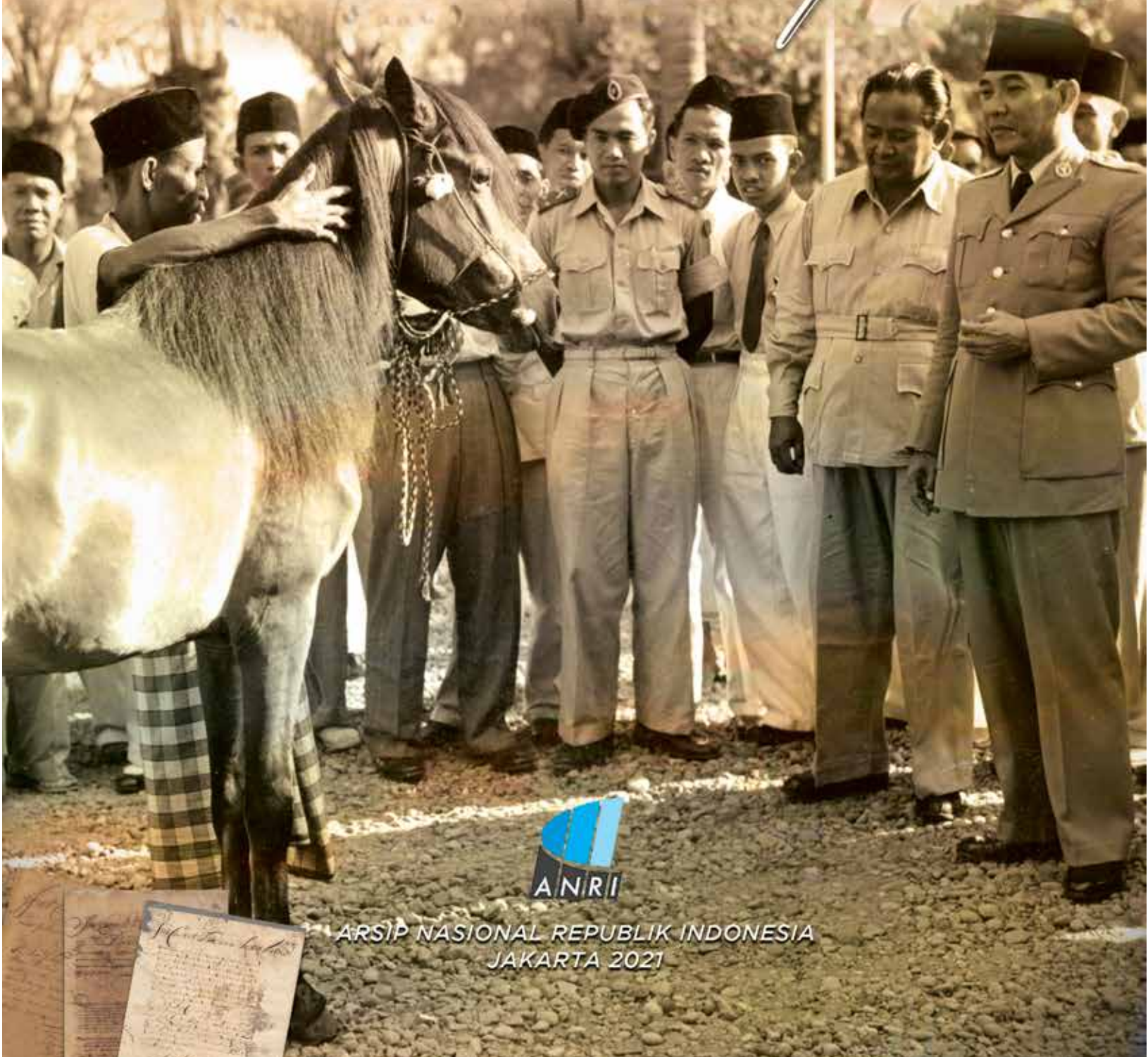




Citra
**Kabupaten
Sumbawa**
dalam Arsip



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2021

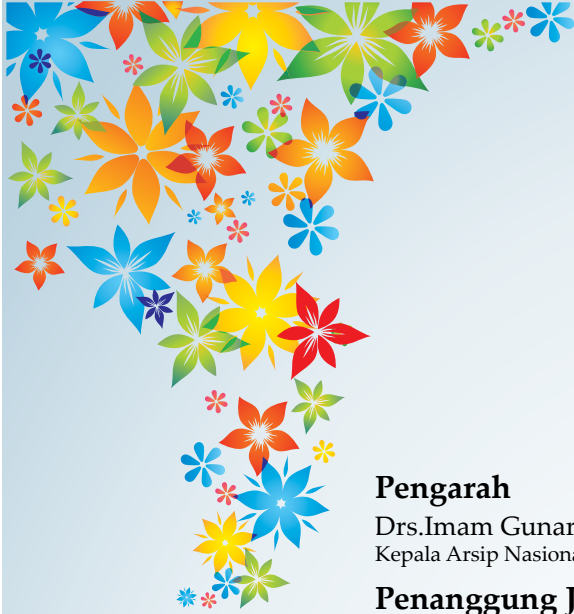


Citra
Kabupaten Sumbawa
dalam Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia





Citra **Kabupaten Sumbawa** *dalam Arsip*

Pengarah

Drs.Imam Gunarto, M.Hum
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Penanggung Jawab Program

Dra.Multi Siswati, MM
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Teknis

Mira Puspita Rini, S.Sos, M.Hum
Koordinator Kelompok Substansi
Pemanfaatan dan Penerbitan Naskah Sumber

Narasumber

Putro Adi Suryo, M.Si
Aries Zulkarnaen, S.Pd

Koordinator

Desi Mulyaningsih, S.Kom

Penulis

Putro Adi Suryo, M.Si
Desi Mulyaningsih, S.Kom

Editor

Dra. Nurarta Situmorang, M.Si

Penelusur Arsip

Beny Oktavianto, S.Kom
Dian Eka Fitriani, S.S
Eviani Yusnita, S.IP

Penerjemah Arsip

Rini Rusyeni, S IP, M.A.

Desain & Layout

Beny Oktavianto, S.Kom

Penerbit

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

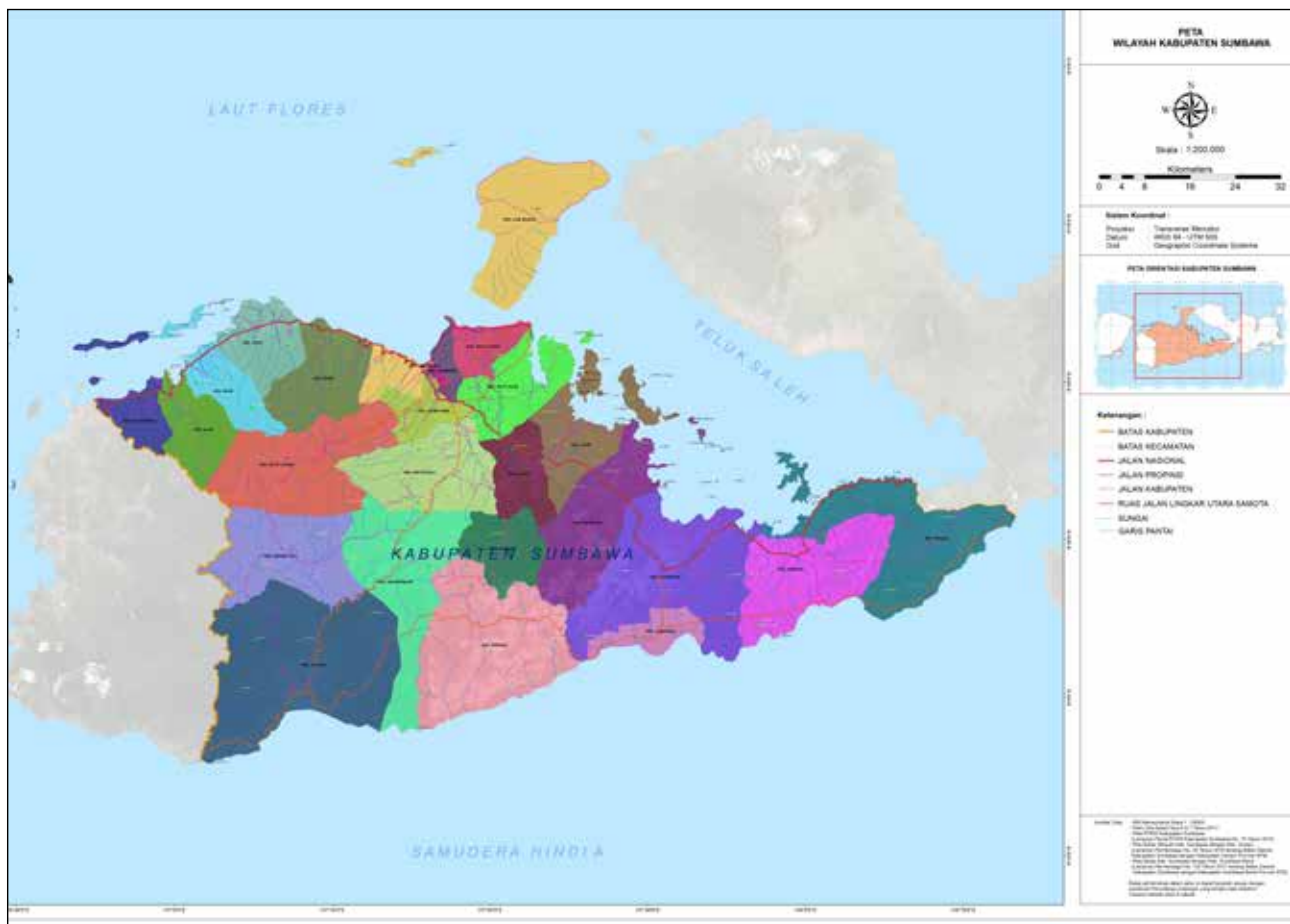
ISBN 978-602-6503-22-0



Hak Cipta © 2021

Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.





PETA WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA
 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa



LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA



DRS. MAHMUD ABDULLAH

Bupati Sumbawa
Periode 2021 - 2026



DEWI NOVIANY, S.PD., M.PD.

Wakil Bupati Sumbawa
Periode 2021 - 2026



DRS. H. HASAN BASRI, MM.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa



ABDUL RAFIQ
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa

BUPATI SUMBAWA DARI MASA KE MASA



Sultan Moh. Kaharuddin III
Pjs. KDH Suwatantra
TK.II Sumbawa
Periode 1959 - 1960



H. Madilaoe, A.D.T
Bupati KDH TK.II Sumbawa
Periode 1960 - 1965



Soedarli, B.A
Pjs. Bupati KDH TK.II Sumbawa
Periode 1965 - 1967



Drs. H. Hasan Usman
Bupati KDH TK. II Sumbawa
Periode 1967 - 1979



H. Madilaoe, A.D.T.
Bupati KDH TK.II Sumbawa
Periode 1979 - 1989



H. Yakub Koeswara, SE
Bupati KDH TK.II Sumbawa
Periode 1989 - 1999



Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si.
Bupati Sumbawa
Periode 1999 - 2000



Drs. H. Syahri Suwandi Bupati
PLTH Bupati Sumbawa
Periode 5 Agustus 1999 - 13 Maret 2000



Drs. H.A. Latief Majid, SH.
Bupati Sumbawa
Periode 2000 - 2005



Drs. Machfud Ahmad
Plt. Bupati Sumbawa
21 Maret 2005 - 22 Agustus 2005



Drs. H. Jamaluddin Malik
Bupati Sumbawa
Periode 2005 - 2010



H. Muhammad Nur, S.H, M.H.
Pjs. Bupati Sumbawa
25 Agustus - 10 November 2010



Ir. Mukhlis, M.Si.
Pjs. Bupati Sumbawa
15 November 2010 - 17 Januari 2011



Drs. H. Jamaluddin Malik
Bupati Sumbawa
Periode 2011 - 2016



Drs. H. Rasyidi
Plt. Bupati Sumbawa
118 Januari 2016 - 30 Januari 2016



Drs. H. Supran, MM.
Penjabat Bupati Sumbawa
1 Februari 2016 - 16 Februari 2016



H.M. Husni Djibril, B.Sc.
Bupati Sumbawa
Periode 2016 - 2021



SAMBUTAN





SAMBUTAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN SUMBAWA

Bismillahirrahmanirrahiim....

Segala puji kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga atas izin-Nya telah diberi kesempatan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Layanan dan Pemanfaatan untuk menyajikan Naskah Sumber Arsip Sejarah dalam bentuk Citra Daerah Kabupaten Sumbawa, yang sebagian materinya bersumber dari khazanah arsip tersimpan rapi di depo Arsip Nasional Republik Indonesia, kini tersaji indah menjadi memori kolektif bangsa.

Arsip sejatinya merupakan rekaman dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip hadir bisa karena faktor disengaja maupun tanpa unsur kesengajaan. Namun di masa yang akan datang akan menjadi suatu hal yang sangat penting dan berharga mewarnai kehidupan kita. Pun begitu pula dengan arsip sejarah perkembangan Kabupaten Sumbawa dimasa lalu catatan dan foto merupakan hal yang tidak begitu berharga, namun di zaman sekarang menjadi sangat berharga dan mungkin sangat dicari-cari oleh generasi sekarang.

Pemahaman mengenai pentingnya masa lampau yang terekam dalam arsip harus dimaknai oleh Kearifan Lokal dengan upaya mempertahankan nilai-nilai martabat bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pembentukan bangsa dan pembangunan karakter sesuai cita-cita dan nilai luhur bangsa.

Dengan demikian suatu bangsa memiliki jejak informasi perjalanan suatu daerah dan bangsa yang autentik, reliabel, utuh, sehingga tidak akan meninggalkan "tanda tanya atau teka-teki sejarah" kepada generasi yang akan datang. Sehingga generasi yang akan datang dapat merekonstruksi kembali peristiwa atau kegiatan yang terjadi di masa lalu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pembangunan, sosial budaya, ekonomi, melalui arsip.

Dengan terbitnya buku Citra Daerah Kabupaten Sumbawa ini diharapkan dapat meluruskan sejarah dan meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyelamatan arsip yang merupakan alat bukti yang autentik dalam rangka keutuhan memori kolektif bangsa.

Apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku Citra Daerah Kabupaten Sumbawa ini, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua "*tau tana Samawa*" khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah berkenan Menyusun dan menerbitkan Citra Daerah Kabupaten Sumbawa;
2. YM. Sultan Sumbawa yang telah berkenan memberikan secara ikhlas dokumen/arsip sejarah Sumbawa milik beliau untuk melengkapi Citra Daerah Kabupaten Sumbawa;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan untuk Citra Daerah Kabupaten Sumbawa;
4. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang telah mendukung pembuatan Citra Daerah Kabupaten Sumbawa;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memfasilitasi Zoom Meeting pembahasan Citra Daerah Kabupaten Sumbawa;
6. Sejarawan dan Budayawan se-Kabupaten Sumbawa, khususnya Sdr. Putro Adi Suryo, M.Si;
7. Rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah yang telah membantu kami dalam sosialisasi sejarah Kabupaten Sumbawa.

Sekian, semoga bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT, Aamiin Ya Robb terima kasih.

Sumbawa Besar, 27 September 2021
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sumbawa



Ir. Irin Wahyu Indarni



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman dan warna-warni indah tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa, oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Arsip menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan seni budaya dan sebaiknya disajikan secara menarik sehingga menguatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda pada budaya bangsanya (Presiden Joko Widodo, Juli 2021).

Khazanah arsip mengenai Kabupaten Sumbawa banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna menjadi anugerah yang amat berharga bagi daerah ini terekam pada pemandangan Teluk Badas dan pantai laut Sumbawa. Kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air digambarkan pada sosok Raja Sumbawa yang amat piawai berdiplomasi dan menjalin persahabatan dengan berbagai suku bangsa yang pernah hadir di tanah Sumbawa. Ciri khas religius dan semangat mempertahankan adat istiadat budaya melekat pada masyarakat. Kebersamaan dan hidup bergotong royong tercermin saat masyarakat saling bekerja sama dan membangun rumah serta menciptakan lingkungan yang aman dan selaras dengan alam melalui bangunan rumah tradisional yang masih di pertahankan hingga saat ini.

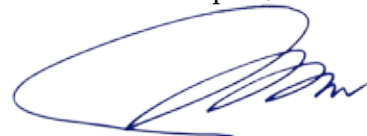
Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Citra Daerah Kabupaten Sumbawa terdiri dari 164 arsip yang berasal dari koleksi khazanah Arsip Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, dan Lembaga Adat Tana Samawa.

Citra Daerah Kabupaten Sumbawa ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, 27 September 2021

Kepala,



Imam Gunarto

DAFTAR ISI

Halaman Judul _____	i
Peta Wilayah Kabupaten Sumbawa _____	iv
Lambang Pemerintah Kabupaten Sumbawa _____	v
Bupati Sumbawa _____	vi
Wakil Bupati Sumbawa _____	vii
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa _____	viii
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa _____	ix
Bupati Sumbawa dari masa ke masa _____	x
Sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan _____	xii
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI _____	xiv
Daftar Isi _____	xvi
PENDAHULUAN _____	1
A. Sekilas Riwayat Kesultanan Sumbawa _____	3
B. Sumbawa di Masa Kolonial _____	7
C. Sumbawa di Masa Pendudukan Jepang _____	8
D. Sumbawa di Era Kemerdekaan _____	9
CITRA KABUPATEN SUMBAWA DALAM ARSIP _____	13
A. Geografis _____	14
B. Politik dan Pemerintahan _____	26
C. Keagamaan _____	102
D. Sosial Budaya _____	112
E. Pendidikan _____	132
F. Kesehatan _____	138
G. Perekonomian dan Pertanian _____	146
H. Infrastruktur _____	166
I. Transportasi _____	188
Daftar Pustaka _____	201
Penutup _____	202





PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibukota Sumbawa Besar. Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sumbawa merupakan nama dari pulau terbesar di NTB yang dihuni oleh dua etnis utama yaitu Suku *Samawa* di bagian barat pulau Sumbawa dan Suku *Mbojo* di bagian timur. Suku *Mbojo* hidup di kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Sementara suku *Samawa* sendiri hidup di dua kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Orang Sumbawa biasa dipanggil dengan sebutan *Tau Samawa* (Orang Sumbawa).

Secara astronomis, Kabupaten Sumbawa terletak pada posisi 116'' 42' sampai dengan 118'' 22' Bujur Timur dan 8'' 8' sampai dengan 9'' 7' Lintang Selatan dengan luas wilayah 6.643,98 Km². Secara geografis, Kabupaten Sumbawa berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah Barat, Kabupaten Dompu di sebelah Timur, Laut Flores di sebelah Utara dan Samudra Hindia di sebelah Selatan. Secara topografi, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut di mana sebagian besar di antaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter.

Sementara itu, ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibukota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibukota kecamatan yang tertinggi, sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibukota kecamatan yang terendah. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-rata 45 km. Kota Kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Tarano dengan jarak tempuh 103 km.

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2019 temperatur maksimum mencapai 36,6° C yang terjadi pada bulan Oktober dan temperatur minimum 32,0° C yang terjadi pada bulan Januari. Rata-rata kelembaban udara tertinggi selama tahun 2011 mencapai 89% pada bulan Januari dan terendah mencapai 70% pada bulan Agustus dan September, serta tekanan udara maksimum 1.011,1 mb dan minimum 1.006,5 mb.

Penduduk Kabupaten Sumbawa –berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2019– sebanyak 457.671 jiwa; terdiri atas 233.508 jiwa laki-laki dan 224.163 jiwa perempuan. Penduduk di Kabupaten Sumbawa mayoritas beragama Islam, diikuti beragama Hindu, Katolik, Protestan, dan Budha. Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani (sawah, kebun, dan *gempang* atau tegalan). Mereka juga

beternak dan mengembangkan bidang perikanan (air tawar, air payau, dan air laut). Kegiatan pertanian pada umumnya masih berlangsung secara tradisional, namun beberapa tahun belakangan sudah mulai menggunakan metode-metode modern.

A. Sekilas Riwayat Kesultanan Sumbawa

Kesultanan Sumbawa Resmi berdiri pada 30 November tahun 1648 M. Wilayah hukum Kesultanan Sumbawa terbentang dari timur ke barat; dari Empang-Tarano pada bagian timur dan Jereweh-Sekongkang pada bagian barat. Luas daratannya lebih kurang 8493 Km². Ibu Negeri Kesultanan Sumbawa terletak di Samawa Datu (sekarang bernama Sumbawa Besar). Kesultanan Sumbawa merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara Malaka dan Maluku dengan basis komoditas utama kayu sebang, candu, kuda, cassalagna (cangkang kura-kura), dan lilin (*Algemeente Secretarie*).

Struktur pemerintahan Kesultanan Sumbawa berubah dari masa ke masa. Ada tiga sumber utama yang bisa dirujuk sebagai referensi. Pertama, berdasarkan catatan perjalanan Heinrich Zollinger yang berkunjung langsung ke Sumbawa pada tahun 1847 dan dimuat dalam buku berjudul *Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa, en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Floris, gedurende de maanden Mei tot December 1847*. Kedua, dalam jurnal yang terbit tahun 1876 berjudul *Indische Taal, Land, en Volkenkunde, deel 23, (Jurnal Bahasa, Tanah, dan Etnologi Hindia Belanda)*, Volume 3. Di dalamnya terdapat catatan A. Ligvoet dengan judul "*Betreffende Den Economische Toestand En De Ethenographe Van Het Rijk Van Sumbawa*" (halaman 555). Ketiga, dalam catatan kesultanan yang dirangkum dalam buku *Sumbawa Pada Masa Dulu Karya Lalu Mantja* (1980).

Berdasarkan tiga sumber tersebut diketahui bahwa lembaga kekuasaan di Kesultanan Sumbawa dipimpin oleh seorang Sultan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang menteri, yaitu: Dea Ranga, Dea Kalibela, dan Dea Dipati. Wilayah kesultanan Sumbawa terdiri atas 3 bagian: [1] wilayah inti Kesultanan (*hoofdplaats*); [2] wilayah di luar inti Kesultanan (Pangantong); dan [3] wilayah *vasal* (daerah protektorat).

Wilayah inti Kesultanan disebut *Samawa Datu* (sekarang bernama Sumbawa Besar) dan terbagi menjadi 4 (empat) kampung (*karang*) yang disebut *empat lawang* (empat pintu) yaitu Lempeh, Brangbara, Samawa Puwen, dan Lawang Seketeng. Lempeh diperintah oleh Dea Longan Lempeh, Brangbara oleh Dea Kadimungan, Samawa Puwen oleh Dea Longan Samawa Puwen, dan Lawang Seketeng diperintah oleh Datu Busing. (Datu Busing, selain berkuasa di wilayah inti Kesultanan, juga berkuasa atas kampung Panjaring). Wilayah Samawa inti kesultanan dihuni oleh golongan penduduk yang disebut *Tau Juran*.

Untuk wilayah di luar wilayah inti terbagi menjadi 10 (sepuluh) wilayah yang

disebut *Pangantong*. Setiap *Pangantong* diperintah oleh seorang *Otak Pangantong*. Kesepuluh *Otak Pangantong* itu adalah Dea Ranga, Dea Kalibela, Datu Busing, Dea Longan Samawa Puwen, Dea Bawa, Dea Mangku, Dea Ngarru, Bumi Ngampo, Demung Karoya, dan Demung Mapin. Sejarawan Ligvoet, menyebut tujuh yang pertama sebagai *binnen Pangantong* (*Pangantong* dalam) dan tiga yang terakhir sebagai *buiten Pangantong* (*Pangantong* luar) karena mereka bertempat tinggal di dalam dan di luar ibukota Kesultanan. Di antara nama-nama *Otak Pangantong* di atas, ada yang merangkap jabatan, yaitu Dea Ranga, Dea Kalibela, Datu Busing, dan Dea Longan Samawa Puwen. Jabatan rangkap itu memberikan kewenangan tambahan bagi yang bersangkutan, sehingga dapat menyulitkan sultan karena ada di antaranya yang menganggap diri sebagai semacam *onder koning* (raja bawahan) yang kadang-kadang membangkang pada pemerintah pusat.

Para kepala *Pangantong* ini termasuk dalam pemerintahan kesultanan (*rijksbestuurder*) dan kelas bangsawan. Selain itu, di dalam wilayah *Pangantong* terdapat pejabat-pejabat bawahan yang disebut *Nyaka* yang langsung berada di bawah para kepala *Pangantong*. Berbeda dengan para kepala *Pangantong* yang diangkat dan diberhentikan oleh Sultan, *Nyaka* (kepala desa atau kepala beberapa kampung) dipilih langsung oleh rakyat. (Tetapi, di kampung Bugis, yang berada di dalam wilayah Samawa Datu, diperintah seorang Bugis yang bergelar “Kapiten”, dibantu dua pejabat bawahan disebut Panglima, dan tempat-tempat di mana orang-orang Bugis bermukim dipimpin oleh pejabat bergelar “Matowa”).

Pemerintahan Kesultanan Sumbawa juga memiliki wilayah *vasal* (negara) protektorat yang disebut *telu kemutar* yaitu Seran, Taliwang, dan Djerewe. Ketiga negara (*vasal*) masing masing dipimpin atau diperintah oleh seorang pejabat bergelar “Datu” atau “Datu Maraja”. Datu di *vasal* tersebut juga dibantu oleh 3 (tiga) orang menteri (disebut “Menteri Telu”) dengan nama atau sebutan yang berbeda. Tiga menteri yang mendampingi Datu Taliwang (Enti Desa, Kanu, dan Palasan). Tiga menteri yang mendampingi Datu Jereweh (Enti Desa, Palasan, dan Mekal Tana). Tiga menteri yang mendampingi Datu Seran (Raja Desa, Ranria, dan Demang Garah). Ketiga penguasa (datu) *vasal* ini (Taliwang dan Jerewe) dapat diangkat menjadi Sultan Sumbawa atau Sultan Sumbawa dapat merangkap sebagai penguasa di daerah *vasal*. Sebelum orang-orang Bali menaklukkan Lombok (Selaparang), dan VOC memaksa Sumbawa melepas wilayah Selaparang –dalam kontrak tanggal 12 Juni 1674– pulau itu termasuk *vasal* kerajaan Sumbawa sehingga disebut *Ampat Kamutar*.

Setiap wilayah *vasal* terbagi lagi ke dalam struktur yang lebih kecil yang disebut *Galarang*. Untuk itu sistem atau struktur birokrasi di *vasal* sama dengan di pusat kerajaan. Ada perbedaan catatan antara Lalu Mantja, Zollinger, dan Ligvoet terkait nama penguasa di wilayah *vasal*. Zollinger (1847) mencatat Taliwang dipimpin Raja Desa, Ligvoet (1876) menyebut Taliwang dipimpin oleh

Enti Desa. Sementara Seran dan Jereweh disebut Zollinger dipimpin oleh Datu, dan dalam Catatan Ligvoet disebut *Ranria*. Perbedaan ini suatu hal yang normal karena perbedaan masa masing-masing penulis dalam mencatat peristiwa. Zollinger mencatat peristiwa di era awal pemerintahan Sultan Amrullah, Ligvoet mencatat peristiwa di era akhir pemerintahan Sultan Amrullah, dan Lalu Mantja mencatat peristiwa di era sesudah Sultan Amrullah.

Dalam hubungan dengan *vasal*, Sultan menyerahkan sepenuhnya kepada tiga pejabat tinggi Kesultanan atau Menteri Telu (*rijksgrouten*) yaitu Dea Ranga, Dea Kalibela, dan Dea Dipati. Zollinger menyebutkan, Taliwang hanya berurusan dengan Dea Ranga, Seran dengan Dea Kalibela, dan Jereweh dengan Dea Dipati. Jika terjadi silang komunikasi, semisal Dea Ranga berkomunikasi dengan Seran atau Jerewe maka Dea Ranga melakukan pelanggaran yang disebut *lontak lawang* (*overschrijven van deur*) yang berakibat sanksi pada Dea Ranga, demikian sebaliknya. Ini soal etika dan sopan-santun dalam kekuasaan.

Selain berkuasa secara struktural terhadap tiga *vasal*, pejabat tinggi Kesultanan Sumbawa juga membawahi koordinasi wilayah di dalam negara pusat. Di antaranya jalur struktural di bawah Dea Ranga adalah Ampang, Plampang (di bagian Timur), Utan, Alas, dan Mapin (di bagian Barat), Suri, Slesek, Garantah, dan Dodo (di bagian Tengah). Dea Kalibela membawahi Batu Rotok, Jamu, Bao Desa, dan Tangkan Pulet. Dea Dipati membawahi Boer, Tengah Anom, dan Lampui. Dalam catatan Zollinger, Sultan sebagai pemegang tertinggi kekuasaan dalam memerintah dibantu oleh Dewan Hadat yang terdiri dari Dewan Pembesar Kesultanan (*Raad Van Rijsgrooten*), Mamanca Lima, dan Enam Lelurah. Dewan Pembesar Kesultanan terdiri atas: Dea Ranga (sebagai Ketua Dewan Hadat sekaligus Perdana Menteri), kemudian Dea Kalibela, dan Dea Dipati. Zollinger menambahkan bahwa selain tiga orang tersebut ada dua lagi anggota Dewan Pembesar Kesultanan yaitu Nenti Desa dan Dea Samede.

Tahun 1931 merupakan tahun dilaksanakannya penobatan Sultan Sumbawa terakhir yang berkuasa yaitu Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931-1958), sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pada tahun 1950 melalui Surat Emasnya, Sultan Sumbawa menyatakan diri bergabung dengan NKRI serta bersama Sultan Bima dan Sultan Dompu menemui Presiden Soekarno di Jakarta pada 12 Mei 1950. Kunjungan tersebut kemudian dibalas oleh Presiden Soekarno yang berkunjung ke Swapraja Sumbawa pada 30 Oktober 1950. Pernah berjaya dalam era pemerintahan Negara Indonesia Timur di mana Sultan Sumbawa menjadi Ketua Parlemen NIT. Namun, setelah NIT dibubarkan yang juga atas inisiatif –salah satunya–sultan Sumbawa maka secara total Sumbawa bergabung dengan NKRI tanpa gejolak apapun.

Matriks 01 Riwayat Kesultanan Sumbawa sejak 1648 - Sekarang

No.	Nama Sultan	Periode Kekuasaan
1	Dewa Mas Tjinni	1648 - 1668
2	Dewa Mas Gowa	1668 - 1674
3	Dewa Mas Bantan Dewa Dalam Bawa	1674 - 1702
4	Dewa Mas Madinah Muharam Harun Al Rasyid I	1702 - 1725
5	Riwayat Datu Bala Sawo Dewa Lengit Leng Sampar	1722 - 1725
6	Dewa Masmawa Sultan Djalaluddin Dewa Mas Muhammadsyah I Dewa Leng Gunung Setia	1725 - 1731
7	Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin I (Dewa Mas Meppasung Datu Poro)	1731 - 1759
8	Dewa Masmawa Sultanah Siti Aisyah (I Sugiratu Karaeng Bontoparang)	1759 - 1760
9	Dewa Masmawa Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin anumerta Dewa Lengit Leng Dima (Bima)	1760 - 1761
10	Dewa Masmawa Sultan Muhammad Djalaluddinsyah II (Gusti Mesir Abdurrahman Pangeran Anom Mangkuningrat)	1761 - 1764
11	Dewa Masmawa Sultan Mahmud	1764
12	Riwayat Dewa Mas Meppaconga Mustafa	1764 - 1775
13	Riwayat Datu Busing Lalu Komak	1775 - 1777
14	Dewa Masmawa Sultan Harunnurasyid II	1777 - 1790
15	Dewa Masmawa Sultanah Shafiatuddin	1777 - 1791
16	Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II (Lalu Muhammad Datu Bau Balo)	1791 - 1795
17	Riwayat Nene Ranga Lalu Dilaga Mele Manyurang	1816 - 1825
18	Riwayat Nene Ranga Lalu Manyurang Mele Abdullah	1825 - 1836
19	Riwayat Nene Kalibelah Lalu Padusung Dea Pen Mandesingi	1836
20	Dewa Masmawa Sultan Lalu Muhammmad Mesir	1836 - 1837
21	Dewa Masmawa Sultan Amrullah II	1837 - 1883
22	Dewa Masmawa Sultan Muhammad Djalaluddinsyah III	1883 - 1931
23	Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin III	1931 - 1958
24	Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV	2011 - Sekarang

Tingginya harapan dan kerinduan masyarakat atas sejarah masa lalunya, maka *Mudzakarah Rea* (Musyawarah Agung) Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) pada tanggal 8-10 Januari 2011 memutuskan untuk mengukuhkan Datu Raja Muda (Putra Mahkota) Muhammad Abdurrahman Daeng Raja Dewa menjadi Sultan Sumbawa XVIII. Puncak upacara penobatannya dilaksanakan pada Selasa 15 April 2011, berlokasi di Istana Balakuning, Istana Dalam Loka, dan Masjid Agung Nurul Huda, Sumbawa Besar.

B. Sumbawa di Masa Kolonial

Pada tahun 1660 VOC mulai memasuki wilayah kesultanan di Pulau Sumbawa dengan mengadakan perjanjian atau kontrak politik dagang dengan kesultanan-kesultanan di wilayah Pulau Sumbawa. VOC mulai memainkan politik monopoli pengangkutan dan kapal-kapal dagang. Pada 1674, tepatnya 12 Juni 1674, Kesultanan Sumbawa terpaksa menandatangani kontrak dengan VOC yang isinya melepas salah satu wilayahnya yaitu Selaparang di Pulau Lombok. Sultan Sumbawa saat itu adalah Mas Gowa yang kemudian mengirimmkan utusannya ke Rotterdam bernama Nene Juoro Saparang untuk menandatangani kontrak. Sumbawa juga harus membayar utang Selaparang kepada VOC yang cukup besar. Demikianlah kontrak pertama Sumbawa dengan VOC, namun kemudian terus direvisi dalam tiap pergantian Sultan hingga kontrak terakhir antara Kesultanan Sumbawa dengan Kerajaan Belanda terjadi pada 1938 yang disebut *Lange Politiek Contract*.

Pada abad ke-19, Hindia Belanda memiliki tiga kategori wilayah kekuasaan. Pertama, daerah pemerintah yang sepenuhnya sebagai wilayah Kerajaan Belanda. Kedua, mencakup wilayah yang disebut *Zelfsbesturende Landschappen* (daerah pemerintahan tidak langsung) karena sudah memiliki hukum tersendiri dan berdaulat untuk menjalankan aturan dan hukumnya itu. Kesultanan Sumbawa termasuk salah satu kesultanan kategori *Zelbesture*. Ketiga, mencakup wilayah yang tidak menerima hubungan perjanjian dengan pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan “negeri merdeka”, namun tetap diperhitungkan sebagai bagian dari Hindia Belanda. Daerah-daerah ini adalah Amarasi, Amanuban, Amanatun, Sonbait, Amfuang dan Wewiku Waihale

Akhir tahun 1911 sampai pada permulaan Agustus 1913 dibentuklah daerah pemerintahan yang disebut *Residentie Timor en onderhoorigheden* (Keresidenan Timor) dengan luas wilayah 63.55. Menurut Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1916 No. 331, Residensi Timor dan daerah sekitarnya dikelompokkan menjadi lima distrik (*afdelingen*) yaitu: [1] *Afdeling* Timor Selatan dengan pulau-pulau disekitarnya; [2] *Afdeling* Timor Utara dan Tengah di bagi dalam lima *onderafdeling*; [3] *Afdeling* Flores dibagi dalam tujuh *onderafdeling*; [4] *Afdeling* Sumba dibagi dalam empat *onderafdeling*; dan [5] *Afdeling* Sumbawa dibagi dalam tiga *onderafdeling*.

Sekitar tahun 1920 dilakukan kembali pengelompokkan Nusa Tenggara menjadi empat distrik yaitu Timor, Flores, Sumbawa, dan Sumba yang selanjutnya terdiri dari 16 sub-distrik. Masing-masing *afdeling* dikuasai oleh seorang Asisten Residen. Di bawah *afdeling* terdapat *onderafdeling* yang meliputi beberapa swapraja yang dikepalai oleh seorang *controleur* dibantu oleh beberapa *Bestuur Asisten* bangsa Indonesia.

C. Sumbawa di Masa Pendudukan Jepang

Pendaratan Jepang pada 14 Mei 1942 di Kesultanan Sumbawa melalui Labuhan Sumbawa, disambut oleh Sultan dan para Pejabat Istana dan Demung. Di mana-mana tentara Jepang disambut dengan gembira oleh rakyat sambil mengacung-acungkan bendera Jepang. Sesuai dengan UU No. 1 (pasal 1), yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenambelas pada 7 Maret 1942, antara lain menyebutkan: “Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang senantiasa sentausa dengan segera”.

Ketika itu, semua orang Belanda kemudian ditahan dan dibawa ke luar Lombok. Pejabat-pejabat pribumi yang setia kepada Jepang diizinkan untuk terus bekerja. Struktur organisasi pemerintah mulai disusun. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masing masing menjadi *Ken*. Setiap *Ken* dibagi atas *Bun Ken*, dan setiap *Bun Ken* terdiri atas *Gun*, dan *Gun* dibagi atas *Son*. Pulau Sumbawa dibagi atas dua *Ken*. *Ken Kanrikang* Sumbawa berkedudukan di Raba, Bima. Jabatan *Ken Kanrikang* dijabat oleh orang Jepang. Sedangkan *Gunco* dan *Sonco* dijabat oleh pribumi yang kebanyakan kepala Distrik dan Kepala Desa yang lama, dengan tujuan melancarkan urusan pemerintahan.

Di samping itu, Swapraja Sumbawa tetap melaksanakan pemerintahan bersama-sama *Bun Ken*. Namun, Badan Pengadilan Zaman Hindia Belanda tidak berubah dengan tugas dan wewenang yang sama. Hanya saja, selama Jepang memerintah Badan Pengadilan tidak berfungsi. Setiap kejahatan diurus langsung oleh *Kempetai*, yang pada umumnya bila sudah disiksa tersangka dilepas kembali tanpa dipenjara. Asumsi bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia tidak bermaksud menjajah, melainkan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, tidak terbukti. Faktanya, Jepang justru berusaha memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam masyarakat. Jepang menjadikan rakyat sebagai buruh kasar (*romusha*) untuk beberapa tujuan.

Namun, ada perbedaan *romusha* di Sumbawa dengan daerah-daerah lain. Sebelum kedatangan Jepang, pasukan sekutu yang mulai mem-*back up* Belanda di Hindia Belanda memberikan informasi ke Sultan Sumbawa. Informasi tersebut berisi tawaran agar Sultan Sumbawa mengungsi ke Australia, karena Jepang akan membunuh sultan-sultan yang beragama Islam seperti yang terjadi di Kesultanan Pontianak di mana sultan-sultan dibantai habis. Kapal untuk mengungsikan Sultan sudah siap. Informasi yang sama diterima Sultan Bima yang merupakan mertua dari Sultan Sumbawa. Sultan Bima menyatakan ikut apapun keputusan menantunya, sementara Sultan Sumbawa menyatakan akan hidup mati bersama rakyatnya di Sumbawa. Sikap ini juga dilakukan oleh Sultan Tidore dan Bacan. Sultan Bacan saat itu bertanya langsung ke Sultan Sumbawa terkait sikap yang akan diambil dari tawaran sekutu.

Dalam hubungan dengan Jepang, Sultan Sumbawa berhasil memerankan fungsi diplomasi untuk menjaga keseimbangan situasi. Untuk itu, sebenarnya tidak ada

romusha di Sumbawa. Meskipun ada kerja paksa namun rakyat Sumbawa diberikan gaji atas keringatnya bekerja, seperti ketika membangun lapangan terbang (*gempa*) Sumbawa. Sultan berhasil memerankan fungsi kebudayaan dalam menghadapi Jepang. Semisal tradisi 1 Syuro, orang-orang Sumbawa memakan *Me Sura* (Nasi Bulan Syuro) berupa bubur yang dicampur dengan beragam sayuran. Orang-orang Jepang menyukai makanan tersebut dan meminta kepada Sultan agar Perayaan 1 Syuro diadakan tiap hari agar tetap bisa menikmati *Me Sura*.

D. Sumbawa di Era Kemerdekaan

Informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, baru diterima oleh masyarakat Sumbawa pada permulaan September 1945. Hal ini disebabkan oleh sarana komunikasi yang sulit pada masa itu. Pemuda Sumbawa yang bernama Lalu Malakusuma dan Sukardani sebagai utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman membawa berita resmi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menemui Muhammad Zain Anwar pengurus organisasi Persatuan Pegawai Sumbawa (PPS) yang telah berdiri sejak pendudukan Jepang. Mereka menguraikan panjang lebar mengenai negara Republik Indonesia yang baru diproklamkan itu. Berita gembira itu segera diumumkan kepada seluruh rakyat Daerah Kesultanan Sumbawa melalui PPS yang diketuai oleh Lalu Abdul Wahab. Esoknya, beberapa pemuda Sumbawa antara lain Cahir, M. Ilham dan Lalu Abdul Hamid membawakan juga berita gembira tersebut yang memicu PPS membentuk Badan yang dinamakan Komite Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia Sumbawa.

Komite Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia Sumbawa, segera mengirim utusan untuk menemui Sultan Sumbawa (Pemerintah Kesultanan Sumbawa) dan meminta agar Kesultanan Sumbawa masuk Wilayah Republik Indonesia. Pertemuan ini segera mengambil keputusan untuk mengibarkan Sang Merah Putih secara resmi di halaman Istana sebagai pernyataan kepada dunia bahwa Daerah Sumbawa adalah bahagian dari Republik Indonesia. Maka pada 10 September 1945, disaksikan oleh ribuan penduduk Sumbawa, Sang Merah Putih dikibarkan di halaman Istana Sultan Sumbawa, oleh M. Ilham dan Muhammad Zain Anwar.

Dengan berkibarnya Sang Merah Putih di halaman Istana Sultan Sumbawa, maka secara resmi berkibar pulalah Sang Merah Putih di kantor-kantor Pemerintahan, Dinas Jawatan, baik di ibukota Kesultanan maupun di ibukota Kecamatan (Kedemungan) ataupun di desa-desa. Dalam pidato sambutan Ketua Komite, Lalu Abdul Wahab mengatakan, mulai hari ini dan seterusnya, Daerah Sumbawa adalah Daerah Republik Indonesia. Karena itu, setiap Putra Bangsa Indonesia berkewajiban membela Republik Indonesia. Setelah dinyatakan bahwa Kesultanan Sumbawa masuk wilayah Republik Indonesia, maka oleh Komite Pelaksanaan Kemerdekaan Daerah Sumbawa, membentuk tiga Badan, yaitu: Komite Nasional Indonesia (KNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Badan Penerangan. Dengan terbentuknya ketiga Badan tersebut, secara otomatis

Komite Pelaksana Kemerdekaan Indonesia Daerah Sumbawa dibubarkan serta tugasnya yang belum selesai diserahkan kepada ketiga Badan tersebut.

Sebagai reaksi atas berita proklamasi itu, tibalah tentara-tentara Belanda yang sebelumnya melarikan diri ke Australia lalu menuju Kupang pada tanggal 7 September 1945. Pada 11 September 1945 di bawah komando Timor Force mereka tiba di Kupang. Selanjutnya terjadi perubahan situasi politik setelah kedatangan pemerintah kolonial Belanda ini. Semangat kemerdekaan dari Jawa banyak memengaruhi situasi di daerah ini. Pada konferensi Malino yang diadakan pada 15-25 Juli 1946 dibicarakan apakah bentuk negara Indonesia Timur negara kesatuan atau negara federal. Pada saat itu H.J. van Mook mengusulkan secara jelas bentuk negara federal untuk daerah itu.

Pada saat konferensi itu wakil dari masing masing residensi hadir. Wakil-wakil dari Sumbawa yang hadir adalah Moehammad Kaharoeddin (Sultan Sumbawa), Moehammad Salahoeddin (Sultan Bima), Oemboe Toenggoe Bili (*Zelfbestuurder* Momboro/ Sumba), Don J. Th. Ximenes da Silva (*Zelfbestuurder* dari Sikka/ Flores), Bapa Kajah (Endeh), H.A. Koroh (*Zelbestuurder* Amarasi) dan I.H. Doko (Goudoever, 1946:26-60). Sebagaimana halnya di konferensi Malino, pemerintah kolonial berupaya bahwa Residensi Timor dan pulau-pulau sekitarnya disatukan dengan Bali, Lombok dan pulau Selatan Daya. Maksudnya adalah untuk menjadikan sebuah daerah otonomi menyatakan bahwa ini adalah wujud nyata keinginan untuk menyampaikan hak menentukan nasib sendiri dan menentang pengaruh-pengaruh Republik dari Jawa. Pada konferensi itu diusulkan bahwa perlu dibentuk sebuah parlemen atau sebuah perwakilan rakyat (Badan Perwakilan Rakyat). Oleh karena itu, perlu dimasukkan wakil-wakil dari peserta konferensi dan representasi dari kelompok rakyat lainnya

Pembentukan Dewan Raja Raja dan DPR Gabungan Kerajaan-Kerajaan Atas dasar usulan dalam konferensi Malino, akhirnya Gabungan Federasi Keradjaan-Keradjaan berhasil didirikan pada 21 September 1946. Badan ini terdiri dari Dewan Raja-Raja dan Dewan Perwakilan Rakyat. Disebutkan bahwa setiap 30.000 penduduk dapat memilih seorang wakilnya, bagi yang memiliki penduduk kurang dari 30.000 juga diperbolehkan mempunyai seorang wakil.

Pada 15 Juni 1950 diterimalah pelaksanaan UU No. 44 Tahun 1950 oleh parlemen negara Indonesia. Pada 5 Agustus 1950 Dewan Raja-raja dan pekerjaan tradisional lainnya (*heerendiensten*) dihapuskan. Sebelum Negara Indonesia Timur dihapuskan, pemerintah NIT telah menolak adanya undang-undang untuk pemerintahan lokal (UU No. 44 Tahun 1950), untuk menyamakan posisi dengan pemerintahan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pada Agustus 1950 dibubarkanlah keberadaan NIT. Setelah pembentukan Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950 lenyaplah pula swapraja secara lambat laun di seluruh Indonesia (Reid, 1974:161-165).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 21/1950 (Lembaran Negara 1950, No. 59) Timor, Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Bali dikelompokkan ke dalam satu provinsi administratif, yaitu Provinsi Sunda Kecil. Pada saat itu Indonesia terdiri atas

sepuluh provinsi yaitu: Sumatra Utara, Sumatra Tengah, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (termasuk Madura), Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil

Menurut UU Darurat No. 9 Tahun 1954 nama Provinsi Sunda Kecil diubah menjadi Nusa Tenggara. Menurut UU No. 1 Tahun 1957, Nusa Tenggara dibagi menjadi tiga daerah tingkat I, yaitu Provinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Timor, Flores dan Sumba).

E. Pembentukan Kabupaten Sumbawa

Pembentukan Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 64 Tahun 1958 dan UU No. 69 Tahun 1958 yang merupakan tonggak sejarah terbentuknya Daswati I dan Daswati II dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Matriks 02 Daswati dalam Provinsi NTB

No.	Daswati	Daerah
1	Daswati II	Lombok Barat
2	Daswati II	Lombok Tengah
3	Daswati II	Lombok Timur
4	Daswati II	Sumbawa
5	Daswati II	Dompu
6	Daswati II	Bima

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 69 Tahun 1958, PS Kepala Daerah Swatantra Tingkat I NTB menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada 22 Januari 1959 dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan PS Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa Muhammad Kaharuddin III sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa. Oleh karena itu, pada 22 Januari 1959 dijadikan hari lahirnya Kabupaten Sumbawa, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa No. 06/KPTS/DPRD tanggal 29 Mei 1990. Kecamatan yang tercakup di dalamnya ada 14 buah, yakni: Kecamatan Empang, Kecamatan Plampang, Kecamatan Lape-Lopok, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Utan Rhee, Kecamatan Alas, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, dan Kecamatan Jereweh.

Perkembangan selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 1999 dibentuk beberapa kecamatan baru menjadi 19 kecamatan, yakni: Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Labuhan Badas.

Aspirasi masyarakat yang berkembang dipandang perlu adanya penambahan (pemisahan) kecamatan sehingga pada tahun 2003 berkembang menjadi 25 kecamatan

yakni: Kecamatan Tarano, Kecamatan Maronge, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Rhee, Kecamatan Buer, dan Kecamatan Moyo Utara

Dengan ditetapkannya UU No. 30 Tahun 2003, Kabupaten Sumbawa resmi dibelah menjadi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa kemudian hanya meliputi 20 Kecamatan. Sedangkan lima kecamatan lainnya menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, yakni: Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, dan Kecamatan Seteluk

Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat di wilayah kecamatan Lape Lopok dan kecamatan Ropang dan sebagai implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan Lape-Lopok dan Kecamatan Ropang dibelah kembali menjadi Kecamatan Lopok dan Kecamatan Lape. Sedangkan Kecamatan Ropang dibelah menjadi Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, dan Kecamatan Lenangguar. Dengan demikian keseluruhan kecamatan di Kabupaten Sumbawa saat ini berjumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, 157 Desa, dan 8 Kelurahan.

Perjalanan panjang sejarah Kabupaten Sumbawa dapat kita pelajari dari arsip-arsip yang ditemukan sebagaimana yang kami tampilkan dalam bagian bab per bab dalam penerbitan Citra Daerah Kabupaten Sumbawa ini.

**CITRA KABUPATEN SUMBAWA
DALAM ARSIP**



Geografis



Pada Bab Geografis terdapat 7 arsip yang menggambarkan keadaan geografis wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Peta Pulau Sumbawa, Pelabuhan Sumbawa, dan Pemandangan Teluk Badas.

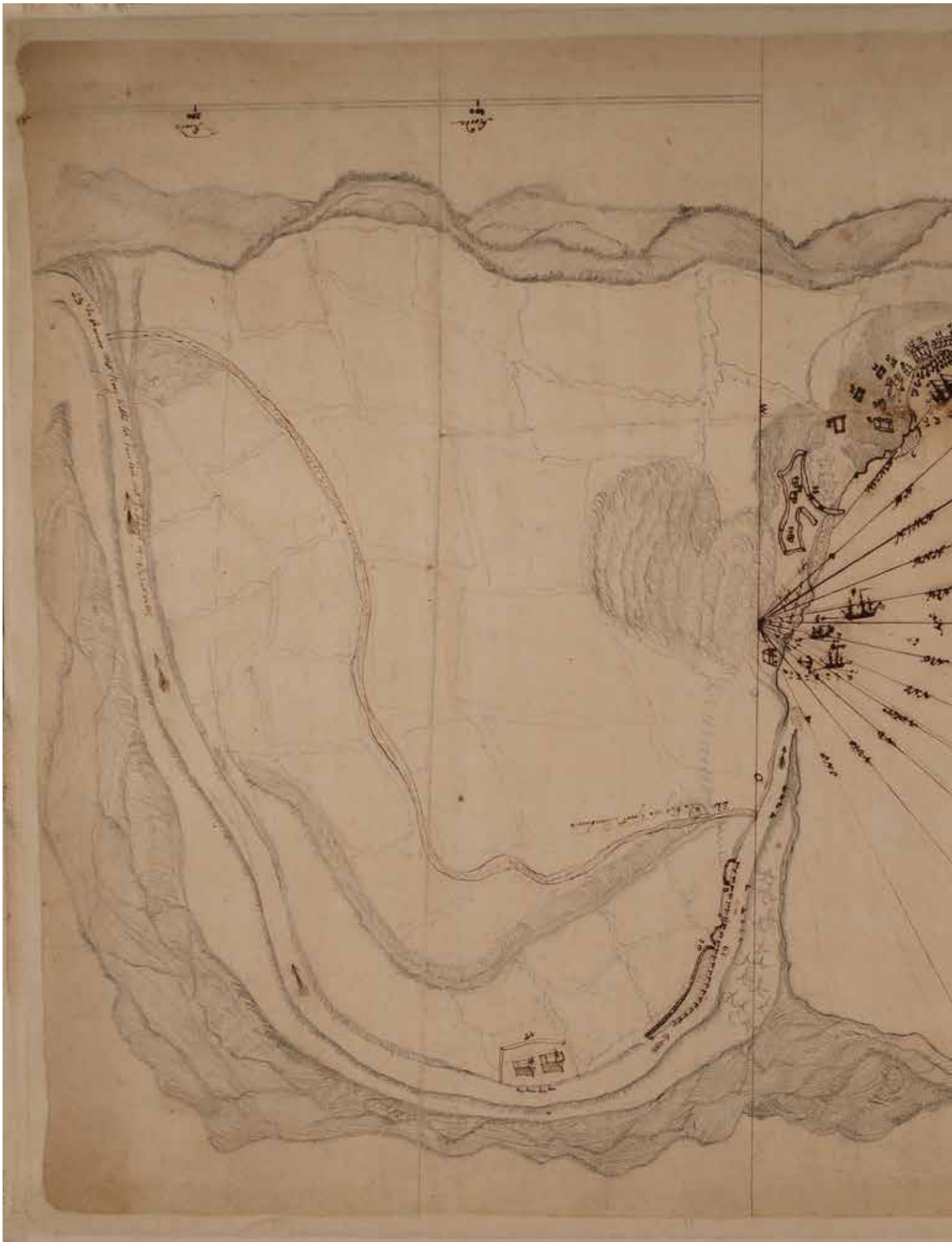
Wilayah Kabupaten Sumbawa berupa dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut. di mana sebagian besar di antaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat, sebelah Timur dengan Kabupaten Dompu, sebelah Utara dengan Laut Flores, dan sebelah Selatan dengan Samudera Hindia.

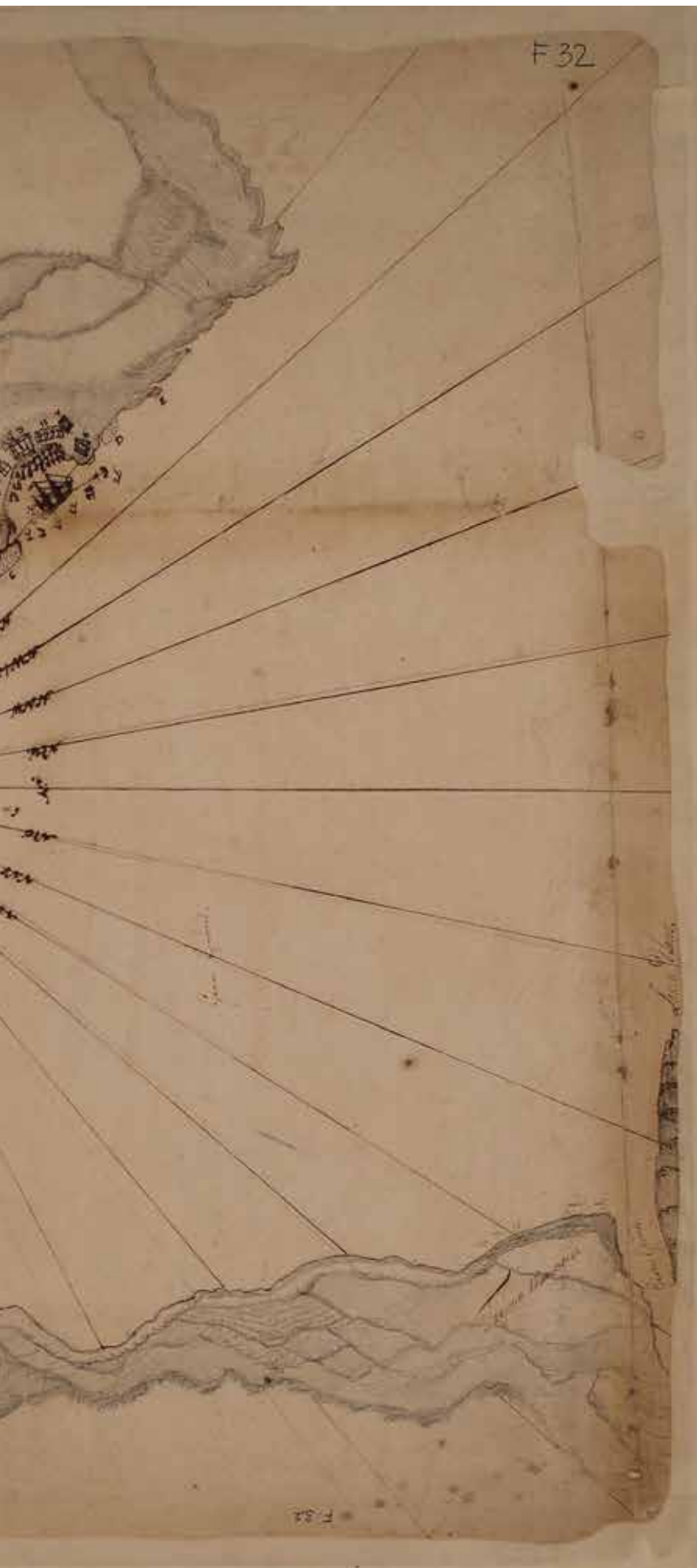




Posisi dan letak geografis Pulau Sumbawa pada jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah dari Malaka dan Maluku, melalui pesisir utara Jawa, Bali, Lombok dan Sumbawa menyebabkan Pulau Sumbawa banyak disinggahi para pedagang yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, Cina, dan Arab. Dalam sketsa peta tergambar Pelabuhan di Pulau Sumbawa, Laboa, dan Sumbawa Besar, pada 30 Desember 1788.

Sumber: ANRI, De Haan F3





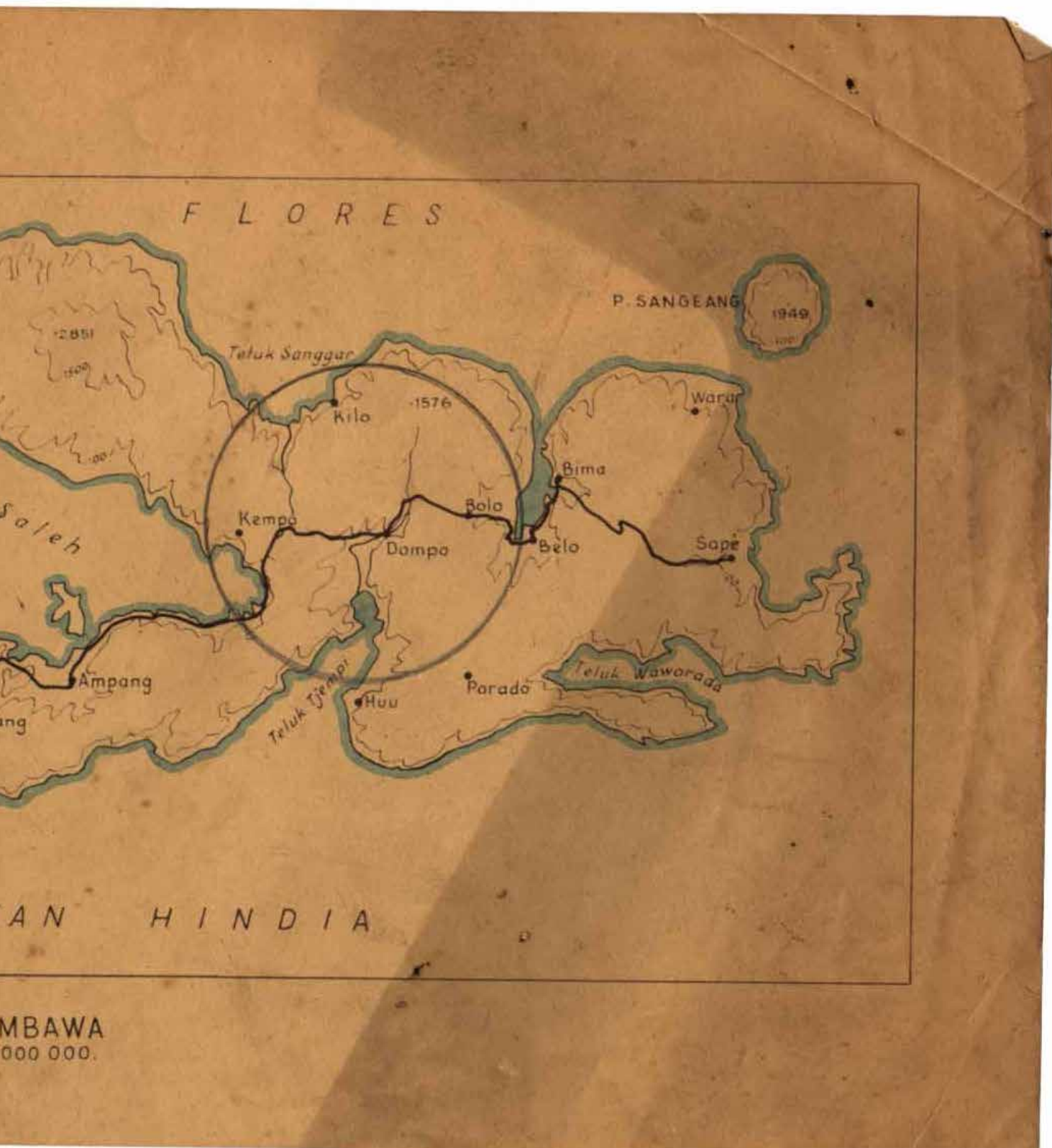
Secara geografis, Pulau Sumbawa berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Lombok di sebelah barat, dan Selat Sape di sebelah timur, 1788.

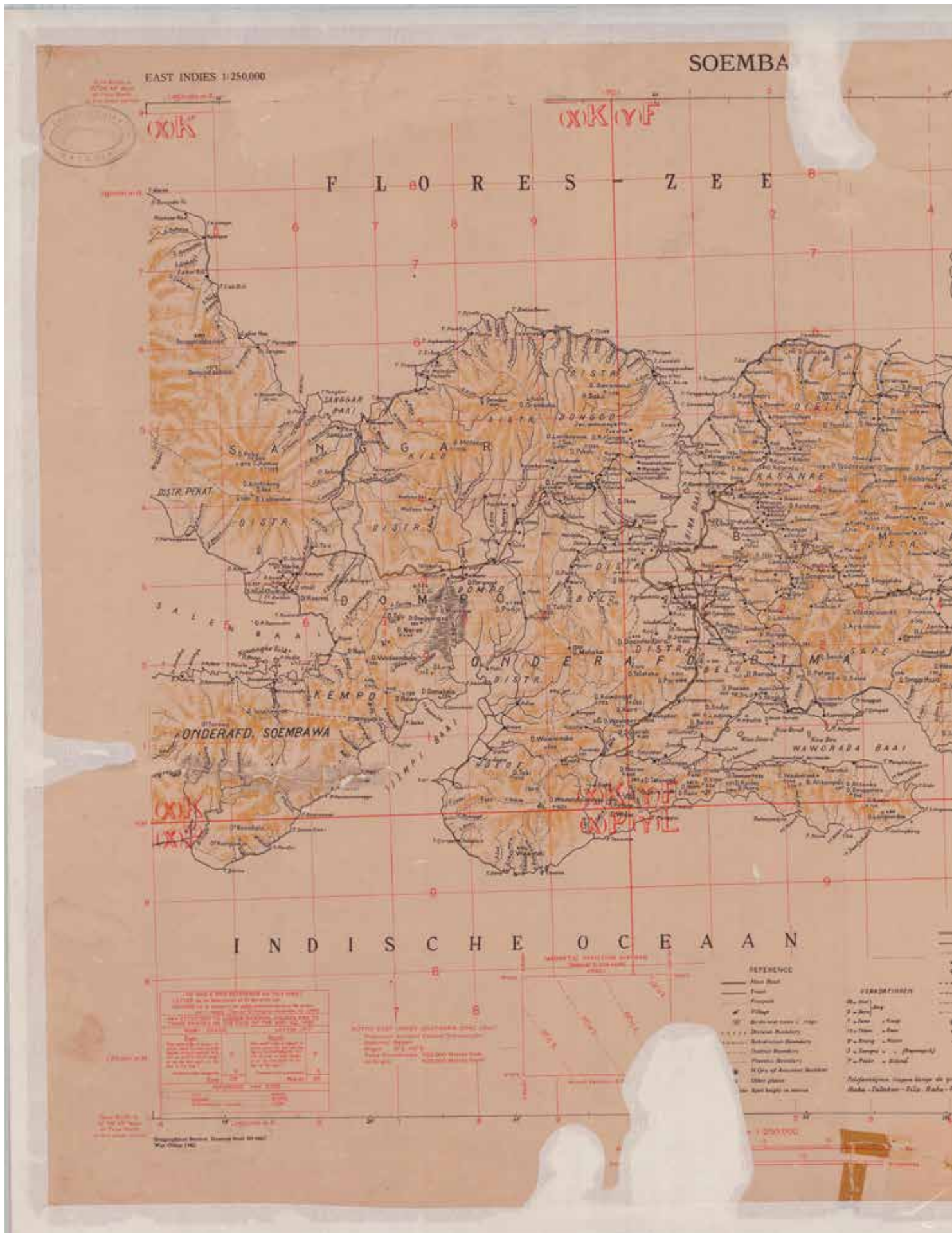
Sumber: ANRI, De Haan F32



Pada tahun 1920 Residensi Timor dalam perkembangan dibagi menjadi Afdeling Sumbawa, Flores, Sumba dan Timor. Afdeling Sumbawa terdiri dari onderafdeling Sumbawa, Bima (meliputi daerah Bima, Dompus, Sanggar) dan Taliwang (meliputi daerah Taliwang, Serang, dan Jereweh)

Sumber: ANRI, M. Yamin 1013







Pulau Moyo merupakan pulau yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pulau ini memiliki luas 350 km², ketinggian maksimum 671 meter, dan garis pantai 88 km. Pulau Moyo mempunyai obyek wisata darat dan laut. Hutan tropis pulau Moyo merupakan habitat kawanan rusa, sapi liar, babi hutan dan burung gosong (megapodius) yang dilindungi. Dalam sketsa peta tergambar Soembawa Pulau Moyo, East Indies (Sumbawa, Nusa Tenggara Barat), 1942.

Sumber: ANRI, Topografi No.2746.



Kepulauan Sunda Kecil meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba dan Timor. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kepulauan ini merupakan suatu provinsi tunggal bernama Provinsi Sunda Kecil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah Provinsi. Dalam sketsa peta menggambarkan Pulau Soembawa pada tahun 1943.

Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia 2689



Pemandangan Teluk Badas, 10 Mei 1949.

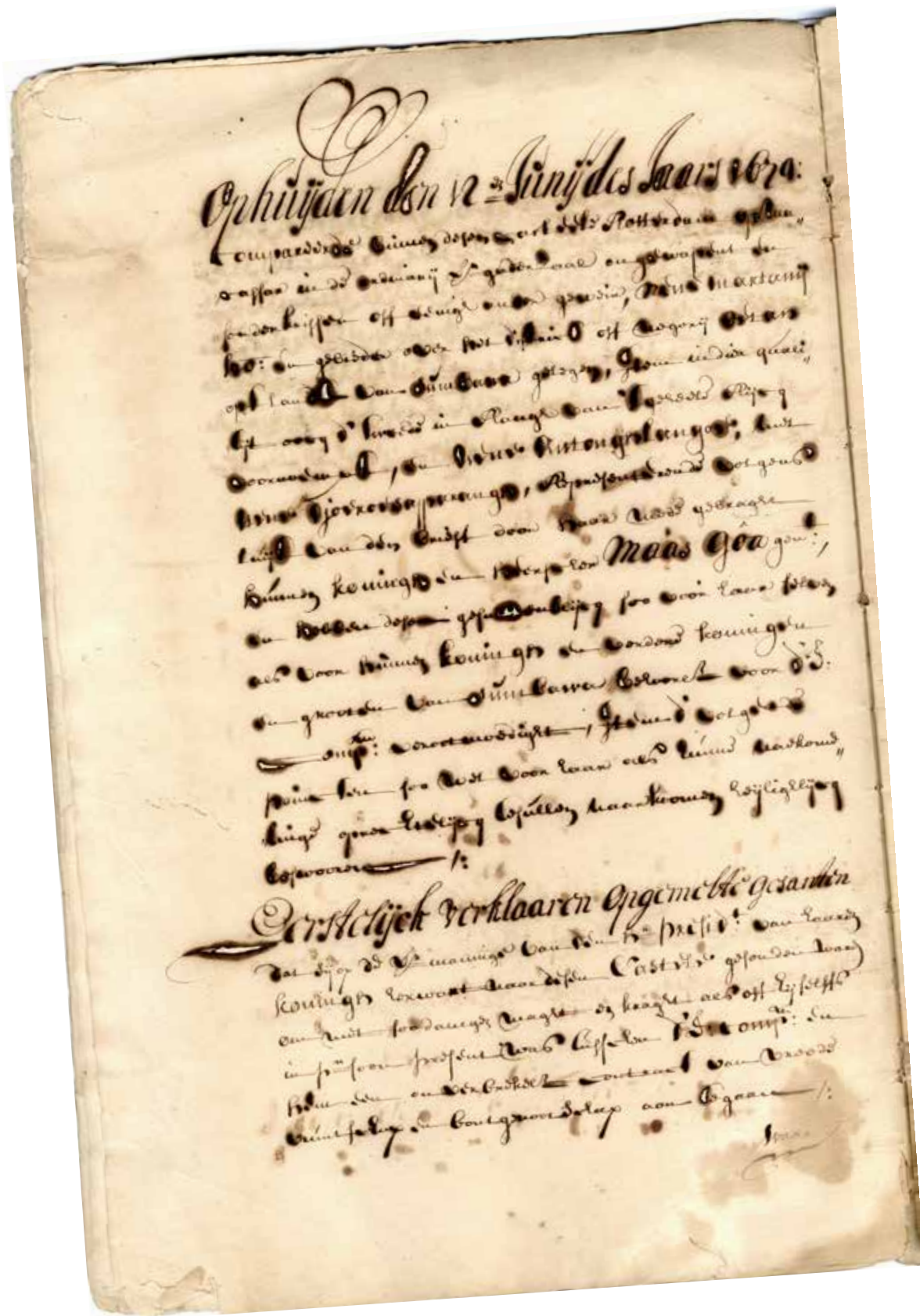
Sumber: ANRI, RVD NTT No.274

Politik dan Pemerintahan



Pada Bab Politik dan pemerintahan terdapat 76 arsip yang menggambarkan situasi politik dan pemerintahan Kabupaten Sumbawa pada masa Kesultanan Sumbawa, hingga kunjungan Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat daerah ke Kabupaten Sumbawa.

Hubungan antara Kesultanan Sumbawa dan VOC telah terjalin sejak abad ke-16, dengan adanya kontrak politik perdagangan dengan kesultanan-kesultanan di wilayah Pulau Sumbawa yang dilakukan pada tahun 1660 hingga 1698. Kehadiran VOC juga mempersatukan kesultanan-kesultanan di wilayah Pulau Sumbawa dengan adanya perjanjian perdamaian untuk tidak berperang dan VOC akan mengawasi jalannya perdamaian dengan membangun pos-pos di wilayah kesultanan-kesultanan tersebut pada tahun 1701.



Pada tahun 1673 pusat pemerintahan Kesultanan Sumbawa memindahkan pusat pemerintahan dari Selaparang ke Sumbawa. Pemindahan ini menimbulkan kecurigaan pihak VOC karena setelah pemindahan ini Lombok dan Sumbawa menjadi pusat perlawanan VOC di wilayah tersebut. Maka pada tanggal 12 Juni 1674 VOC memaksa Sultan Mas Bantan (Raja dibuat dalam 2 bahasa yaitu bahasa Arab Melayu dan bahasa Belanda Sumbawa 1674-1702) untuk menyerahkan wilayah Selaparang kepada VOC. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan perlawanan terhadap VOC. Kontrak dibuat dalam 2 bahasa yaitu bahasa Arab Melayu dan bahasa Belanda
Sumber: ANRI, Makassar 374-15

کتله هاري به اوله هولا هاري دله ي بولم چون تاهن سديب انتر
 قوجي قولمفت سوره اي ماسق درالکله رونده وقت بچار بشر دتانه مگاس
 نايخ در فرسنگان دان کرس نيلو مترتاني اچ دان کفال داري نكري اوترن
 دتانه مياو دان لاکري يغ بشر در فرسگار اوغ بشر دتانه مياو دان نينوانم لاغوا
 دان نينو چور سفاغ يغ کنتي يغ بشر دتانه مياو يغ بير نام هر لوق م سفته بون
 دالر سورت يغ دي اوغ باو مگر ديان سوانت بعت سوره اي به مبه کمدين اي
 بر سفته انتر القرآن دان بر جنج اي و او منور سگار فرغ ادر تر قلس دياوين

برو امنيا کراتوس ايت بکامل دي اوغ امفون راج ديانتر قنجا جر فرزندني
 سوره مهور و کاهري دان بائي سگار کولستر فداک اکر دي مونتس دان بايسکي سوات فردا
 مسين دغور کاشني سفته او فاد راج سند ير ادر سين در فاکر و فير هاري قنجا

292

Op 12 Febr. 1676

Uit naam van de Compagnie der Indische Oost-Indische Compagnie

van Sumbarwa

Uit naam van Sultan Mas Bantam

Deelstaetich verklarings opgedruelt

in dat hi op de vermaninge vanden Dero

van Laxer, koningh derwaert naar d'eer. Cal

gehouden vanden oudt d'ood quincen maght

als off hi selffe in d'andoor d'oudt wat luyt

Compagnie en hem en ouer d'oudt d'oudt Coult

van d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt

2.

voet op woerls geuegoticoet d' g'era

voet d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt

dat van mi vordaan luffen de g'ouwal Co

tot g'ouwal nijeg d' land van d'oudt d'oudt

voet d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt d'oudt

في تاريخ كروا

سودوم مع فقت دان صومر كن جادي در فد هاري

المفرد اذ عن راج سما وادان بلكا نعت كولينه سفرة

عاش دان لاک فد كيك كمد بن جادي بوله معيكت مغير

دامين سفد مخرج تباد بوله برويه م لاک ملين جادي

هوه ان سبطه هك وچ دان بتد بيا بوله ماسفكن

اتوافقه

في تاريخ كروا

ميدان اين راج سما و اميري كفا مكي سفرة فد ودار

ح ماسفدان جان دالوتان سما و تباد بوله ماسفكن

فد اشرا عن مسك سياتوم دان لاک بتد بوله او م لاک

فد بجا ابر نيان انو فد بجا و لاک جكر بتد و

سيفه كني مكي دنان ايت انو فز بتد نيز دمعكا

د بوله ماسفكن او نوتسن انوسو فدر فد راج م

د عن سدا مكي امسكي سياتوم

Dokumen kontrak antara VOC dengan Sultan Mas Bantam tanggal 12 Februari 1676 mengenai hak atas daerah Selaparang dalam dua bahasa, Arab Melayu dan Belanda.
Sumber: ANRI, Makassar 375-6

مکدین در فدایت سوور
شکایت در فدایت انوار
فدایت این دلزنانان دار
هارب قیامه فدایان
مبلغ فدی و افیهودان
سکوت دست انوار

سقای تنوخر دایان
بیت دیات ساج مانسوق
لاذ اورغ لایق در فدایت
در فدایت تو سبت این فدایت
عن ناه طغی انوار سقا
شرد مکن لایق سجاد بوله
دبا و اغن جک سجاد دغن

Van myn teygenkoming sijn voo
Latz locoten gelyc die het rooff des sel gromis
"meertel" opsoort en oudetochten die
het uoerde bekrachtighe gderoucken
Een krullen vande, ten overstaan van sijn
Coogt. Placa de vande Majesta, g'fave dardij
ho van Ternaten, Grain Tuckel, aron vaudd
aron Manio Grain Saijo, aron bello, die Grain
glickon, die d'he soeg mit kinnud g'vroudeghed
vau luecheninge (alt uude d'oudghe v'vande d'v'v
alt) alt g'kingen v'vanden oudetochten

Alsdit gescontractert is sijn de bekrachtig
g'fave dardij van d'he v'vande d'v'v
die sijn v'vanden

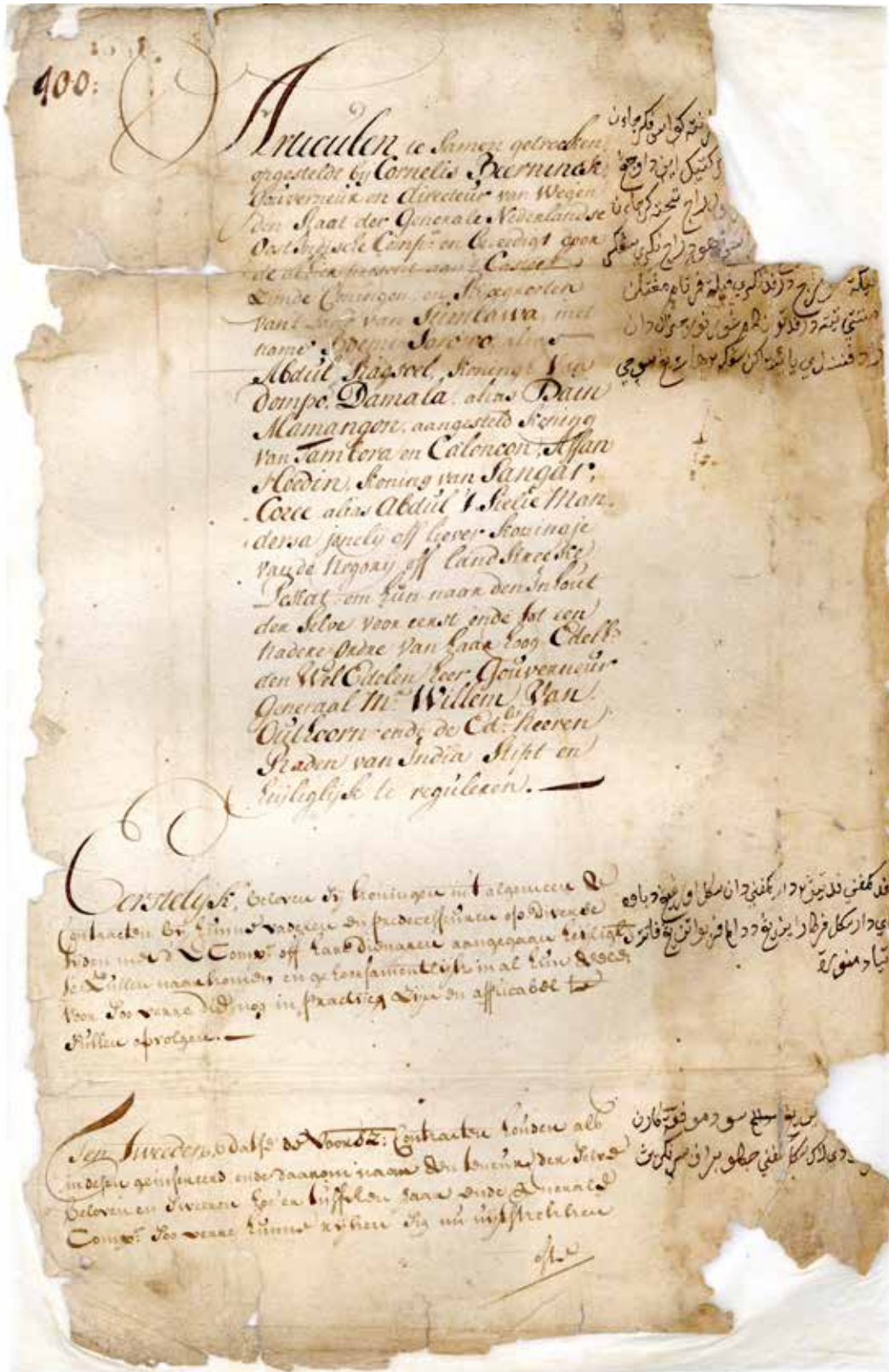


D. van v'vanden
Wijlt D'v'vanden
v'vanden

broeder v'vanden v'vanden

Handwritten signature in cursive script, possibly reading 'J. van v'vanden'.

Caes v'vanden
v'vanden
v'vanden



Kontrak-kontrak antara Gouvenour en Directeur van wegen den staat der generale VOC, Cornelis Beerninck dengan Raja Sumbawa, Boemi Surowo alias Abdul Bagsael, Raja Dompou, Damala alias Dain Manangon yang merangkap kerajaan Tambora dan Colocon, Raja Sanggar Affan Noerdin alias Abdul Sulieman yang juga membawahi Negeri Pekat yang berisi mengenai perjanjian perdamaian diantara Kerajaan-kerajaan Sumbawa, Dompou, Tambora dan Colocon, Sanggar dan Pekat untuk tidak berperang dan bahwa VOC akan mengawasi jalannya perdamaian dengan membangun pos-pos di wilayah kerajaan-kerajaan tersebut. VOC juga dapat melakukan perdagangan serta memanfaatkan hasil bumi milik kerajaan-kerajaan ini, kontrak di buat tiga bahasa yaitu bahasa Belanda, Bugis dan Arab Melayu, 18 April 1701

Sumber: ANRI, Makassar 374-1

of to na an desen nocht honder mit te R. h. l. i. e. d. e. ...
loijden werden een goede v. a. d. e. v. i. n. d. v. d. b. o. u. d. g. e. w. e. e. d.
sta. p. o. d. i. e. c. o. n. v. i. n. g. e. d. a. g. e. t. o. d. e. n. d. a. t. i. n. a. l. d. e. n. e. e. e. l. l. e. t. e. t.
g. e. t. o. n. i. n. e. n. i. n. o. p. e. t. l. i. g. h. e. t. e. t.

میرا منکران فیروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان

Den Vrienden ...
... de handel ...
... contractanten ...
... de admissie ...
... de Comp. Wegen ...
... van de Comp. na ...
... van de Comp. na ...
... van de Comp. na ...
... van de Comp. na ...
... van de Comp. na ...
... van de Comp. na ...
... van de Comp. na ...
... van de Comp. na ...

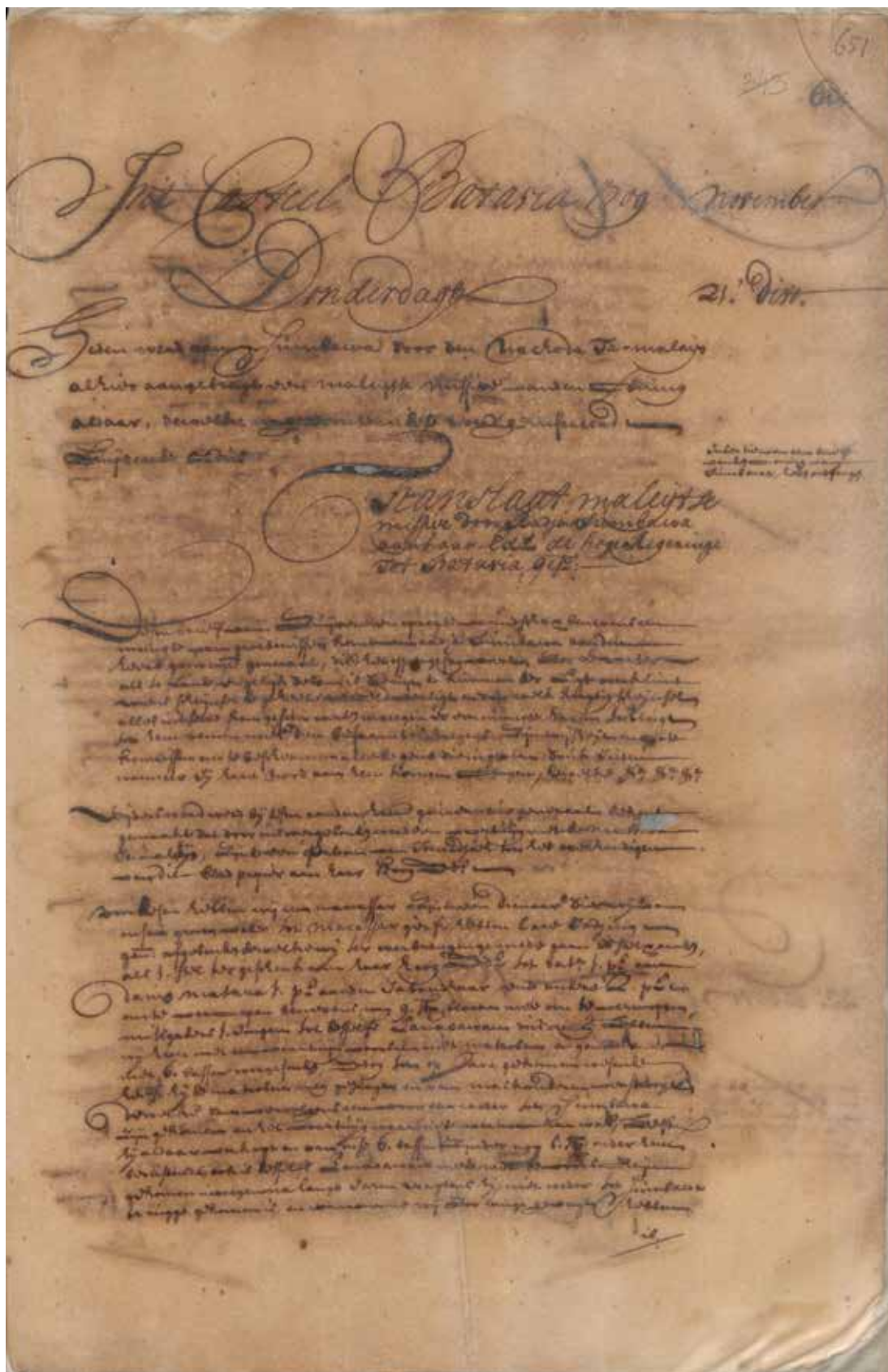
بیرا منکران فیروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان

Den Vrienden ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...

فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان

Den Vrienden ...
... de Comp. ...
... de Comp. ...

فروزان فیروزان منکران فیروزان
فروزان فیروزان منکران فیروزان



Terjemahan surat berbahasa Arab Melayu dari Sultan Sumbawa Mas Madina tanggal 21 November 1709 kepada Gubernur Jenderal VOC di Batavia mengenai kontrak dagang dengan VOC. Dalam surat dikatakan bahwa Kesultanan Sumbawa setuju mengadakan kontrak dagang dengan VOC. Selain itu juga dilaporkan dalam surat bahwa Kesultanan Sumbawa juga memiliki hubungan politik dan dagang yang erat dengan Kesultanan Gowa di Makassar terlebih lagi bahwa permaisuri Sultan Sumbawa masih memiliki hubungan keluarga dengan Kesultanan Gowa.

Sumber: ANRI, HR 2533 fol 651

817

Int. Cassel Batavia 13. Moertan: 18^{te}
Maandag 19^{de}
mits funderings vanger allen

Dinsdag 20^{de}

Ho het fcheyren der verquising van
kwaad de claudt oet feng mit de
entroye twee translaet Bructer door
den hering van Sumbawa aontyde
Coelheit den hene gouvenerne gemaect
ou van den siabandhaer ^{Empoerden} Juseph van
Banda geschreven Luydenen. Als volgt

Translaet Malay. de kony
door den hering van den Juseph van
Banda aontyde ^{Empoerden}
Den hering van Sumbawa
M. Juseph Juseph
gouverner gemaect van
Indiëlant. Juseph van

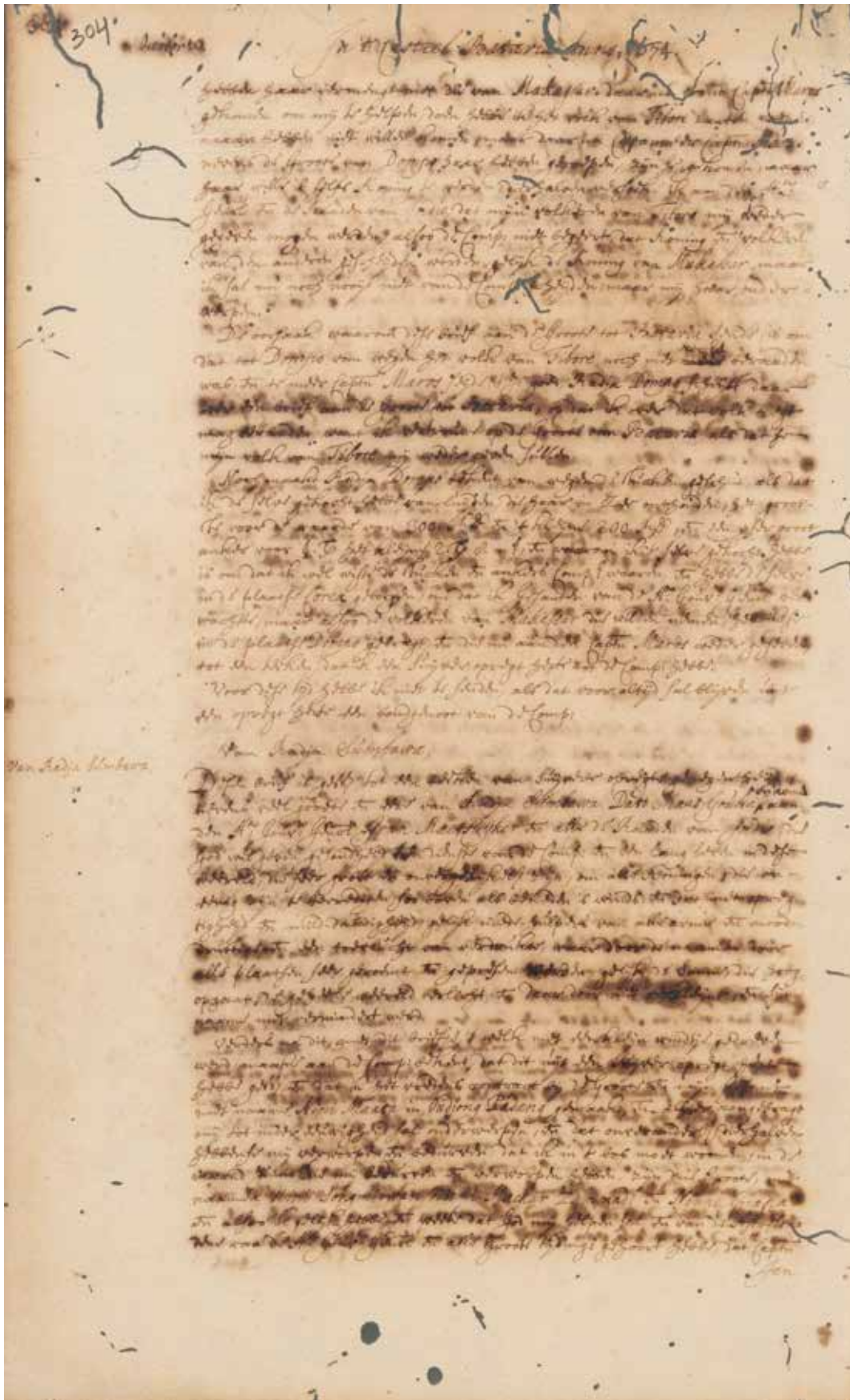
Lepu oerf ea op regter hant vord ender uet
vordig gese den Juseph van Sumbawa
maet de kony van Sumbawa van de hening
lyke gese van Sumbawa op de rige da
den hene gouvenerne gemaect te Batavia
die te gese mit vord 18^{te} 19^{de}

Wyl den vord den hene gouvenerne gemaect
wilt gemaect dat en de magtige god
belycht huft mit Juseph van Sumbawa
op en vord den hene gese mit en 24^{de} kog
van de maent samulan mit de regentelyk
ho te vord schryft en vord, betykt en vord
aan van de kony van Sumbawa
op hunderant vord en vord van de hene
Banda is vord vord en vord vord
palsong die vord mit Batavia of de
maet de kony mit de hene te vord
ou vord en vord te vord vord en
vord vord vord en te vord vord en
gese

857

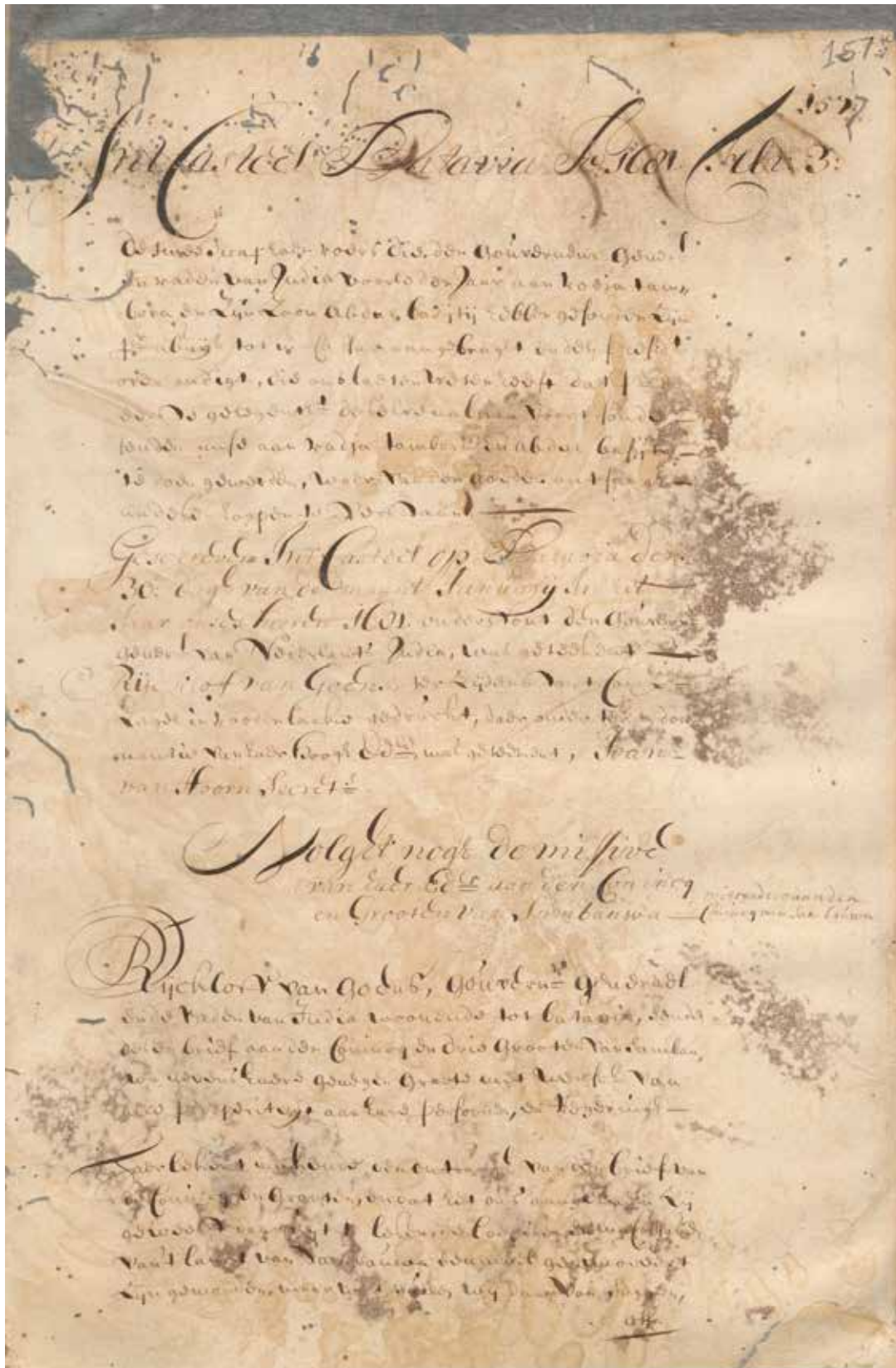
Surat terjemahan bahasa Arab Melayu ke dalam bahasa Belanda dari Sultan Sumbawa Jalaludin Muhammad Syah tahun 1729 yang berisi bahwa Sultan mengirimkan utusan, yaitu saudara laki-lakinya untuk bertemu dengan Gubernur VOC di Batavia. Dalam surat dijelaskan bahwa Sultan mengirimkan beragam hadiah kepada Gubernur VOC berupa pakaian, plakat, soppahout sebagai tanda terima kasih atas hubungan baik yang terjalin antara Kesultanan Sumbawa dengan VOC selama ini.

Sumber: ANRI, HR 2565 fol 817



Pada paragraf pertama berisi mengenai kegiatan perdagangan antara VOC dengan Raja Dompu
Pada paragraf kedua berisi mengenai ringkasan surat-menyurat antara Raja Sumbawa Mas Gowa kepada Gubernur Jenderal VOC, Joan Maetsyker terkait dengan kontrak dengan VOC bahwa Kesultanan Sumbawa akan mengadakan perdagangan dengan VOC.

Sumber: ANRI, HR 2477 fol 304

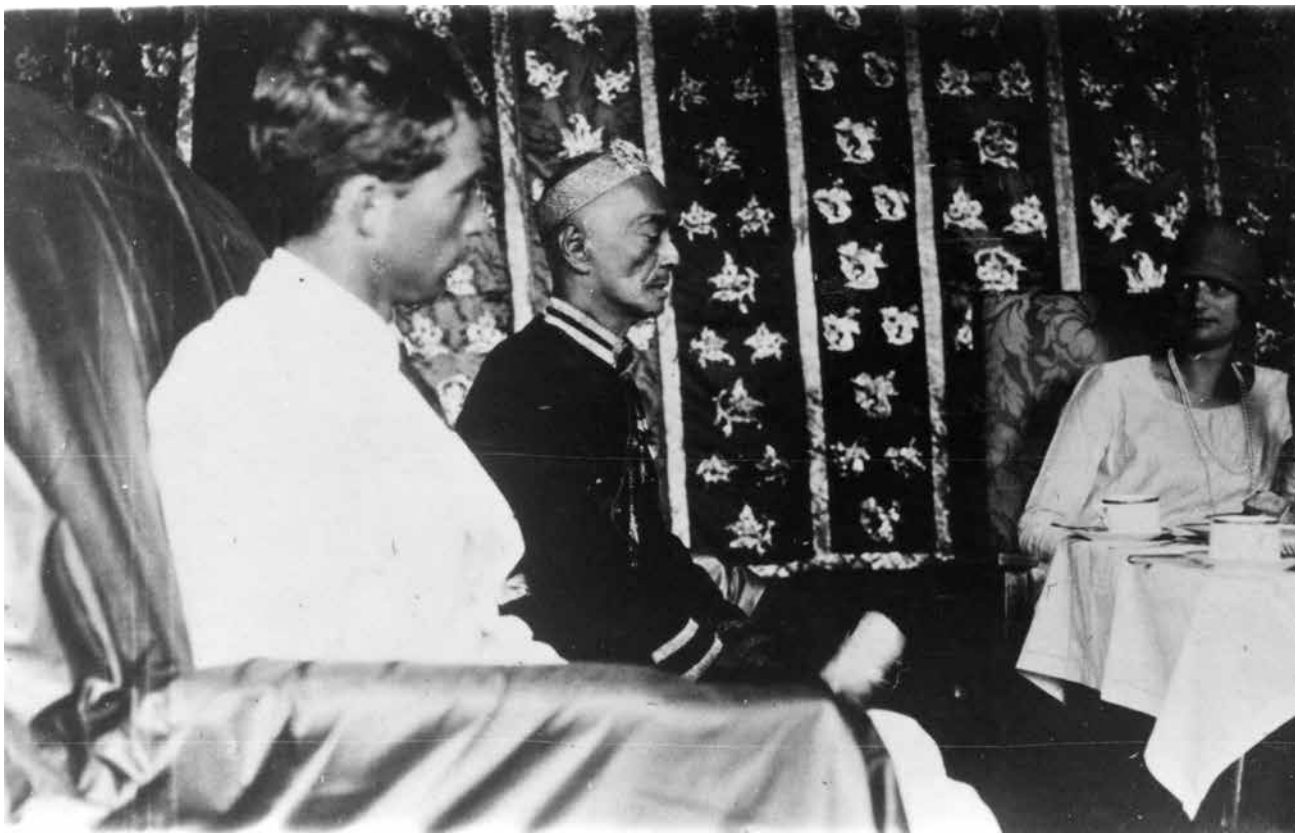


Laporan kepada Gubernur Jenderal Ricklof van Goens mengenai Kesultanan Sumbawa dan Sumbawa Besar Januari 1861. Dalam laporan tertulis bahwa VOC telah membuat kontrak kerjasama dengan Kesultanan Sumbawa dan Bima pada tahun 1669 terkait dengan perdagangan hasil bumi. Adapun kontrak ini terus berjalan sampai dengan tahun 1681 ditandai dengan pengiriman bahan-bahan hasil bumi seperti kayu sepong, kuda, dan lain-lain dengan jalur laut ke Batavia. Diceritakan juga dalam laporan bahwa Kesultanan Sumbawa berhubungan erat dengan Kerajaan Gowa di Makassar.

Sumber: ANRI, HR 2488 fol 157



Stempel Kerajaan Sumbawa
pada masa pemerintahan Sultan
Amaroellah, Tahun 1846, 4 Mei 1851.
Sumber: ANRI, BT 4 Mei 1851, No.15



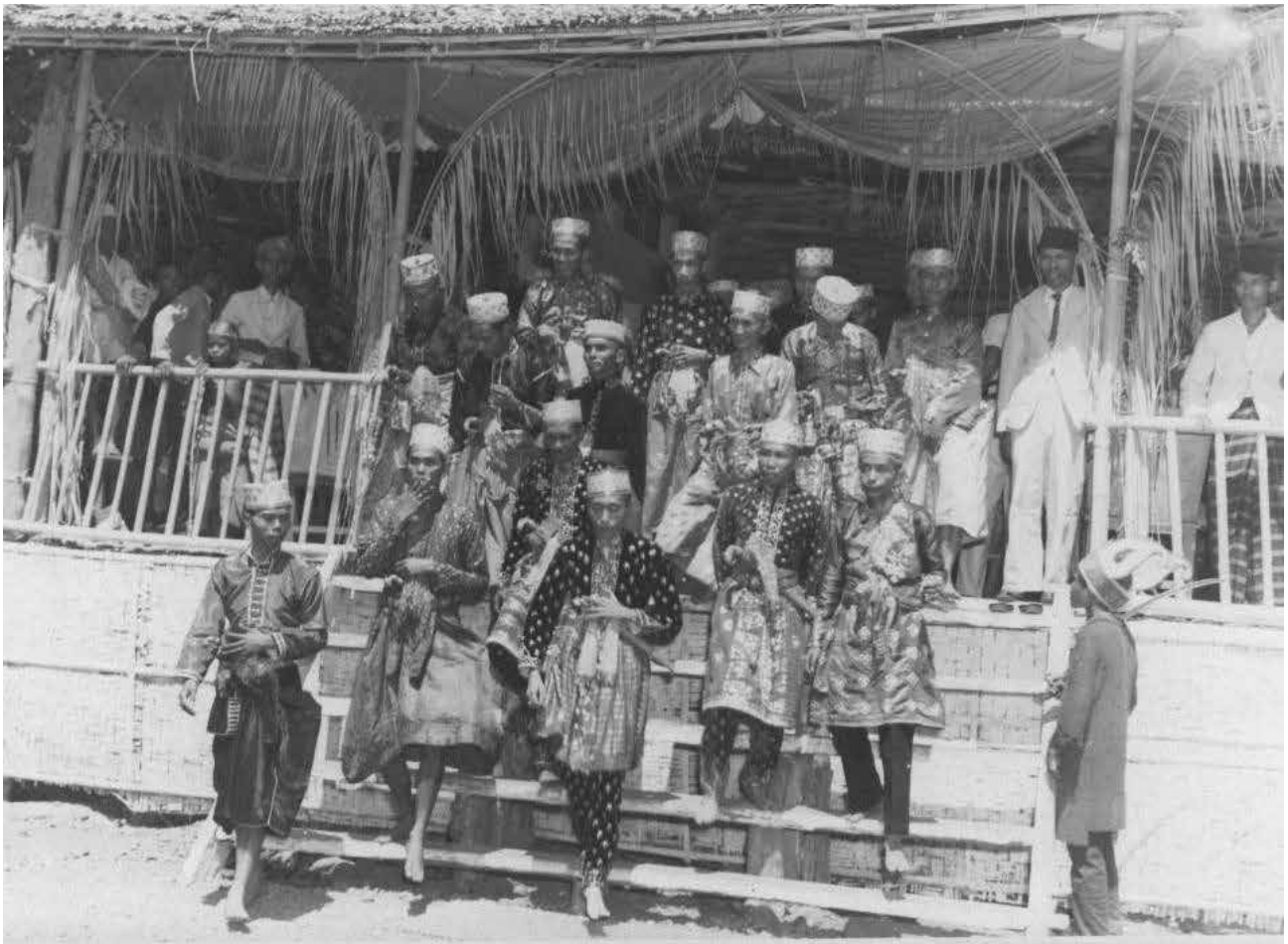
Pangeran Kroonsprins (calon pengganti raja) Leopold dan Putri Astrid dari Belgia berkunjung ke Sultan Sumbawa Muhammad Djalaluddinsyah III, Nusa Tenggara Barat, 1928.

Sumber: ANRI, KIT Nusa Tenggara No. 333/066



Sultan Muhammad Kaharuddin III diangkat sebagai Sultan Sumbawa pada tahun 1931 hingga 1958. Sebagai Sultan terpelajar Muhammad Kaharuddin III menata sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Pergolakan politik sebelum dan sesudah Proklamasi Tahun 1945 membutuhkan peran besar seorang Sultan Muhammad Kaharuddin III, ketika Negara Indonesia Timur (NIT) terbentuk, beliau dipercayakan sebagai Ketua Parlemen. Dan ketika Pemerintahan Dewan Raja – Raja beliau sebagai anggota, sedangkan pada Pemerintahan Swapraja dan Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa, beliau dipercayakan menjadi kepala pemerintahan dan kepala daerah, sampai dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa.

Sumber: ANRI, RVD NTT No. 332



Peringatan 15 tahun pengangkatan
Sultan Sumbawa, [1947]

Sumber: ANRI, RVD No.A 1540/47



Suasana peringatan 15 tahun pemerintahan Sultan Sumbawa, Tampak Sultan Kaharoeddin, permaisuri serta pangeran dan puteri, 8-14 Mei 1947

Sumber: ANRI, RVD NTT No. 333





Sultan Sumbawa dan pangeran berpakaian adat saat ulang tahun pemerintah yang ke-15, 1947.

Sumber: ANRI, RVD NTT No. 328



Permaisuri dan putri berpakaian adat saat ulang tahun pemerintah yang ke-15, 1947.
Sumber: ANRI, RVD NTT No. 327



Anak- anak dan ibu-ibu berpakaian adat saat menghadiri peringatan pemerintah 15 tahun Sultan Sumbawa, 1947.

Sumber: ANRI, RVD NTT No. 330



Sultan Sumbawa bersama permaisuri dengan tamunya saat peringatan 15 tahun pemerintahan Sultan Sumawa, 1947
Sumber: ANRI, RVD NTT No. 335

DAERAH PULAU SUMBAWA.
 Sumbawa-Besar, 13 April 1950.
 No. 2226/PS.
 Lampiran: 1 + 1.
 Pokok: Pernyataan (Statement) Bersama dari Swapradja2 Bima, Sumbawa dan Dompu untuk menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia.--

*Ummurkay,
 Sebikan juga, empak.
 Buat Kopy Segala, 14 April 1950*

Bersama ini dengan segala hormat disampaikan:
 satu lembar " PERNJATAAN (STATEMENT) BERSAMA DARI PEMERINTAH SWAPRADJA2 BIMA, SUMBAWA DAN DOMPU ", yang isinya menyetujui penggabungan ketiga daerah Swapradja ini kedalam Republik Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan disertai pula satu lembar salinan dari MA'LUMAT PEMERINTAH SWAPRADJA BIMA tertanggal 22 November 1945 (sebagai lampiran dari " Pernyataan (Statement) tersebut),
 untuk ma'lum dan diwujudkan.--

K e h a d a p a n : A.n. Kepala Daerah Pulau Sumbawa:
 Datu Ranga,
 (Abdulmadjid).

1. P.J.M. Presiden R.I.S. di Djakarta,
2. P.J.M. Acting-Presiden R.I. di Djokjakarta,
3. P.J.M. Presiden N.I.T. di Makassar,
4. P.J.M. Perdana Menteri R.I.S. di Djakarta,
5. P.J.M. Perdana Menteri R.I. di Djokjakarta,
6. P.J.M. Perdana Menteri N.I.T. di Makassar,
7. P.J.M. Menteri Dalam Negeri R.I.S. di Djakarta,
8. P.J.M. Menteri Dalam Negeri R.I. di Djokjakarta,
9. P.J.M. Menteri Dalam Negeri N.I.T. di Makassar.

 TEMBUSAN (dengan disertai lampiran) dikirim kepadanya:
 1. P.J.U. Ketua Parlemen R.I.S. di Djakarta,
 2. P.J.U. Ketua Parlemen R.I. di Djokjakarta,
 3. P.J.U. Ketua Parlemen N.I.T. di Makassar,
 4. P.J.U. Ketua Senat R.I.S. di Djakarta,
 5. P.J.U. Ketua Senat N.I.T. di Makassar,
 6. P.T.Jth. Kommissaris Negara Selatan (N.I.T.) di Singaradja,
 untuk ma'lum dan seperlunya.--

KABINET PRESIDEN
 AGENDA No. *ibet 104/10*
 TGL. TERIMA : *11-4-50*
 BUNDEL : *125*

PERNJATAAN (STATEMENT)
 Pemerintah Swapradja2 Bima, Sumbawa dan Dompu
 Masi Partai dan Organisasi2 serta ke
 maka kami bersependapat dan bersependi
 hendak rakjat tersebut, oleh karena it
 ngan perantaraan Pemerintah Republik I
 Daerah Swapradja2 Bima, Sumbawa dan D
 Indopes ia dalam tempo yang sesingkat
 Bima tertanggal 22 November 1945 (sel
 Dompu, 11
 Pemerintah Swapradja Sumbawa, Pemerintah
 Datu Ranga, Sultar
 ldt
 (Abd. Madjid) (H.T.81

Surat Pernyataan Swapraja Bima, Sumbawa dan Dompu untuk menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia, 13 April 1950. Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS No.168

STATEMENT) BERSAMA.

ma, Sumbawa dan Dompu, setelah memperhatikan
rta kehendak rakyat Daerah Pulau Sumbawa,
sependirian dengan tuntutan Mosi2 dan ke-
rens itu kami mendesak dengan sungguh2 de-
ublik Indonesia Serikat, menuntut supaya
dan Dompu digabungkan kepada Republik
ingkat2nja, sesuai dengan maklumat S.Sultan
5 (sebagai jang terlampir).-

u, 11 April 1950.

intah Swapradja Dompu, Pemerintah Swapradja
Sultan Dompu, Bima,
Sultan Bima,

t. d. t.

t. d. t.

M.T. Siradjuddin) (M. Salehuddin)

SALINAN.

MA' LUMAT.

Kami, Sultan Keradjaan Bima, menjatakan dengan sepermuhja,
bahwa:

1. Pemerintahan Keradjaan Bima, adalah suatu Daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri dibela kang Pemerintahan Republik Indonesia;
2. Kami menjatakan, bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah Pemerintahan Keradjaan Bima ter letak ditangan kami dan oleh karena itu berhubung dengan suasana pada dewasa ini, maka kekuasaan2 jang sampai sekarang ini tidak ditangan kami, maka dengan sendirinja kembali ketangan kami;
3. Kami menjatakan dengan sepermuhja, bahwa perhubungan Pemerintahan dalam lingkungan Keradjaan Bima bersifat langsung dengan Pusat Negara Republik Indonesia;
4. Kami memerintahkan dan pertjaja kepada sekalian penduduk dalam seluruh Keradjaan Bima, mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami jang ternjata diatas.-

Bima, 22 November 1945.
Seri Sultan Bima,

Tdt. M. Salehuddin.

Untuk salinan jang sama bunjinja,


(Mhd. Tenzil)

RESOLUSI

... dan Demonstrasi dan Rapat Rakasas Rakjat Swapradja Bima pada tanggal
a. 2 Juli 1950 bertempat dikota Bima, dan
b. 5 Juli 1950 bertempat ditinj. Kedjondjalin(Distrik)
diikuti dan dihadiri oleh kurang lebih 100.000 orang, mengambil resolusi sebagai
berikut:

Mengetahui:

Keinginan dan tuntutan rakjat Swapradja Bima sekarang ini yang diujutakan dengan
perantaraan Demokrasasi dan Rapat Rakasas ini, antara lain supaya:

- a. Dewan Pemerintahan Swapradja Bima sekarang ini segera dibubarkan, karena bentuk dan susunannya tidak sesuai dengan bentuk dan susunan Pemerintahan menurut Hukum dan Demokrasasi.
- b. Dewan Perwakilan Rakjat Swapradja Bima yang bersifat adviserend (Penasihat) segera dibubarkan juga dan dibentuk Dewan baru yang bentuk dan susunannya sempurna serta sempurna kekuasaan perwakilan.
- c. Undang-undang No. 22 tahun 1948 segera dijalankan di daerah ini dan seluruh daerah N.I.T.
- d. Badan Persiapan K.N.I. Pulau Sumbawa yang dibentuk atas keinginan Partai dan Organisasi rakjat Pulau Sumbawa yang jumlahnya 41 buah benjaknja, diikuti ajah sebagai Badan Persiapan K.N.I. sementara yang bertugas menjempurnakan susunan Dewan Pemerintahan Swapradja dan Dewan Perwakilan Rakjat di Pulau Sumbawa.

Menimbang:

- a. bahwa keinginan dan tuntutan rakjat untuk segera membubarkan Dewan Pemerintahan dan Dewan Perwakilan rakjat Swapradja Bima.
- b. bahwa keinginan dan tuntutan rakjat supaya Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan keputusan Pemerintah peralihan N.I.T. segera dijalankan.
- c. bahwa keinginan rakjat dan tuntutan rakjat supaya Badan Persiapan K.N.I. Pulau Sumbawa diikuti ajah.

Memutuskan:

- 1. Menuntut pembubaran segera dari Dewan Pemerintahan Swapradja Bima yang bentuk dan susunannya tidak sesuai dengan Hukum dan Demokrasasi.
- 2. Menuntut supaya Dewan Perwakilan Rakjat Swapradja Bima yang bersifat adviserend, juga segera dibubarkan dan dibentuk Dewan baru yang bentuk dan susunannya sempurna serta sempurna kekuasaan perwakilan.
- 3. Mendesak Pemerintah supaya Undang-Undang No. 22 tahun 1948 segera dijalankan di daerah ini dan seluruh daerah N.I.T.
- 4. Mendesak Pemerintah supaya Badan Persiapan K.N.I. Pulau Sumbawa diikuti ajah sebagai Badan Persiapan K.N.I. sementara yang bertugas menjempurnakan susunan Dewan Pemerintahan Swapradja dan Dewan Perwakilan Rakjat di Pulau Sumbawa.

Bima, 5 Juli 1950.

M. Pengikut Demonstrasi dan Rapat Rakasas.
Penjelenggara:
Gerakan Pemuda Islam Indonesia (G.P.I.I) cabang Bima.

Ketua: M. Thaib
M. Thaib M. Sulaiman

KABINET PRESIDEN
AGENDA: 465 P. 10
TGL. TERMA: 12. 10. 1950
BUNDEL: Resolusi

Resolusi ini dikirim kepada:

- 1. P.M. Republik Presiden B.I.S. di Djakarta.
- 2. " " Acting Presiden B.I. di Djakarta.
- 3. Pemerintah B.I.S. di Djakarta.
- 4. " B.I. di Djakarta.
- 5. " N.I.T. di Makassar.
- 6. Parlemen B.I.S. di Djakarta.
- 7. " N.I.T. di Makassar.
- 8. Komite Nasional Indonesia Pusat di Djakarta.
- 9. Pemerintahan Daerah Pulau Sumbawa.
- 10. Pemerintahan Swapradja Bima, Dempo dan Sumbawa.
- 11. Dewan Perwakilan Rakjat Pulau Sumbawa, Bima, Dempo dan Sumbawa.
- 12. Badan Persiapan K.N.I. Pulau Sumbawa di Bima.
- 13. Wakil Ganda Ketjil dalam Parlemen B.I.S. dan Komite Nasional Indonesia di Djakarta dan Djakarta.
- 14. Wakil Rakjat Bima dalam Parlemen N.I.T. di Makassar.
- 15. Partai, Pers dan Radio.

SIMPAN

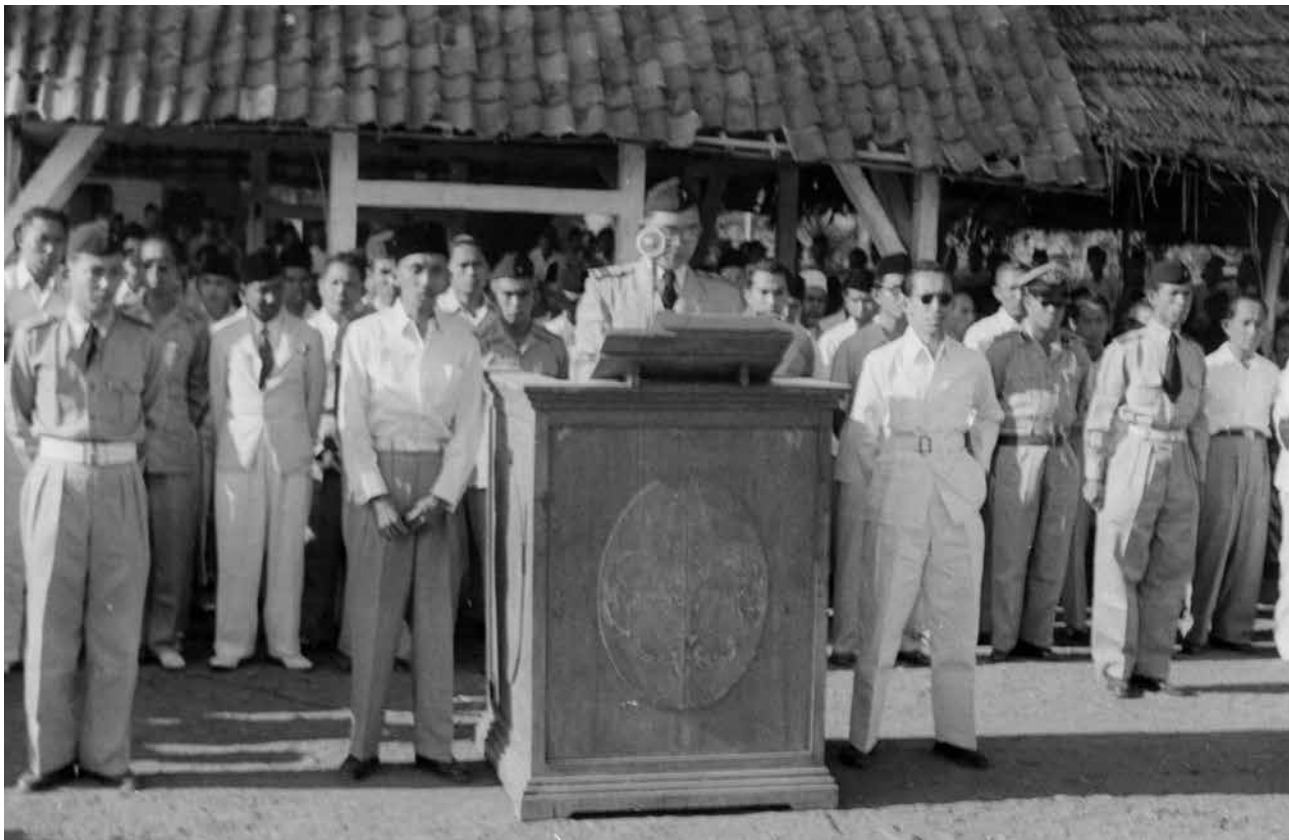
TGL: 12. 10. 1950
BUNDEL: Resolusi

Resolusi Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang merupakan tuntutan rakyat Swapraja Bima (Pulau Sumbawa) antara lain mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Swapraja Bima, 5 Juli 1950
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS No.197



Suasana upacara hari Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) ke-7 di Sumbawa Besar, 5 Oktober 1952.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1965 No. 8



Komandan sektor sedang bicara tentang sejarah APRI pada hari APRI ke-7 di Sumbawa Besar, 5 Oktober 1952.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1965 No. 6



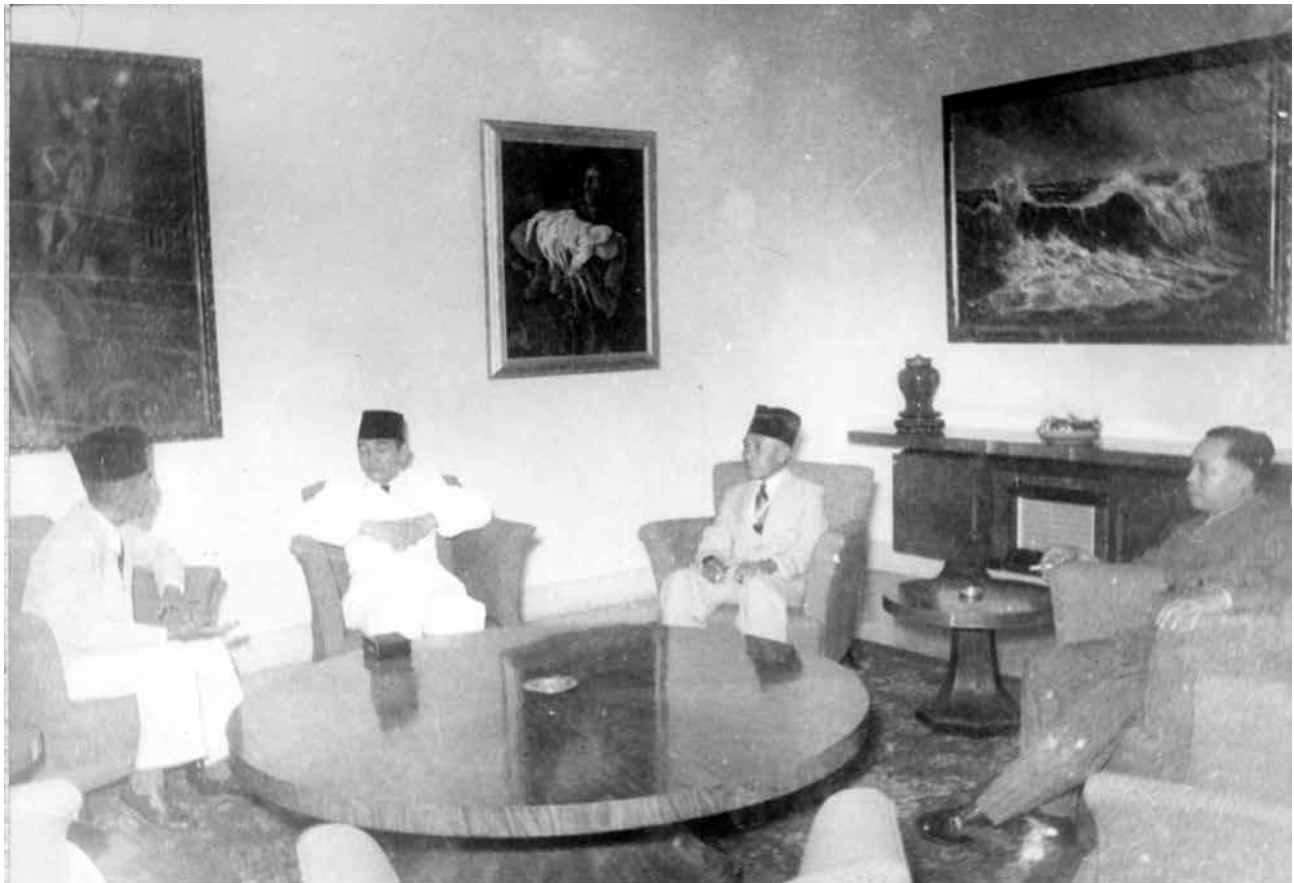
Hormat senjata untuk lagu Kebangsaan
Indonesia Raya pada hari APRI ke-7 di
Sumbawa Besar, 5 Oktober 1952.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1965 No. 7



Demonstrasi sepeda motor pada hari APRI ke-7
di Sumbawa Besar, 5 Oktober 1952.

Sumber : Kempen NTT Tahun 1950-1965 No. 9



Kunjungan Sultan Sumbawa, Sultan Bima, Sultan Dompu menemui Presiden Sukarno di Istana Merdeka dalam rangka menyatakan bergabung ke wilayah Republik Indonesia, 12 Mei 1950.

Sumber: ANRI, IPPHOS 1672



Penyambutan pejabat daerah Sumbawa atas kedatangan pasukan TNI di Sumbawa, tampak pimpinan pasukan TNI bersalaman dengan pejabat daerah Sumbawa, 6 Juni 1950.
IPPHOS 1714



Suasana penyambutan oleh rakyat Sumbawa pada saat pasukan TNI mendarat di Sumbawa, 6 Juni 1950.
Sumber: ANRI, IPPHOS 1713

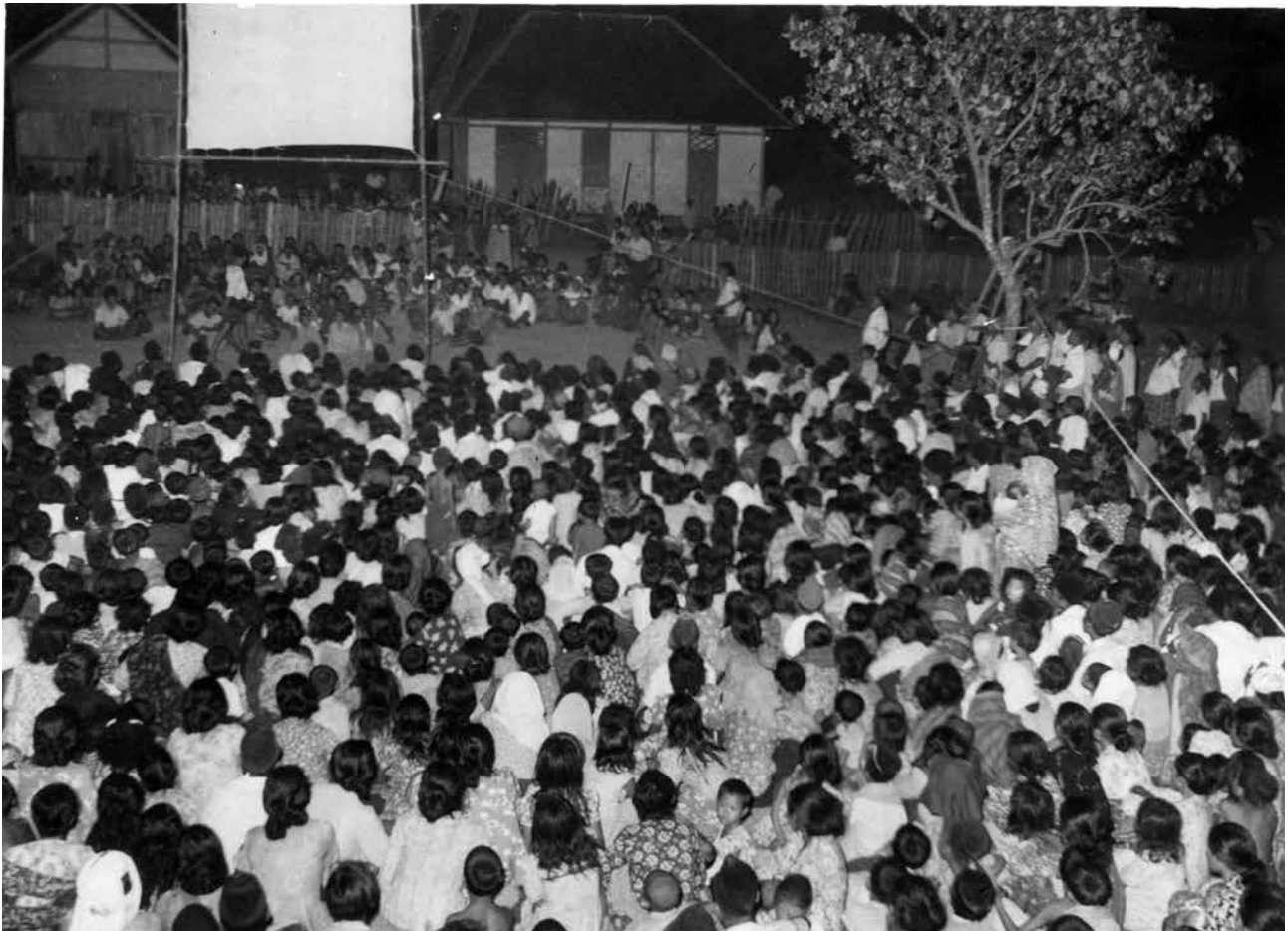




Asinullah (Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Sunda Kecil) berkunjung ke Sumbawa, Juni 1952.
Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 267

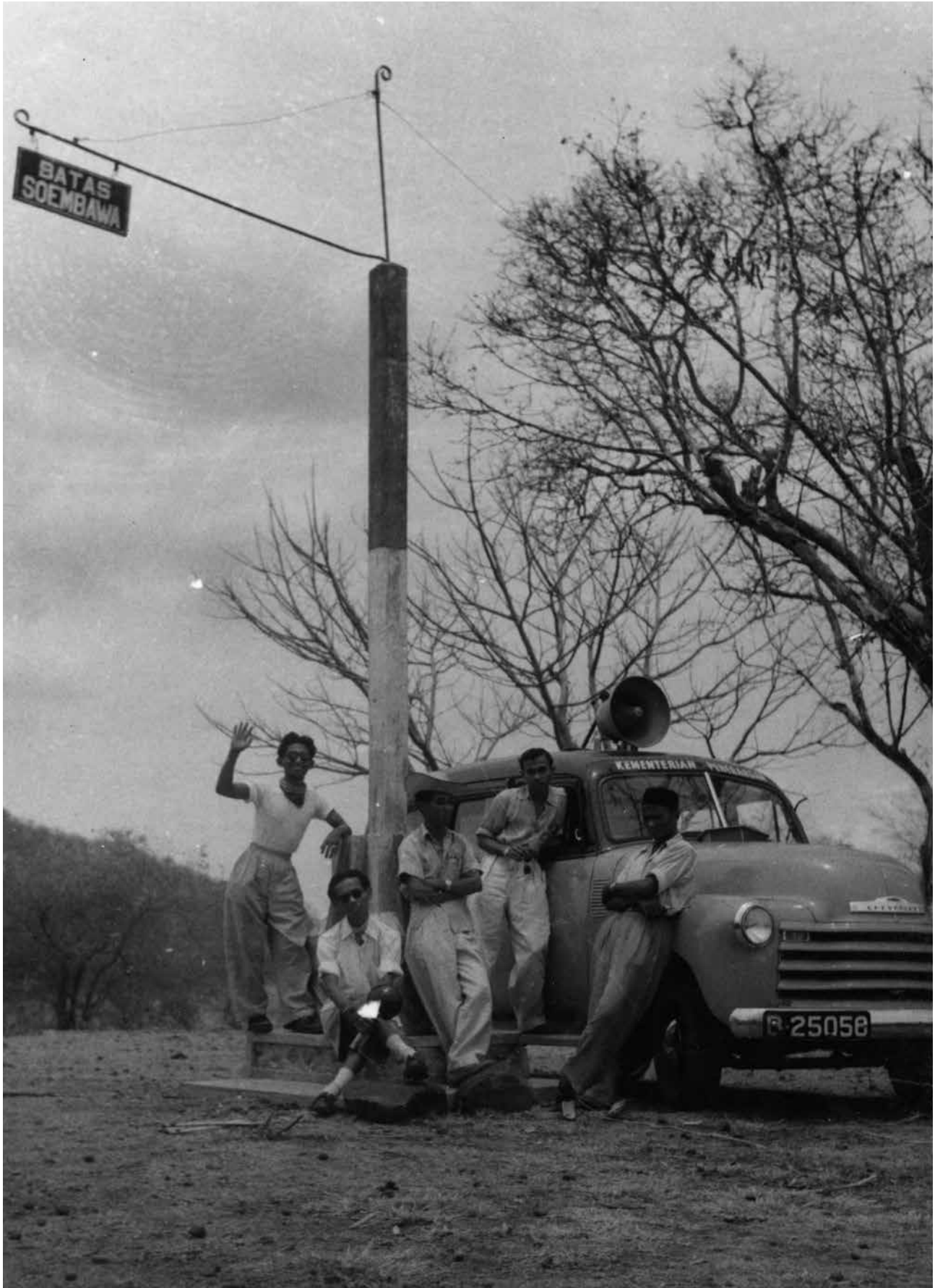


Jeep yang dinaiki Asinullah (Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Sunda Kecil) melewati sungai di Sumbawa, Juni 1952.
Sumber : Anri. Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 268



Pertunjukan Film pada eksposisi keliling
dari Japenda di Distrik Empang (Swapraja
Sumbawa) di Sumbawa, Januari 1953.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 273



Rombongan dari mobil unit pada eksposisi keliling Kementerian Penerangan tiba pada perbatasan di Sumbawa, Januari 1953.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 274



Rakyat Ampang mengerumuni mobil Penerangan untuk mendengarkan segala penerangan di Sumbawa, 30 Agustus 1952.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 570





Ketua DPS/DPR daerah Dompu bersama staf
berfoto bersama pada stand pameran Japenda
di Sumbawa, Januari 1953.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 275



Berfoto bersama para pegawai Japen di Sumbawa,
27 Oktober 1954.

Sumber: Anri , Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 301



Seorang pegawai Japen sedang menggunakan
tape recorder di Sumbawa, 27 Oktober 1954.
Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 302



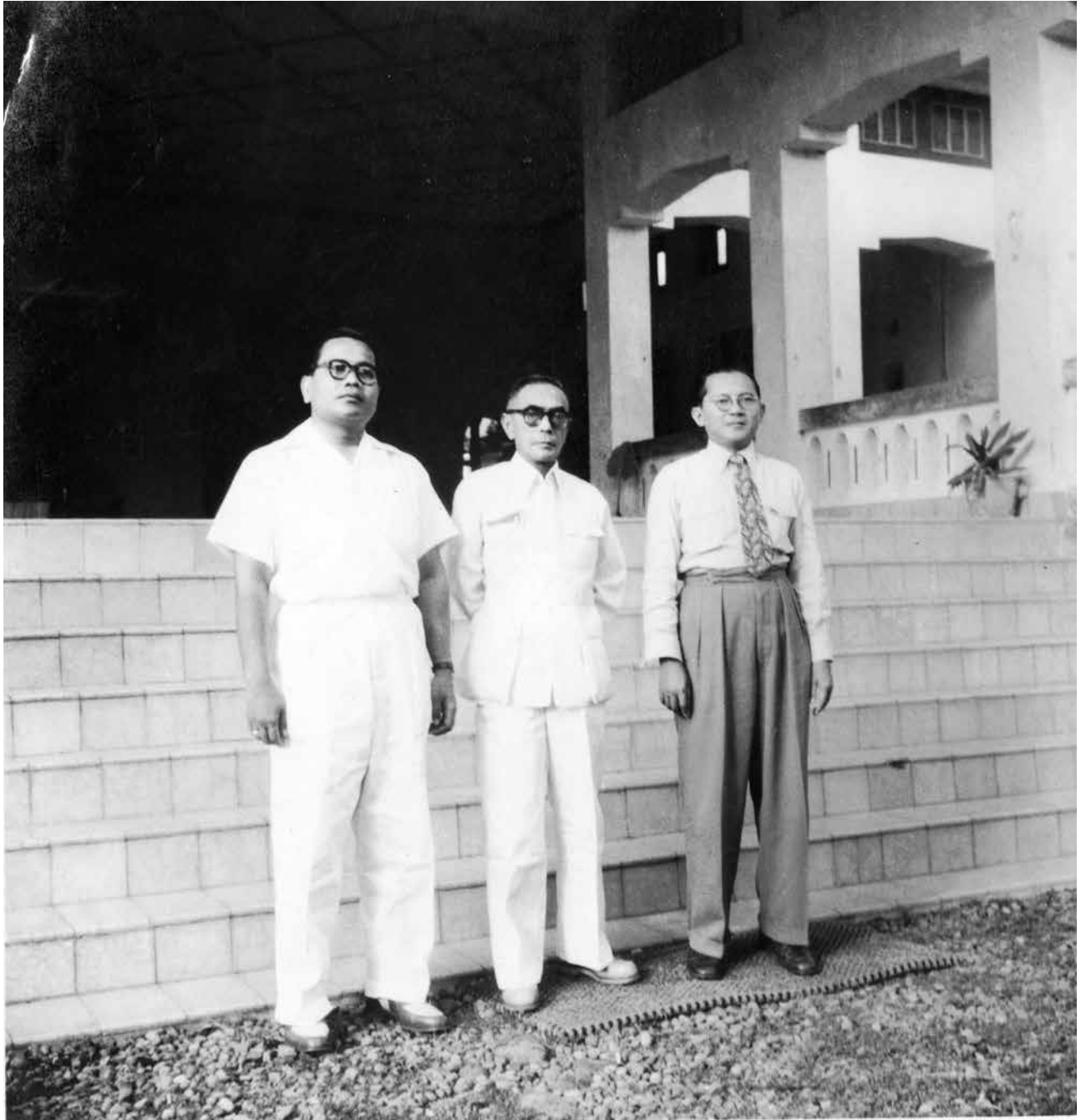
Konferensi Dinas mendapat kunjungan dari Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Sunda Kecil di Sumbawa, 30 Agustus 1952.

Sumber: Anri. KEMPEN NTT Tahun 1950-1963 No. 565



Sambutan Kepala Japen Provinsi Sunda Kecil dalam Konferensi Dinas Penerangan di Sumbawa, 30 Agustus 1952.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 566



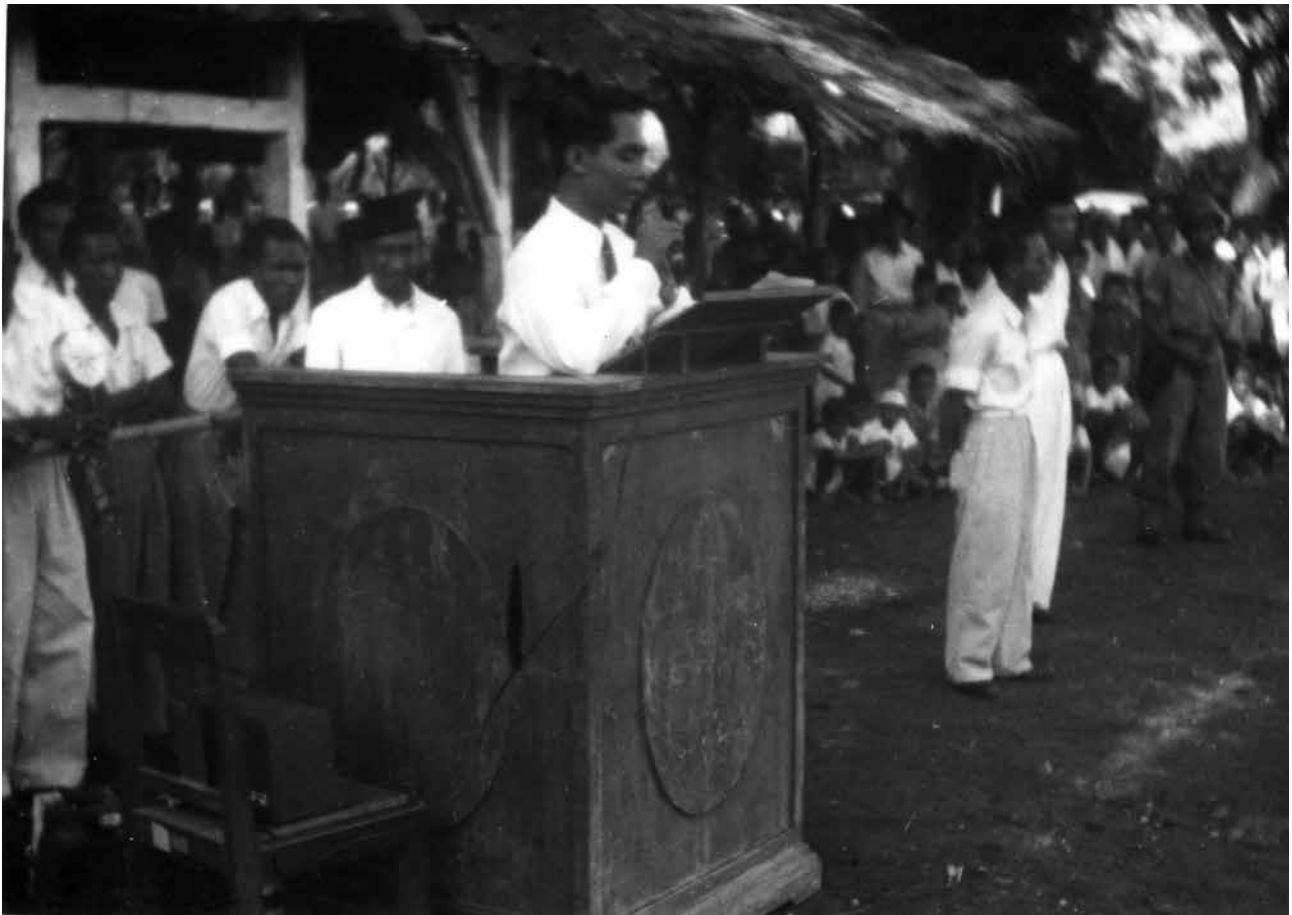
Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berfoto di Sumbawa , 5 Juni 1955.

Sumber : Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1580



Gubernur dan rombongan meninjau usaha pembangunan di daerah Sumbawa , 30 Agustus - 1 September 1952.

Sumber: ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1622



Sambutan Dewan Pemerintah Daerah pulau Sumbawa pada perayaan hari Pahlawan di Sumbawa, 10 November 1952.

Sumber: ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 2204



Masyarakat dengan membawa foto Ruslan Abdulgani dan Bung Tomo hadir mengikuti Peringatan Hari Pahlawan di Sumbawa, 10 November 1952.

Sumber: ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 2205



Presiden Sukarno tiba disambut masyarakat di Sumbawa, 30 Oktober 1950 .

Sumber : Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 610



Presiden Sukarno setibanya di lapangan terbang Sumbawa , tampak tengah Sultan Kaharuddin, 30 Oktober 1950.

Sumber: Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 615



Para pejabat daerah yang menyambut kedatangan
Presiden Sukarno di Sumbawa, 30 Oktober 1950.
Sumber : Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 617





Suasana rapat umum di Sumbawa dengan spanduk-spanduk yang dibawa masyarakat, 30 Oktober 1950 .

Sumber : Anri : *Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 609*





Seorang wanita mempersembahkan hadiah kepada Presiden Sukarno di Sumbawa Besar. 30 Oktober 1950.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 580



Presiden Sukarno menerima persembahan hadiah dari wakil rakyat Flores di Sumbawa Besar, 30 Oktober 1950

Sumber: ANRI, KEMPEN NTT 581



Presiden Sukarno menerima tamu pada acara resepsi di Sumbawa Besar 30 Oktober 1950.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 582



Pidato Presiden Sukarno pada acara resepsi di Sumbawa, 30 Oktober 1950.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 596



Presiden Sukarno menerima pemberian kuda di Sumbawa, 30 Oktober 1950.

Sumber : Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 593

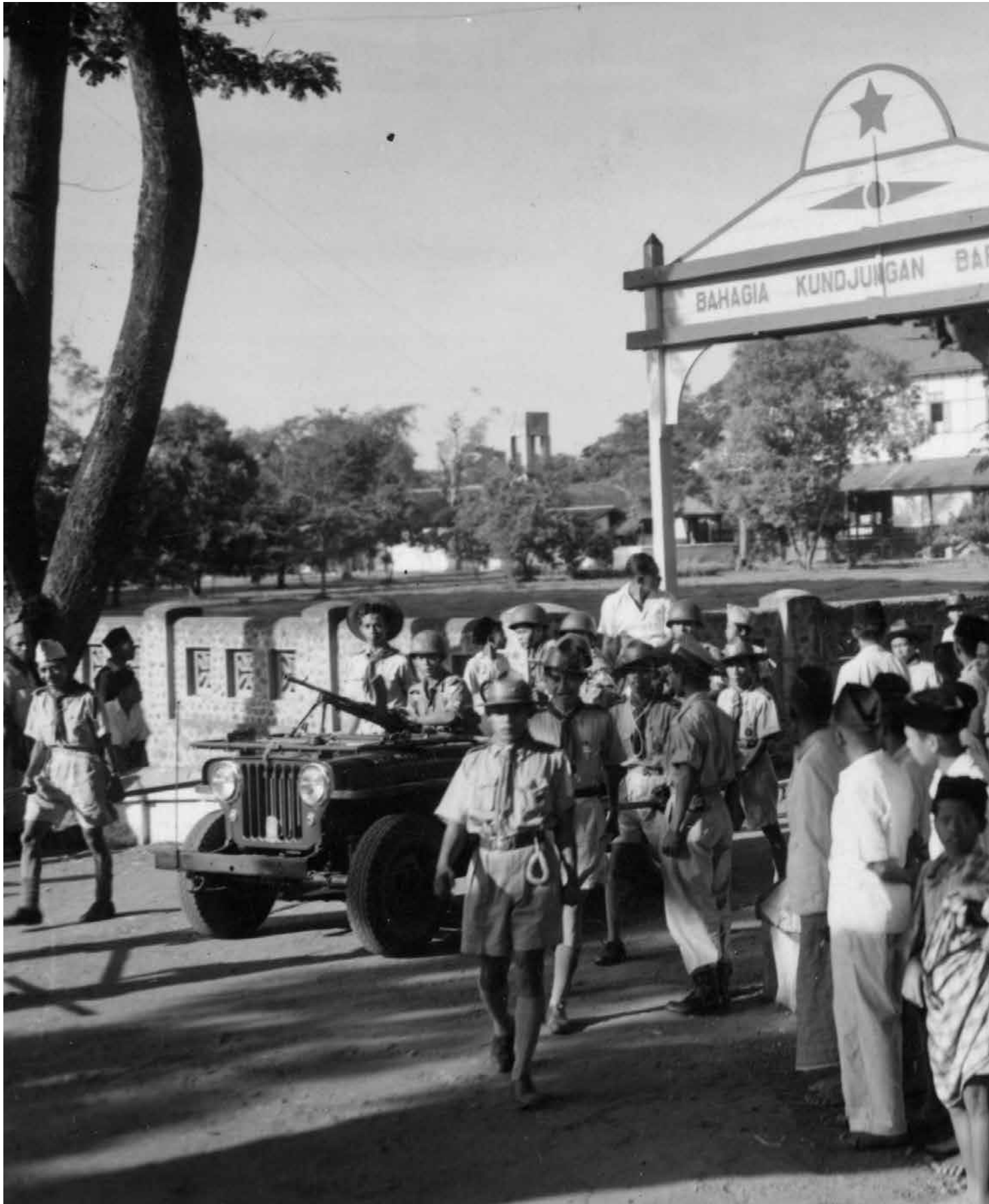




Presiden Sukarno menerima persembahan beberapa Rusa di Sumbawa Besar, 30 Oktober 1950.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 597





Presiden Sukarno diantar masyarakat
meninggalkan Sumbawa, 31 Oktober 1950.
Sumber : Anri: Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 578





Presiden Bersalaman akan meninggalkan istana
di Sumbawa, 31 Oktober 1950.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 584



Presiden Sukarno meninggalkan Sumbawa yang
dielu-elukan masyarakat, 31 Oktober 1950
Sumber : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 594



Wakil Presiden Moh. Hatta di mobil Jeep
disambut rakyat sepanjang jalan yang dilalui di
Sumbawa Besar, 25 April 1952.

Sumber; Anri . Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1107





Wakil Presiden Moh. Hatta dalam acara pertemuan dengan pamong praja dan tentara di Sumbawa Besar, 25 April 1952.

Sumber: Anri : Kempen NTT Tagun 1950-1963 No. 1184



Wakil Presiden Moh. Hatta dalam acara pertemuan dengan pamong praja dan tentara di Sumbawa Besar, 25 April 1952.

Sumber: Anri : Kempen NTT Tagun 1950-1963 No. 1187



Perpisahan Wakil Presiden Moh. Hatta di lapangan terbang Sumbawa Besar, 26 April 1952.
Sumber : Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1212



Menteri Penerangan Dr. F.L . Tobing disambut Kepala Daerah Sumbawa saat tiba di lapangan terbang Sumbawa, 5 Juni 1955.

Sumber: Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1550



Pelayan-pelayan wanita Istana Sumbawa Besar,
30 Oktober 1950.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 627



Presiden Sukarno menerima oleh-oleh dari rakyat Sumbawa Besar yang disampaikan oleh seorang wanita, 3 November 1957.

Sumber : Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 932



Sekelompok masyarakat menyambut Presiden Sukarno secara adat di Sumbawa Besar, 3 November 1957.

Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 933

15¹ T 1

TELEGRAM

*Telak dire...
revisi oleh...
Pamungkas
II Bilan...
na dire...
ma m...
31/5
25/5*

Pembjelasan dinas, <i>Dienstgegevens,</i>	Tempat pengirim, <i>Plaats v. afzending,</i>	Nomor, <i>Nummer,</i>	Banjaknja perkataan, <i>Woordental,</i>	Tanggal <i>Datum,</i>	Jajarat djabatan <i>Dienstaanwijzingen</i>
bd 131 s djakarta 2068 77/70 19 1234					
=s= ACTING SEKNEG JOGJAKARTA				No. Agenda Tanggal Bundel	268 2-5-1950 Kawat.

no 87-k/50 ttk saja telah mengirim kawat kepada sp pakualat sbblttkdua no 76-k/50 ttk hari senin tg 22 bi akan berangkat ke jogja untuk menghadap pjm acting pres suatu perutusan dari dewan radjaradja dan dewan pulau dari sumbawa terdiri dari sembilan orang ttk mereka akan tinggal djogja sampai tg 25 ttk mohon disediakan penginepan dan pendjemputan bagi mereka ttk mr ak pringgodigdo sendz ttkhabis =

[Signature] dirkabpres +

so 19-5-50 1624

Diterima di <i>Ontvangen te</i>	Dikawatkan ke <i>Overgezond naar</i>
JOGJAKARTA	
19 pk Waktu Djawa	19 pk Waktu Djawa
<i>oleh door</i>	<i>oleh door</i>

S.N. 1949-027-22 X 15-0.000.000-65 BT-4611-49

Surat kawat kepada Sekretariat Negara Yogyakarta tanggal 19 Mei 1950, tentang Kunjungan dewan raja-raja dan dewan dari Pulau Sumbawa.
Sumber: Anri, Setneg RI Yogyakarta No. 20

SEKRETARIAT DAERAH ISTIMEWA

SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH
ISTIMEWA JOGJAKARTA.

T U R U T A N

Jogjakarta, 26 - 5 - 1950

Ag. 2726/1/5
Hal: biaya penginapan Radja
Bone dan Lawa.
Lampiran: 1.

Kepada
Jth. Sdr. Pengurus Hotel Merdeka
Jogjakarta.

Berana ini kami sampaikan surat turunan dari Kementerian
Perencanaan ttg. 10-6-1950 No. 700/HM/15 tentang biaya penginapan
Tamu2 Radja Bone dan Lawa.

Selanjutnya kami harap supaya pembayituan biaya penginapan
untuk tamu2 tersebut diatas disampaikan kepada Sekretariat Perda-
raha Menteri atau Sekretariat Daerah, sebagai dimaksud dalam surat
tersebut diatas.
Harap menjadi maklumi adanja.

Sekretaris Pemerintah Daerah
Istimewa Jogjakarta.
ttd. tidak ditandatangani

SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH
ISTIMEWA JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 3-5-1950

No: 1937/1/5
Hal: Ongkos penginapan para
Radja Bone dan Lawa
(Sulawesi)

Kepada
Jth. Sdr. Pengurus Hotel "MERDEKA"
Bg. Administrasi
Jogjakarta.

Merdeka,

Mendjawab surat Sdr. ttg. 22-4-1950 No. 38/HM/Tu/50, soal
ongkos penginapan para Radja Bone dan Lawa, dengan ini kami ber-
ri tanyakan, apakah soal tersebut sedang kami rundingkan dengan
Kementerian Keuangan R.I.

Bila-mana sudah ada ketetapan, saudara akan kami beri
jawab.

Kemudian, harap menjadi maklumi adanja.

s.a. Sekretaris Pemerintah
Daerah Istimewa Jogjakarta
ttd. tidak ditandatangani

Hotel Merdeka

44: 63 / 11.04.11 / 4 / 30
Hal: ongkos penginapan
Radja Bone dan Lawa
(Sulawesi)

Merdeka!
Dengan ini kami
perhatikan ini, lebih dari
sebelum dan yang baru
Radja Bone dan Lawa
Tuan dijawab, siap
tersebut.

Oleh karena itu
sudahlah apakah bisa
seungguhnya dan
karena dijawab dan
diambil pramban
ini.

Kemudian
dan sesudahnya,
dan dengan pram-
bahan yang me-

Surat-surat dari Instansi-instansi kepada Sekretariat
Negara tanggal 11 Mei - 26 Juni 1950 tentang kunjungan
raja-raja dari Sulawesi dan Sumbawa.

Sumber: Anri, Setneg RI Yogyakarta No. 20

Turunan

Kepada:
Jth. Sekretaris Negara P.I.
di Yogyakarta
Yogyakarta, 26 Juni 1950

sempian
dan kurva
wau)

kami menulis kepada Tuan, bahwa sam-
bilid dari 2½ bulan benjang menungga-mungga
kawatidit, perihal ongkos penginapan para
an kami sebesar f. 1.197,50. Adanya keten-
siapahist yang akan menibulnya ongkos

ena ita, kami menduak kepada Tuan,
h kiranya Tuan memperhatikan dengan
dan menjilcesikan/membu ongkos? Tadi
lah uang itu besar artinya untuk melan-
mbangunan perusahaan kami pada detik

lian atas kebijaksanaan Tuan sebelum
haja, kami utapkan bayak Teruna haist
-penuk pengharapan menungga dja-
ng memnakan, adanya

Hormat kami:
Hotel Mandika - Yogyakarta
Kepala Tata Usaha
Hid. Soegiono.

T U R U N A N

Jogyakarta, 10-6-1950

KEMENTERIAN PERBURUHAN R.I.
Dj1. Ngabean No. 11
Jogyakarta. tel. 24-557

Kepada Jth.
Sdr. Sekretaris Pemerintah
Racrah Istiqlah Yogyakarta
di Jogyakarta.

No: 700/111/15
Hal: Biaya penginapan utb. Tamu2.
Raja Bone dan Luwu.

M e r e k a !
Menarik surat nomor tg. 6-6-1950 No. 2511/1/b tentang b
biaya penginapan tamu2 Raja Bone dan Luwu, dengan lai diberit-
takan, bahwa Tamu2 tersebut adalah Tamu Negara, maka oleh kaw
renanja biaya penginapan untuk para Tamu itu hendaknya diampai
kan langsung kepada Sekretaris Perdana Menteri atau Sekretaris
riat Negara.

bertia untuk mendjadian tahu adanya.

Jang mengambil turunan:

KEMENTERIAN PERBURUHAN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian umum
Sekel Padiara,
ttd.
SARI HADIWINOTO

Turunan

Hotel "Mandika"

Nomor Wf 20-23-30-40-

42-43-45.

Dombongan Raja Bone

20 Tang tg. 4-4-50. Pergi tg. 7-4-50.

Penginapan 3 hari @ f200,- = f604,-

Restoran makanan 2xtra " 177,30

Service (tips) 5% " 52,05

Pajak pembangunan 6% " 104,15

Jumlah f1197,50

Keagamaan

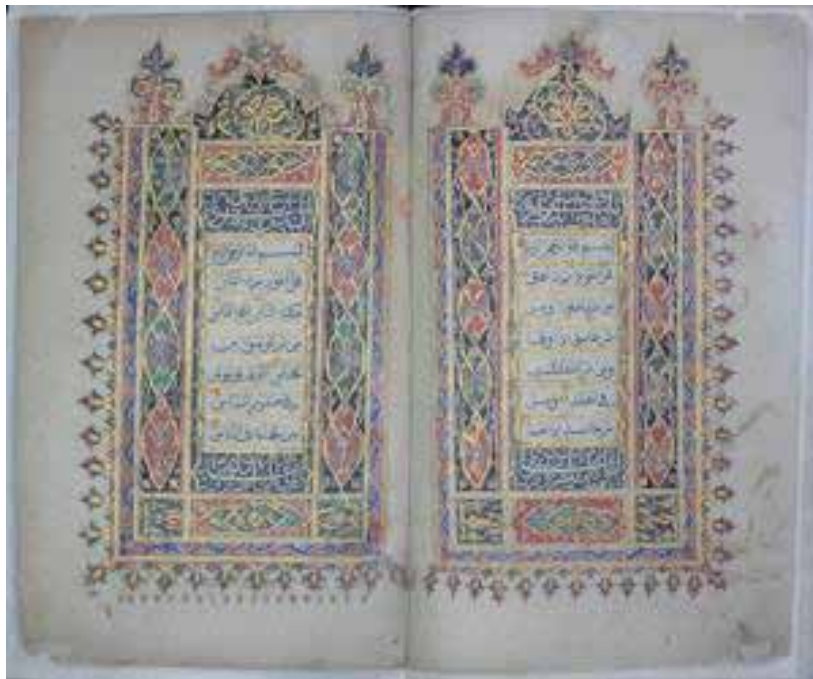


Pada Bab Keagamaan terdapat 8 arsip yang menggambarkan Musof Al'quran Kuno, Masjid Kasultanan Sumbawa dan Rombongan jamaah haji Pulau Sumbawa

Mayoritas penduduk Sumbawa beragama Islam. Persebaran agama Islam sendiri sangat dipegaruhi oleh kedatangan para pedagang Islam maupun pendatang yang singgah di wilayah utara Pulau Sumbawa pada awal abad ke-16. Islam mulai masuk ke dalam Kerajaan Sumbawa melalui Kerajaan Gowa yang telah menyebarkan pengaruh keislamannya ke pemuka Kesultanan Sumbawa.



Mushaf Al Qur'an Kuno Tulis Tangan di sumbawa disalin tahun 1785 oleh Muhammad bin Abdullah al-Jawi al-Bugisi pada masa Sultan Harun ar-Rasyid
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Musof Alqur'an tulisan tangan di sumbawa disalin oleh Abdurrahman bin Ayub bin Abdul Baqi as-Sumbawi, selesai pada 1838.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Musof Alqur'an tulis tangan di Sumbawa disalin oleh
Abdurrahman bin al-Marhum Musa as-Sumbawi pada 1864.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Rombongan Jamaah haji Pulau Sumbawa (Bima, Dompu, Sumbawa) saat mengangkut barang mereka di dek kapal Rochussen milik Belanda saat perjalanan pulang dari Mekkah, 1915.

Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa

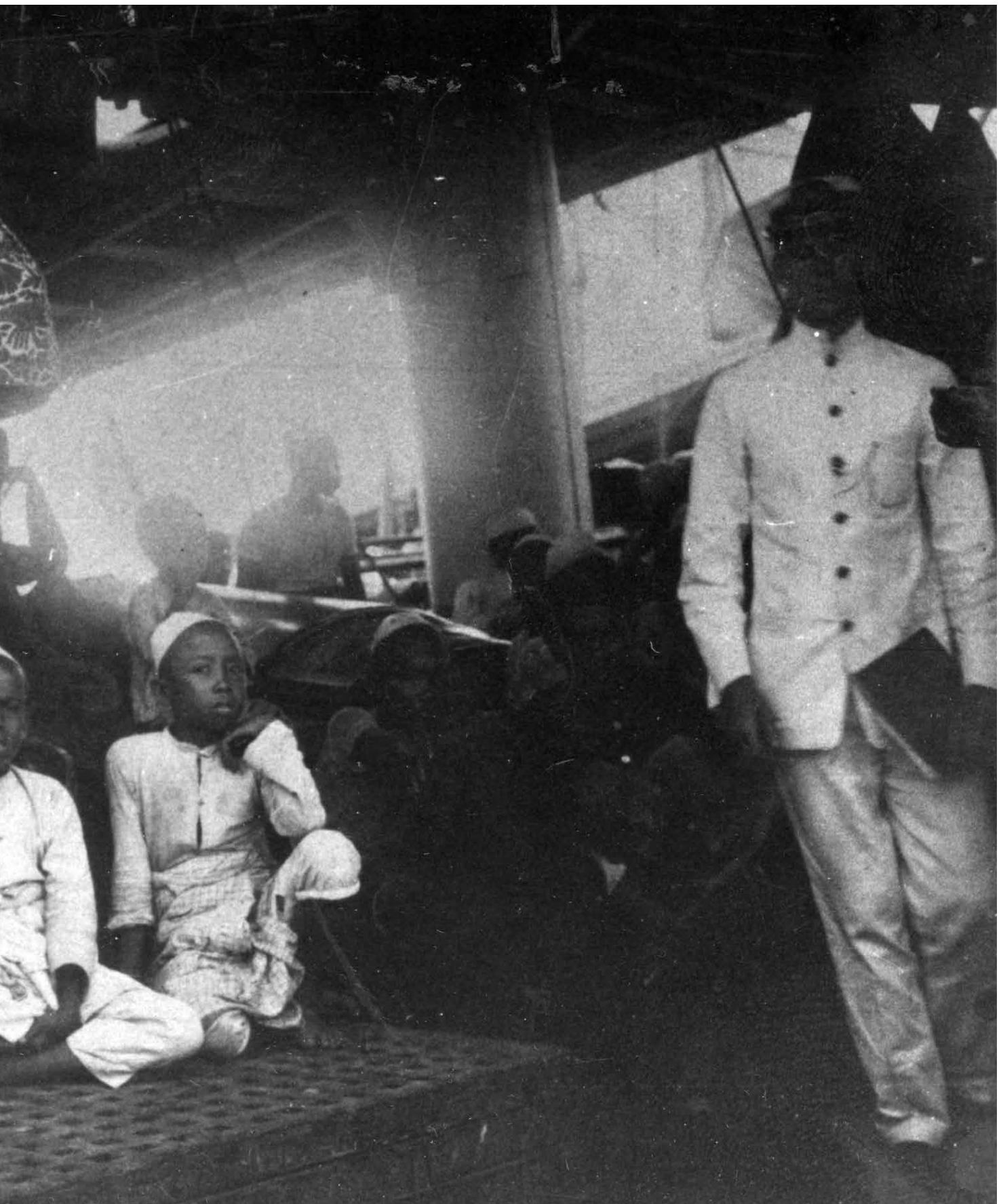


Masjid Kesultanan Sumbawa, tampak masyarakat telah selesai melaksanakan ibadah, 1950.

Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



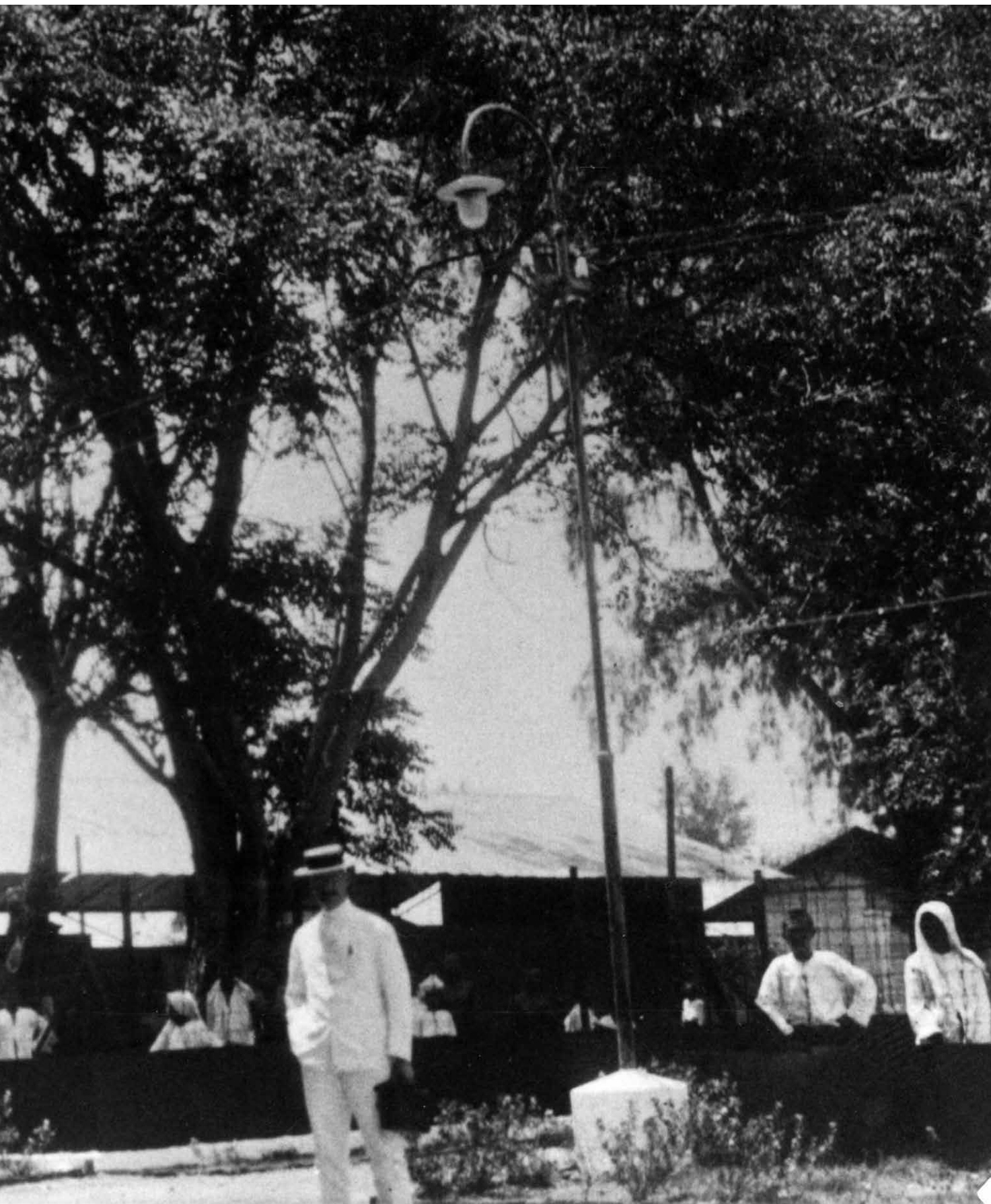
Anak-anak Jamaah haji Pulau Sumbawa (Bima, Dompu, Sumbawa) berada di dek Kapal Rochussen milik Belanda saat perjalanan pulang dari Mekkah, 1915
Sumber : ANRI, KIT Nusa Tenggara No. 110/86





Jemaah Haji dari Sumbawa di karantina, Nusa Tenggara Barat, [1930].

Sumber : Anri : KIT Nusa Tenggara No. 118/042

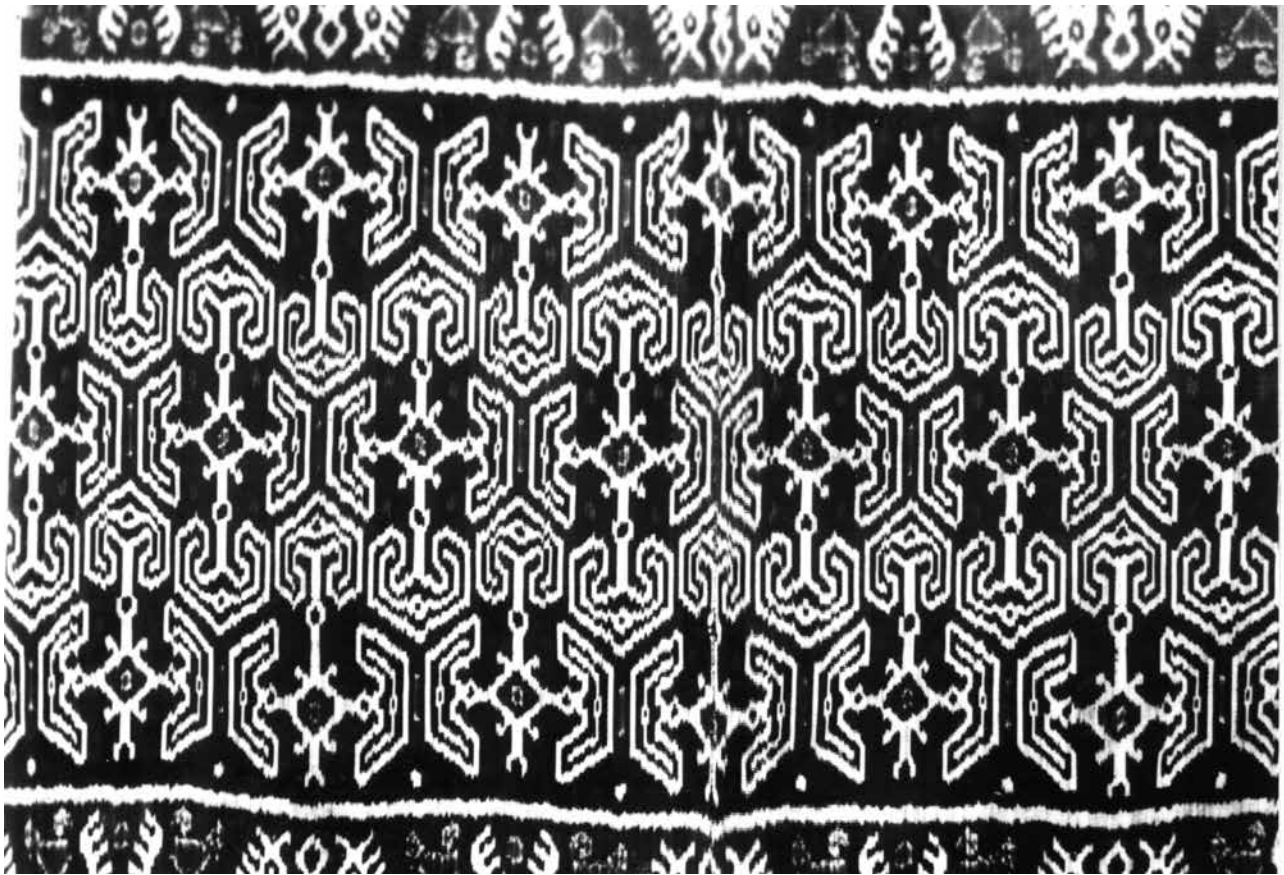


Sosial Budaya



Pada Bab Sosial dan budaya terdapat 14 arsip yang menggambarkan keberagaman budaya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari suku adat, Tarian adat, dan kehidupan bermasyarakat.

Suku Sumbawa atau Samawa adalah suku bangsa yang mendiami wilayah bagian barat dan tengah pulau Sumbawa (meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa barat), Suku Sumbawa sendiri, selama beberapa abad ini mengalami percampuran dengan etnis pendatang seperti etnis dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Cina dan Arab.



Kain katun tenun ikat , Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat, [1930].
Sumber: Anri, KIT 0731-004



Laki-laki suku Sumbawa berpakaian
adat di Sumbawa, 26 Oktober 1954.
*Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-
1963 No. 456*



Empat wanita suku Sumbawa berpakaian adat di
depan rumahnya di Sumbawa, 26 Oktober 1954.

Sumber: Anri. Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 457



Laki-laki suku Sumbawa berpakaian adat di Sumbawa, 26 Oktober 1954.

Sumber : Anri. Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 458



Pertunjukan pencak silat oleh pemuda Bungin di Sumbawa, 26 Oktober 1954.

Sumber : Anri. Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 521





Pertunjukan tarian adat di
Sumbawa, 28 Oktober 1954.
*Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun
1950-1963 No. 523*



Rebana untuk mengiringi tarian adat
di Sumbawa, 7 November 1954.

*Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963
No. 524*



Tarian Serimpi yang dibawakan anak-anak dalam resepsi Konferensi Dinas Penerangan di Sumbawa, 30 Agustus 1952.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 568

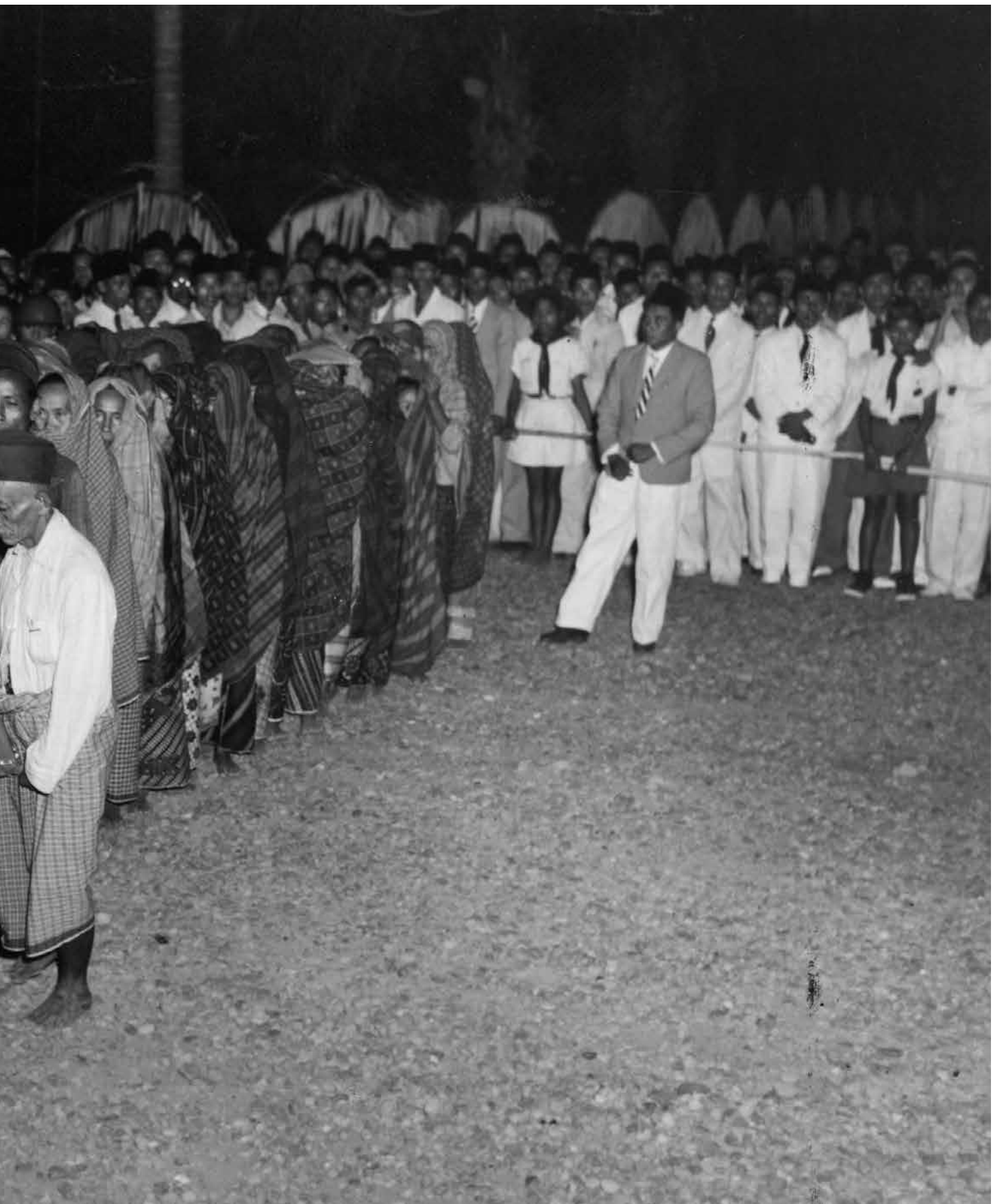


Tarian Gatot Kaca Gandrung dalam resepsi Konferensi
Dinas Penerangan di Sumbawa, 30 Agustus 1952.

Sumber : Anri. Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 569



Tarian Tanak pada saat kunjungan Presiden Sukarno di Sumbawa , 30 Oktober 1950.
Sumber : Anri: Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 600





Tari Payung yang dibawakan tiga perempuan
di Sumbawa Besar , 3 November 1957.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 938



Potret perempuan dan anak di Sumbawa Besar.
Sumber : Anri . Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 992



Suasana masyarakat yang melihat pameran Indonesia Bangun dan Peringatan Hari Ibu di Sumbawa Besar, 22 Desember 1952.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 2186





Dalam rangka memperingati hari Kartini nampak para ibu-ibu yang memenangkan perlombaan bayi berfoto bersama di Sumbawa Besar , 21 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 2193

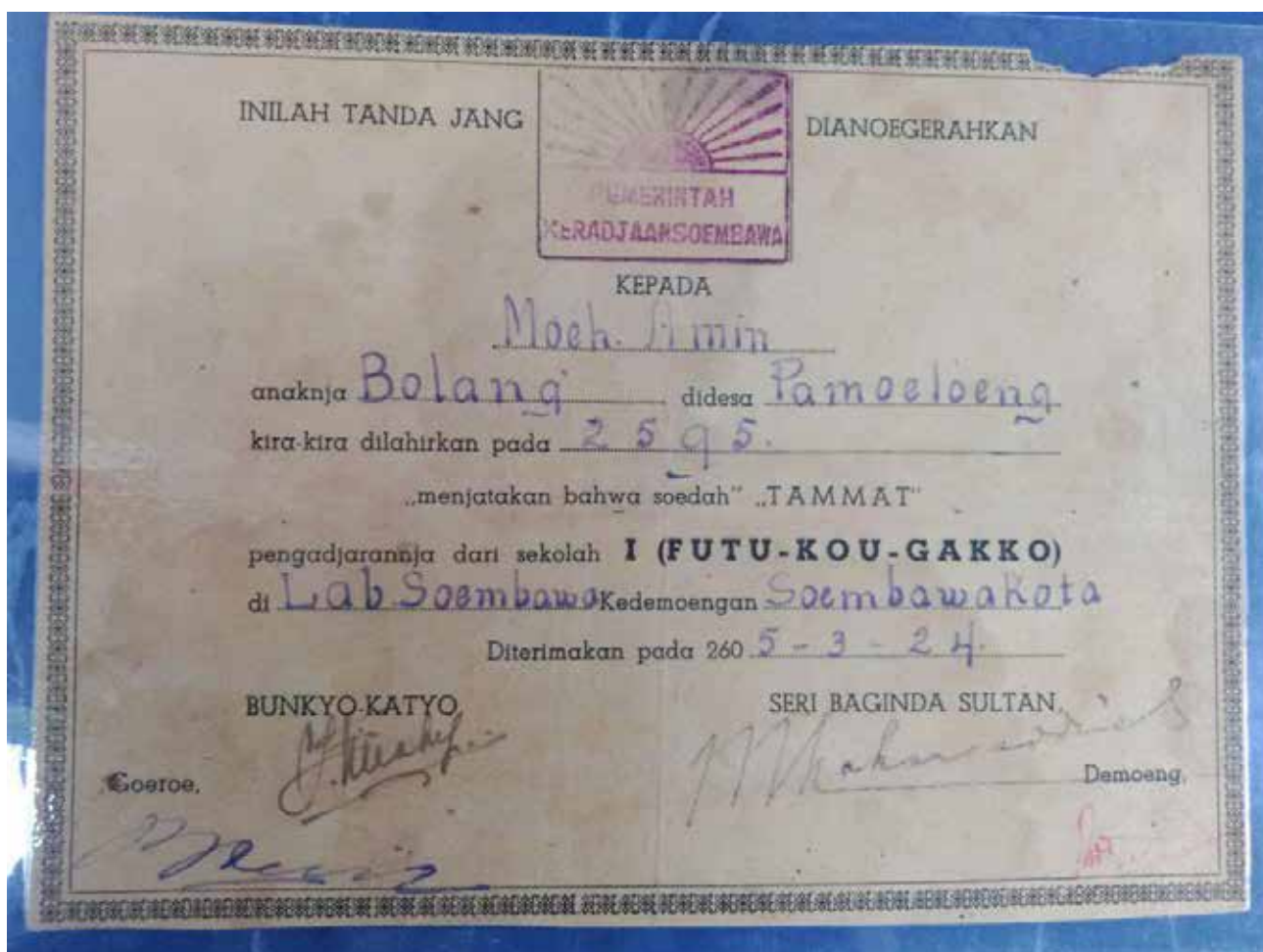


Pendidikan



Pada Bab Pendidikan terdapat 4 arsip yang menggambarkan sistem pendidikan dan pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

Masuknya Belanda ke Sumbawa tidak hanya dalam bidang perdagangan. Kerjasama yang dilakukan dengan Kesultanan juga membawa pengaruh pada bidang pendidikan. Sehingga sejak masa ini telah didirikan beberapa Sekolah diantaranya Sekolah Menengah Partikelir, Sekolah Rakyat dan bantuan pendidikan bagi para pelajar.



Ijazah era pemerintahan Jepang.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa

SALINAN:
AZ.No.77/5/S.E.F. *Kembali* *19/10* MOSI.

Sidang pengeroes serta pengadjaran2 dari sekolah menengah partikelir di Soembawa-Besar, jang dihadiri dioega oleh Padoeka Toean Dea Dipati, anggota Madjelis Pemerintah Kesultanan Soembawa serta Toean Pemeriksa sekolah (Schoolopzieder) Soembawa, jang diadakan pada tanggal 18 Juni 1948:

Menimbang,

1. bahwa pengembangan jang merata dari oeroesan pergoeroesan dalam lingkungan Negara Indonesia Timor kini sangat diboektikan oleh jang bai wadajib adalah soestoe kenjataan jang ts' dapat dibantah,
2. bahwa dalam keresidenan Timor dan DaErah Ta'loeknja beloem terasa oleh jang berwadajib, di daErah Soembawa boeat mengadakan sesoestoe sekolah jang lebih tinggi dari pada jang telah berada sekarang misalnya S.M., sebagai dioega jang telah kadjadian di lain2 daErah dalam keresidenan,
3. bahwa djikalau ditilik kedioercesan tentang banjaknja pendoeoek, banjaknja sekolah2, serta ditilik poela kepada kema'moeran Negri, maka daErah Soembawa haroes diaokei tidak kalah dari tetangga2nja dalam keresidenan,
4. bahwa menilik kepada keadsan sekolah menengah partikelir, jang didirikan pada tanggal 15 October 1947, jang hingga kini dapat berdjalan dengan baik.

Menimbang poela

1. bahwa oentoek mendirikan soestoe sekolah Menengah jang semporna (volwaardig) di Soembawa terdapat goeroe2 jang diperloekan, jaitoe seorang goeroe jang berdiploma Hoofdakte dan bebarapa orang goeroe jang berdiploma Kweekschool dan Normalschool.
2. bahwa oentoek keperluan itoe dapat disediakan dioega roemah sekolah dan bangkoe2nja.

Memotookkan.

Minta kepada Padoeka Jang Moelia Mantebi Pengadjaran dari Negara Indonesia Timor agar di Soembawa-Besar dengan selakea moengkin, djika dapat moelai dengan taheon adjaran 1948 - 1949 sekolah Menengah partikelir jang telah ada sekarang dapat dimiliki (dihandjai) oleh Negara Indonesia Timor.

Soembawa-Besar, 19 Juni 1948.-

Atas nama Pengeroes sekolah Menengah Partikelir Soembawa:
Ketoea I,
W.R.R. Toersino.-

Kehadapan
Padoeka Jang Moelia Mantebi Pengadjaran
Negara Indonesia Timor

di
MAKASSAR

Temboesan diaoerkan kepada:

1. Padoeka Toean Residen Timor dan DaErah Ta'loeknja di Koepang,
2. Padoeka Toean Assistant Resident Soembawa di Soembawa-Besar,
3. Seri Sultan Soembawa/Ketoea Federatie Poelau Soembawa di Soembawa-Besar,
4. Padoeka Toean Ketoea Dewan Poelau Soembawa di Soembawa-Besar,
5. Padoeka Toean Hoofd van Plaatselijk Bestuur/Sch. Com. di Soembawa-Besar,
6. Padoeka Toean Inspecteur Middelbaar Onderwijs di Makassar,
7. Padoeka Toean Kepala Dienst Onderwijs di Koepang,
8. Padoeka Toean2 anggota Madjelis Pemerintah Kesultanan Soembawa.

SOEMBAWA EILAND FEDERATIE.

No.77/5.-

Soembawa-Besar, 30 Juni 1948.-

Dengan segala hormat diaoerkan langsoang salinan kehadiran Seri/Padoeka Toean oentoek dapat ma'loem.-

Kehadapan
Seri Padoeka Toenkoe Sultan Bima

di
Bima.-

a/n Ketoea Federati Poelau Soembawa,
Ambtepaar Federasi Soembawa,

(Djoenaidi)

Mosi Pengurus Sekolah Menengah Partikelir Sumbawa mengenai pendidikan antara lain agar Negara Indonesia Timur memiliki Sekolah Menengah Partikelir, 30 Juni 1948
Sumber: ANRI, Kerajaan Bima No.S103

Fasal 16.

Peladjar2 yang menerima sokongan dari fonds ini ialah peladjar2 yang orang2 tuanya tidak mampu.

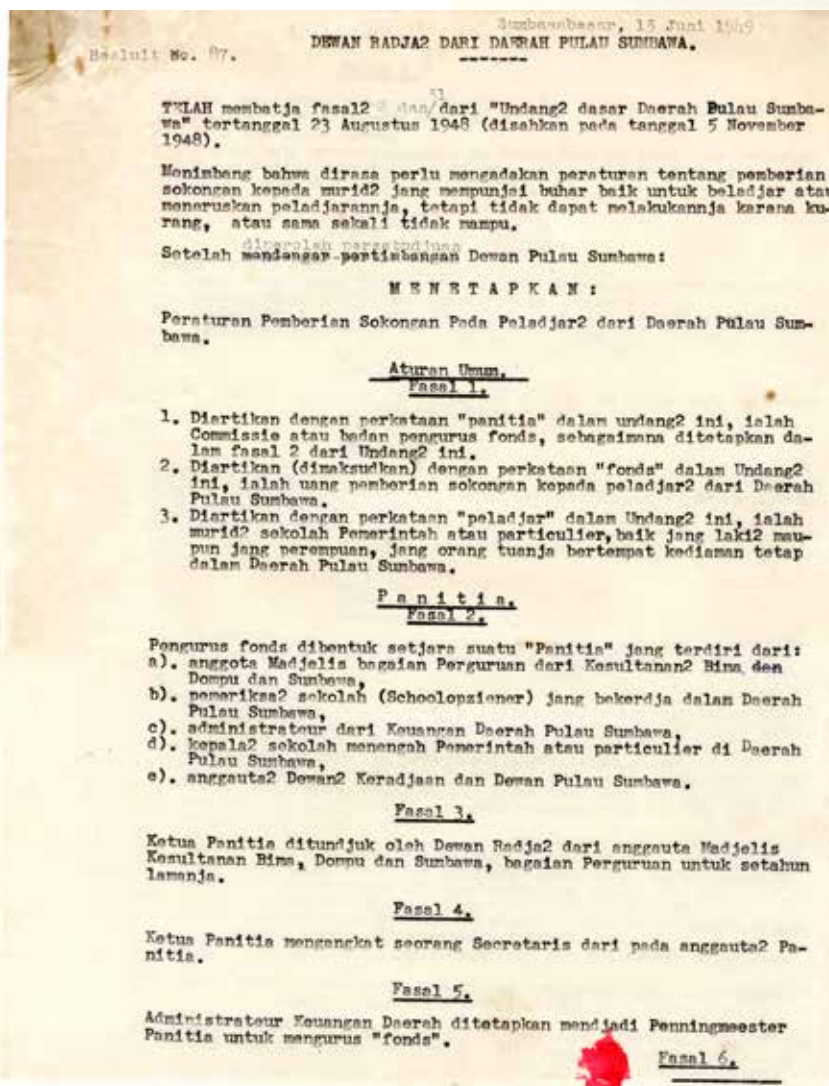
Fasal 17.

Mel2 yang tidak terdapat didalam aturan ini akan diurus oleh Panitia dengan persetujuan Dewan Radja2.-

-----ooOoo-----

Aturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 1949.-

Ketua Dewan Radja2 Daerah Pulau
Sumbawa,
Seri Sultan Sang,
hdt.
Moh. Salahuddin.



Peraturan pemberian sokongan pada pelajar-pelajar dari pulau Sumbawa, 13 Juni 1949.

Sumber: ANRI, Kerajaan Bima No. 283



Sekolah rakyat di Lape Sumbawa, 1950.

Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa

Kesehatan



Pada Bab Kesehatan terdapat 5 arsip yang menggambarkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Dalam bidang kesehatan pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dengan pemeriksaan kesehatan, pemberian vaksin salvarsan, serta pembangunan fasilitas rumah sakit



Dokter lari dari Jerman dan menetap di Sumbawa, (tanpa tahun).

Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Dokter Poch di Sumbawa bersama istri (tanpa tahun).

Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Dokter Hewan Belanda Bernard Eysenburger dan Istri Maria Elisabeth Hendrika Pierlot di Lape Sumbawa 1912 dan terbunuh tahun 1913 bersama istrinya di Sumbawa yang membuat gempar berita di Batavia.

Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Bangunan rumah sakit di Sumbawa, 10 Mei 1949

Sumber: ANRI, RVD NTT No. 429







Telah dilakukan penyuntikan
Salvarsan di pelosok
kampung Swapraja Sumbawa
di Sumbawa , Mei/ Juni 1953.

*Sumber : ANRI, Kempen NTT
Tahun 1950-1963 No. 529*

Derekonomian dan Pertanian



Pada Bab Perekonomian dan Pertanian terdapat 23 arsip yang menggambarkan perekonomian dan pertanian masyarakat Kabupaten Sumbawa sebagai sumber penghasilan dalam kehidupan sehari-hari. Daerah Kabupaten Sumbawa yang sebagian besar wilayah padang savana mendukung untuk pengembangbiakan hewan ternak kuda. Dan pada masa VOC kuda dan kayu Sepang menjadi komoditi utama dalam perdagangan.

Dalam bidang pertanian dan perkebunan menjadi potensi utama daerah Kabupaten Sumbawa dan menjadi mata pencaharian masyarakat Sumbawa. Pada kehidupan sehari-hari masyarakat Sumbawa menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, ubi dan sebagainya. Selain itu mereka juga mengandalkan hidup pada bidang perkebunan seperti kopra dan kayu. Kayu Sepang (Sappan) merupakan hasil kayu yang sudah diperdagangkan sejak abad ke -16. Beberapa hasil pertanian dan perkebunan ini banyak di ekspor ke Pulau Jawa dan daerah lainnya.



Wanita mengani padi di Sumbawa, (tanpa tahun)
Sumber : Lembaga Adat Tana Samarwa



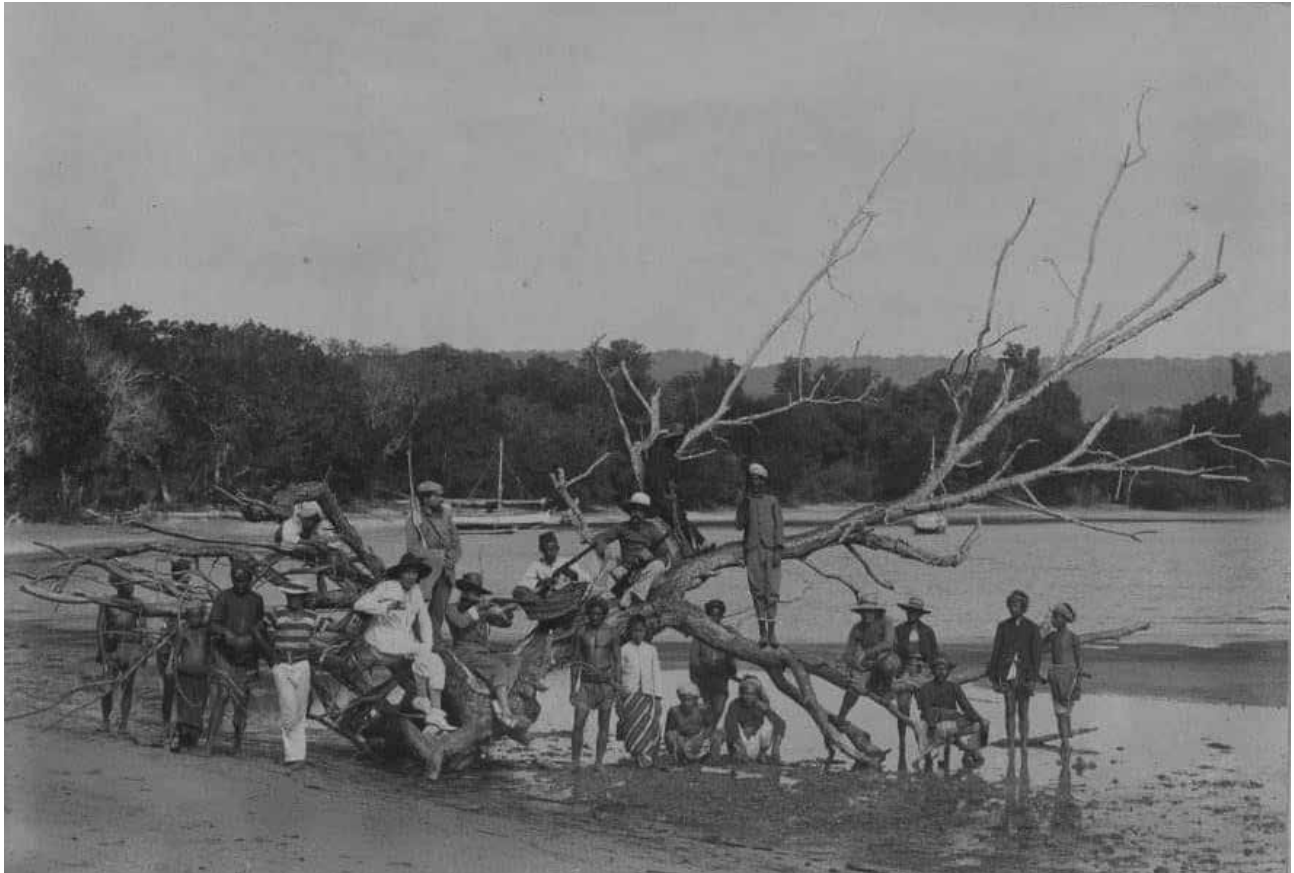
Pasar di Sumbawa, (tanpa tahun)
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Berburu di Pulau Moyo, 1912.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Suasana berburu di Pulau Moyo, 1912.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



berburu di Pulaui Moyo 1912
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Kuda-kuda dari Sumbawa yg akan
dikirim ke luar Pulau Sumbawa, 1930.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Kuda dan pemilik, Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat, [1930].

Sumber: ANRI, KIT NTB NTT No. 0669-014



Asisten Residen Sumbawa sebagai kepala pimpinan
para pemburu, Sumbawa, Nusa Tenggara, [1930].

Sumber: ANRI, KIT NTB NTT No. 0678-046



Kuda-kuda yang dijual, Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat [1930].

Sumber : Anri, KIT Nusa Tenggara No. 670/072

PERATOERAN TENTANG HAL MENGENAKAN DAN MEMOENGOET
PADJEG PENGHASILAN DI ATAS TANAH KERADJAAN2 (LANDSCHAP) BIMA DAN
DOMPOE, AFDEELING SOEMBAWA, KERESIDENAN TIMOER DAN DAERAH

TA'LOEKNJA

Fasal 1.

Didaerah Keradjaan2 Bima dan Dompoe, Onderafdeeling Bima, Afdeeling Soembawa dan Soemba, Keresidenan Timor dan daerah ta'loeknja, tanah2 didalamnja terhitoeng masok empang2 dan tanah pegaraman dikenakan padjeg menoeroet atoeran dalam verordening ini. Padjag itoe bernama Landrente. Tanah jang dikenakan padjeg itoe, ja'ni tanah2 jang kena hak benda dan jang tidak masok atoeran verponding.

Fasal 2.

- (1) Dari padjeg landrente itoe dibebaskan:
 - a. Tanah2 jang baroe diboeka, selama2nja tiga tahoen sesoedah selesai diboekat (djadikan), jaitoe djika menoeroet timbangan Pemerintah Keradjaan, setelah sefakat dengan Kepala Afdeeling, pekerdjaan memboeat itoe sangat soekarnja atau banjak ongkosnja.
 - b. tanah pekarangan dan pengembalaan persekoetoean adat (desa), tanah keramat dan koeboeran; tanah persekoetoean adat, tempat sesoetoe didirikan atau dikerdjakan oleh kampong jang berpaedah bagi oemoem atau oentoek djabatan oemoem, demikian djoega tanah2 jang ditoendjoekkan oleh Pemerintah Keradjaan, setelah sefakat dengan Kepala Afdeeling, jang hasilnja oentoek kepala2 anak negeri (tanah pangkat) atau oentoek badan oemoem, persekoetoean adat atau agama.
 - c. tanah2 jang ditoendjoekkan akan dipakai oentoek mentjoba banjaknja hasil boeat pemeriksaan landrente oentoek mendapat keterangan tentang hasil padi jang pertama dan hasil padi jang kedoea.
- (2) Pada tanah2 pangkat jang tidak dikenakan landrente sebagai antarnja dimaksoedkan pada (1) ajat b fatsal ini terhitoeng tanah2 jang ditoendjoekkan oleh Pemerintah2 Keradjaan oentoek mareka itoe (padjakal, bitjarakal, sekoeroekal), oentoek kepala Sedjeneli (djenelikai), oentoek Gelarang dan Kepala kampoeng (gelarangkai) dan oentoek pegawai2 kepemerintahan pengairan (so) jaitoe: pengita raba, poenggawa oi dan poenggawa koeta.

Fasal 3.

Oentoek memoengoet landrente, tanah itoe dibagi atas doea bahagian, jaitoe:

- 1e. sawah;
- 2e. tanah kering, empang dan tanah pegaraman.

Fasal 4.

- (1) Tanah didalam tiap2 gelarangschap atau kampoeng jang diwadjabkan kena landrente dioekoer menoeroet satoe2 perceel, jaitoe oleh pegawai jang ahli menoeroet atoeran jang dengan choesoes ditetapkan oentoek itoe.
- (2) Jang dikatakan perceel, ialah sekoempoelan salah satoe djenis tanah jang terseboet pada fasal 3 jang ditentoeakan dengan batas tanah jg: dinjatakan dalam atoeran jang dimaksoed dalam ajat pertama fatsal ini.

Bagian awal Peraturan tentang hal penenaan dan memungut pajak penghasilan di atas tanah-tanah kerajaan Bima dan Dompoe, afdeling Sumbawa, Sumba, dan dan daerah Ta'loeknya, 15 Mei 1941
Sumber: ANRI, Kerajaan Bima No.545

Kj. 3664/gek.49

STUK III



OPBRENGST copra-belasting per Daerah op basis van de inbrengcijfers 1948 en bij een belasting van f 2.50 per quintaal.-

Daerah	Inbreng in 1000 KG.	Opbrengst belasting	Daerah-tekort
I. Midden-Celebes	86.860	2.171.500	2.500.000
II. Minahassa	75.151	1.878.775	4.500.000
III. Sangihe en Talaud	23.980	599.500	1.200.000
IV. Noord-Celebes	25.740	643.500	1.000.000
V. Noord-Molukken	37.230	930.750	1.000.000
VI. Zuid-Molukken	12.458	311.450	4.500.000
VII. Zuid-Celebes	9.000	225.000	4.500.000
VIII. Flores etc.	7.973	199.325	2.400.000
Totaal	278.392	6.959.800	21.600.000

Bali niet in de cijfers begrepen omdat in deze Daerah het Coprafonds niet werkt. De belasting wordt aldaar op andere wijze geheven. Opbrengst op basis van f 2.50 en een productie van 20.000 ton = f 500.000.- op een Daerahtekort van f 3½ miljoen.

Pajak kopra per daerah di Negara Indonesia Timur, Bali dan Sumbawa tidak masuk hitungan karena usaha kopra tidak berjalan, 1948

Sumber: ANRI, Algemene Secretarie No.457



Pemandangan sawah-sawah di Sumbawa, 10 Mei 1949.

Sumber: ANRI, RVD NTT No. 356



Ibu-ibu menampi beras dengan tampah di Sumbawa, 10 Mei 1949.

Sumber: ANRI, RVD NTT No. 357



Kantor Koperasi Perikanan Serba Bangun dengan para anggota pengurusnya di Bungin, Sumbawa, 26 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen No.541026 NN 4-1



Menumbuk padi untuk dijadikan beras di Sumbawa,
29 Oktober 1954.

Sumber : Anri, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 2001





Keluarga petani sedang menumbuk padi di Sumbawa,
5 Juni 1955.

Sumber: Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1581



Ternak kuda yang banyak diusahakan oleh rakyat di Sumbawa , 5 Juni 1955.

Sumber : Anri : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1582



Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto sedang melakukan tatap muka dengan pemuka masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam rangka kegiatan panen raya mutiara di desa Tanjung Bero, Kecamatan Taliwang, Sumbawa, tanpa tahun.

Sumber: ANRI, Foto Setneg RI No. 2351





Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto sedang mengamati hasil panen mutiara saat melakukan peninjauan ke lokasi kerang penghasil mutiara di desa Tanjung Bero, Kecamatan Taliwang, Sumbawa, tanpa tahun.

Sumber: ANRI, Foto Setneg RI No. 2352



Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto didampingi Menteri Pertanian, Ir. Afandi sedang memperhatikan cara memanen mutiara di desa Tanjung Bero, Kecamatan Taliwang, Sumbawa, tanpa tahun.

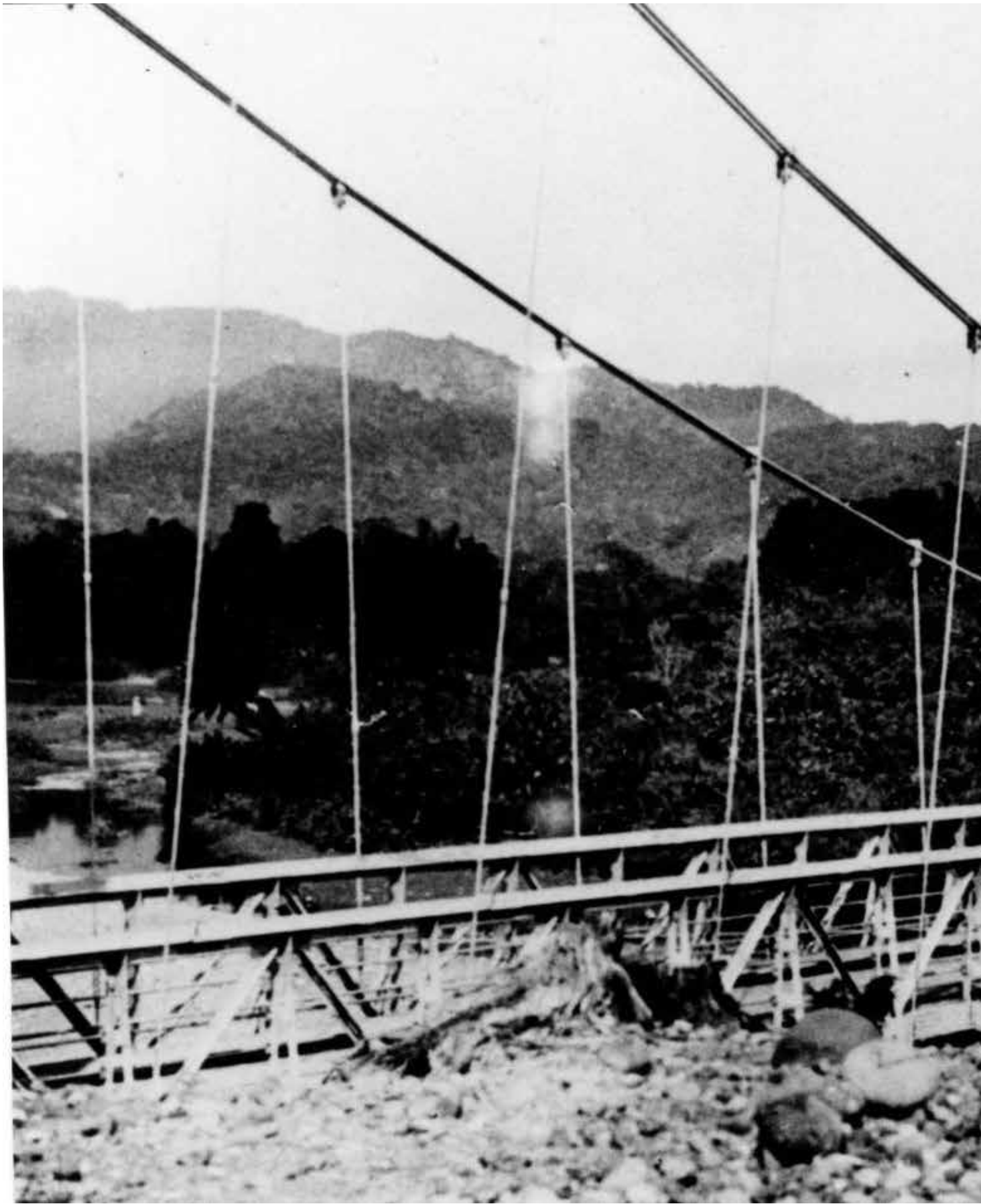
Sumber: ANRI, Foto Setneg RI No. 2353

Infrastruktur



Pada Bab Infrastruktur terdapat 16 arsip yang menggambarkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari pembangunan gedung perkantoran, tempat tinggal dan jembatan.

Pada masa Kesultanan Sumbawa telah dibangun beberapa istana sebagai tempat kediaman sultan dan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Sumbawa. Diantaranya dibangun istana Dalam Loka pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Djalaluddinsyah III (1883-1931). Istana yang dibangun pada tahun 1885 diatas tiang yang berjumlah 99 buah dengan konsep rumah panggung berlantai dua dan menggunakan material kayu jati. Berbeda dengan istana Dalam Loka, Istana Bala Puti dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931-1958). Istana yang dibangun pada tahun 1932 memiliki corak bangunan Eropa dengan warna cat dominan putih yang menjadi simbol era dan visi baru Sumbawa pada zamannya.



Jembatan gantung di jalan Sumbawa Besar ,
Taliwang, Nusa Tenggara Barat, [1930].

Sumber: ANRI, KIT NTB NTT No. 0518-028





Rumah-rumah kampung, Sumbawa ,
Nusa Tenggara Barat [1930].
Sumber : ANRI, KIT Nusa Tenggara No. 835/005



Rumah-rumah kampung, Sumbawa , Nusa Tenggara Barat [1930]

Sumber : ANRI, KIT Nusa Tenggara No. 854/036



Bangunan Istana Sultan Sumbawa, 10 Mei 1949
Sumber: ANRI, RVD NTT No. 12



Rumah pembesar di Sumbawa, 10 Mei 1949.

Sumber : ANRI, RVD Nusa Tenggara Timur Tahun 1947-1949 No. 11



Pembangunan jembatan di Sumbawa, November 1954.

Sumber : ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 2341





Rumah rakyat di Sumbawa, 5 November 1954.
Sumber : ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1965 No. 171



Rumah rakyat di Sumbawa, 5 November 1954.
Sumber : ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1965 No. 172



Rumah rakyat di Sumbawa, 5 November 1954.
Sumber : ANRI, KEMPEN NTT Tahun 1950-1965 No. 175





Pembangunan rumah dengan cara gotong royong di Sumbawa, 5 November 1954.
Sumber : ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1965 No. 174

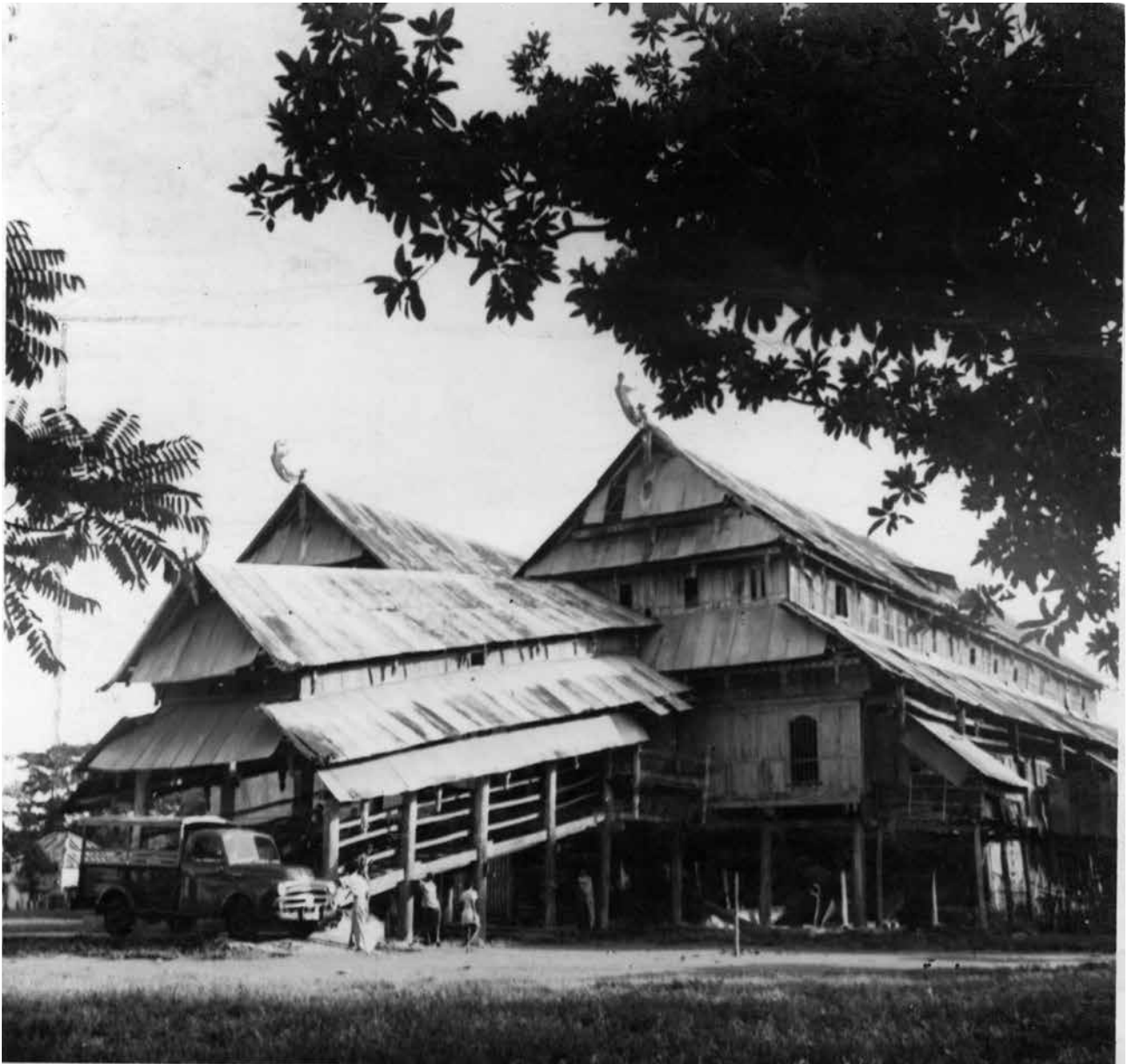




Sebuah rumah rakyat berbentuk panggung dan beratap santek (bambu) di Sumbawa , 5 Juni 1955.
Sumber: ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1567



Sebuah rumah rakyat berbentuk panggung dan beratap santek (bambu) di Sumbawa, 5 Juni 1955.
Sumber: Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1564



Istana tua Kesultanan Sumbawa, 5 Juni 1955.
Sumber : ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1568



Rumah-rumah rakyat berbentuk panggung dan beratap santek (bambu) di Sumbawa, 5 Juni 1955.
Sumber : ANRI : Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1573



Gedung Kantor Jawatan Penerangan daerah Sumbawa di Sumbawa Besar , 5 Juni 1955.

Sumber : ANRI, Kempen NTT Tahun 1950-1963 No. 1574



Sebuah rumah di pinggir jalan besar antara Sumbawa dan Dompu, 15 Maret 1956.
Sumber : ANRI. Kempen NTT 1950-1963 No. 184

Transportasi



Pada Bab Transportasi terdapat 11 arsip yang menggambarkan pembangunan transportasi di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Alat transportasi tradisional berupa kuda masih menjadi pilihan masyarakat Sumbawa. Alat angkut itu bernama cidomo yang merupakan akronim dari cikir, dokar, dan mobil. Alat transportasi ini berupa kereta penumpang menggunakan dua ban mobil dan dihela seekor kuda. Selain sebagai alat transportasi kuda juga dikembang biakkan menjadi hewan ternak yang dapat dieskpor keluar daerah.



Kerbau di jalanan Sumbawa Besar (tanpa tahun)

Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Kerbau mengangkut padi di Sumbawa (tanpa tahun)

Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Transportasi di Sumbawa, 1920.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Penunggang kuda di Sumbawa, 1926.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Orang Bima membawa beban dengan anak kecil yang memegang tali kuda yang membawa barang di punggung, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, [1930].

Sumber: ANRI, KIT 0700069



Orang Bima dengan kerbau membawa beban,
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, [1930].

Sumber: ANRI, KIT 0700-066



Joki cilik di Sumbawa, 1951.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samarwa



Joki cilik di Sumbawa, 1951.
Sumber : Lembaga Adat Tana Samawa



Untuk kaderisasi, sejak kecil anak kuda telah dilatih berjalan jauh mengikuti induknya yang sedang mengangkut kopra di Sumbawa, 1952
Sumber: ANRI, RVD 80922 NNA





Kuda tunggang yang terdapat banyak di Sumbawa yang digunakan oleh rakyat sebagai alat pengangkut dari desa ke kota Sumbawa, 29 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen No.541029 NN 1-3





Menteri Penerangan F.L. Tobing
meninjau keadaan pelabuhan di
Sumbawa, 5 Juni 1955.

*Sumber: Anri, Kempen NTT Tahun
1950-1963 No. 1563*

DAFTAR PUSTAKA

- Hery Musbiawan, 2018, *Sejarah dan perkembangan Islam di Sumbawa*, Sumbawa Besar, Pajenang
- Aries Zulkarnain, Tri Satriawansyah, Ridho Fisabilillah , Desember 2017, *Menghimpun Yang Terserak Esai-esai Sejarah Lokal Sumbawa*, Kabupaten Sumbawa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Arti Bumi Intaran, Trussmedia Grafika,
- Rai Saputra, Aries Zulkarnain, Imam Muhidin Safari, Eika Wahdunia, Koedrat Hidayat, Dewa Ayu Dwi Maharani, Jihan Fadhilah, Nofiana Ayu Risqiana Sari, November 2017, *Sumbawa dalam kepingan sejarah*, Kabupaten Sumbawa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Arti Bumi Intaran, Trussmedia Grafika,
- Tawalinuddin Haris , 2015, *Kasultanan Samawa di Pulau Sumbawa dalam Kurun Waktu Abad XVII – XX*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13, No. 1, 1 – 30
- I Ketut Ardhana, 2005, *Pemerintahan Pusat dan Swapraja: Masalah Sentralisasi dan Desentralisasi*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 7 No. 2
- Lalu Wacana, B.A, Drs. Abdul Wahab H. Ismail, Jaka Sumpeno, B.A, Agustus 1991, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Majelis Adat, Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), *Informasi dan Data Kesejarahan Kesultanan Sumbawa, 1648-1958*, Sumbawa Besar, Majelis Adat, Lembaga Adat Tana Samawa (LATS)

<http://www.sumbawakab.go.id>

<https://id.wikipedia.org> › wiki › Kabupaten_Sumbawa

PENUTUP

Program citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah diberbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan mampu menjadi salah satu dinas atau instansi yang dapat mewujudkan “*clean government*” dipemerintahan daerah maupun pusat dengan melakukan penyelamatan arsip yang bernilai pertanggungjawaban historis dan hukum.

Arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang terpercaya dalam sejarah perjalanan bangsa sesungguhnya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam pengambilan kebijakan pada masa kini. Dan juga kita dapat belajar dari sejarah masa lalu untuk kemajuan dimasa kini dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks. Citra Kabupaten Sumbawa ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat dengan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah akademisi, dewan, dan masyarakat umum.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Dan akhirnya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id